



Katalog BPS: 4101005

# ANALISIS PERKEMBANGAN STATISTIK KETENAGAKERJAAN

(Laporan Sosial Indonesia 2007)



**Badan Pusat Statistik**



**ANALISIS PERKEMBANGAN  
STATISTIK KETENAGAKERJAAN  
(Laporan Sosial Indonesia 2007)**

<https://www.bps.go.id>

**Sub Direktorat Indikator Statistik  
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik**

# **ANALISIS PERKEMBANGAN STATISTIK KETENEGAKERJAAN (Laporan Sosial Indonesia 2007)**

ISSN : 1858 - 0955  
No. Publikasi : 07330.0817  
Katalog BPS : 4101005  
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : 207 halaman

Naskah:  
Sub Direktorat Indikator Statistik

Gambar Kulit:  
Sub Direktorat Indikator Statistik  
(Gambar bersumber dari <http://yodhi19.deviantart.com/art/Pekerja-Besi-Tua-93318043> dan <http://riana22.deviantart.com/art/kuli-PSK-94700424>)

Diterbitkan oleh:  
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:  
CV. Nario Sari

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya**

**ANALISIS PERKEMBANGAN STATISTIK KETENAGAKERJAAN  
(Laporan Sosial Indonesia 2007)**

Pengarah : Wiwiek Arumwaty

Editor : Sri Indrayanti  
Vera Lisna

Penulis : Sri Indrayanti  
Vera Lisna  
Sofaria Ayuni  
Ema Tusianti  
Risyanto

Pengolahan Data/Penyiapan Draft : Ema Tusianti

Kontributor Data : Direktorat Statistik Kependudukan dan  
Ketenagakerjaan

Secara teratur, Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun menyajikan hasil analisis tentang keadaan dan permasalahan sosial serta kecenderungan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Topik yang disajikan pada setiap edisi berbeda berdasarkan isu tertentu yang dianggap penting untuk disajikan. Topik-topik yang dibahas tersebut dapat berupa permasalahan sosial yang dihadapi anak-anak dan balita, gender, penduduk lanjut usia (lansia), kemiskinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, atau permasalahan sosial lainnya.

Topik yang diangkat pada publikasi mengenai perkembangan kondisi sosial di Indonesia tahun 2007 ini adalah **Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan** yang merupakan publikasi ke sembilan. Secara umum, publikasi ini membahas tentang ketersediaan data ketenagakerjaan dan perbandingan kondisi ketenagakerjaan Indonesia dengan beberapa negara lain khususnya negara tetangga, serta analisis perkembangan jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran, dan indikator-indikator ketenagakerjaan lain, yang mengacu pada Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja atau *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO).

Data yang digunakan untuk penulisan publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan beberapa organisasi internasional. Untuk melengkapi hasil analisis, publikasi ini juga menyajikan informasi tentang konsep dan kondisi ketenagakerjaan yang berlaku di masyarakat yang diperoleh dari hasil studi mendalam di 5 (lima) provinsi di Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Semua kritik dan saran sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2008  
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan  
NIP. 340003999

<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Daftar Tabel</b> .....	ix
<b>Daftar Gambar</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Ruang Lingkup .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
<b>BAB II STATISTIK KETENAGAKERJAAN DUNIA</b> .....	7
2.1. Organisasi Ketenagakerjaan Dunia (ILO) .....	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja .....	12
2.3. Sumber Data Ketenagakerjaan .....	21
2.4. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan .....	30
2.5. Analisis Statistik Ketenagakerjaan Dunia .....	39
2.5.1. Partisipasi Angkatan Kerja .....	39
2.5.2. Pengangguran .....	40
2.5.3. Produktivitas Tenaga Kerja .....	41
2.5.4. Tenaga Kerja menurut Sektor Agregat .....	42
<b>BAB III SUMBER DATA STATISTIK KETENAGAKERJAAN</b> .....	45
3.1. Data Statistik Ketenagakerjaan BPS .....	47
3.1.1. Sensus/Survei Rumah Tangga .....	49
3.1.2. Sensus/Survei Perusahaan .....	54
3.1.3. Survei/Studi Khusus .....	58
3.2. Data Ketenagakerjaan Depnakertrans .....	59
<b>BAB IV STATISTIK KETENAGAKERJAAN INDONESIA</b> .....	61
4.1. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja .....	63
4.2. Karakteristik Penduduk Bekerja .....	68
4.2.1. Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur .....	68
4.2.2. Penduduk Bekerja menurut Tingkat Pendidikan .....	69
4.2.3. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha .....	70
4.2.4. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan .....	72
4.2.5. Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja .....	73

	<b>Halaman</b>
<b>BAB V STATISTIK PENGANGGURAN INDONESIA .....</b>	<b>75</b>
5.1. Konsep dan Definisi Pengangguran .....	78
5.2. Kebijakan dan Program Penanggulangan Pengangguran .....	83
5.3. Analisis Pengangguran .....	90
5.3.1. Pengangguran menurut Kategori .....	91
5.3.2. Pengangguran menurut Provinsi .....	92
5.3.3. Pengangguran menurut Jenis Kelamin .....	94
5.3.4. Pengangguran menurut Pendidikan .....	94
5.3.5. Pengangguran menurut Kelompok Umur .....	97
5.3.6. Pengangguran menurut Daerah Tempat Tinggal .....	99
5.3.7. Pengangguran menurut Negara .....	100
<b>BAB VI STUDI KUALITATIF TENTANG KETENAGAKERJAAN DI LIMA WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>103</b>
6.1. Pendahuluan .....	105
6.2. Gambaran Wilayah Penelitian .....	106
6.2.1. Kondisi Geografis .....	106
6.2.2. Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Wilayah .....	106
6.2.3. Kependudukan dan Perekonomian Penduduk .....	108
6.3. Ketenagakerjaan .....	108
6.3.1. Kondisi Ketenagakerjaan .....	108
6.3.2. Program Ketenagakerjaan .....	109
6.3.3. Peran Balai Latihan Kerja .....	110
6.4. Pemahaman dan Saran Perbaikan Konsep Ketenagakerjaan .....	111
6.4.1. Pemahaman Responden Rumah Tangga .....	111
6.4.2. Perbedaan Konsep Ketenagakerjaan .....	112
6.4.3. Saran untuk Perbaikan Sakernas .....	113
<b>LAMPIRAN HASIL STUDI KUALITATIF TENTANG KETENAGAKERJAAN ....</b>	<b>115</b>
Kota Medan - Provinsi Sumatera Utara .....	117
Kota Padang - Provinsi Sumatera Barat .....	131
Kota Denpasar - Provinsi Bali .....	146
Kota Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah .....	160
Kota Kendari - Provinsi Sulawesi Tenggara .....	178
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>193</b>
<b>Istilah Teknis .....</b>	<b>196</b>

Tabel 2.1.	TPAK (KILM 1) dan TPT (KILM 8) Beberapa Negara di Dunia, 2005-2007 .....	40
Tabel 2.2.	TPT Beberapa Negara (%), 2000-2007 .....	41
Tabel 2.3.	Produktivitas Tenaga Kerja (US\$ per pekerja), 2000-2007 .....	42
Tabel 2.4.	Proporsi Tenaga Kerja menurut Sektor Agregat (%), 2000-2007 .....	43
Tabel 2.5.	Proporsi Tenaga Kerja menurut Sektor Agregat dan Jenis Kelamin (%), 2000-2007 .....	44
Tabel 3.1.	Sejarah Sakernas, 1986 - 2008 .....	50
Tabel 4.1.	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke atas menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2003-2007 .....	65
Tabel 4.2.	Inactivity Rate (persen), 2003-2007 .....	67
Tabel 4.3.	Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur (persen), 2003-2007 .....	68
Tabel 4.4.	Penduduk Bekerja menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2003-2007 .....	70
Tabel 4.5.	Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2003-2007 .....	72
Tabel 4.6.	Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan (persen), 2003-2007 .....	73
Tabel 4.7.	Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu (persen), 2003-2007 .....	74
Tabel 5.1.	Jumlah Pengangguran Terbuka menurut Kategori, 2001-2007 .....	91
Tabel 5.2.	TPT menurut Provinsi (persen), 2003-2007 .....	93
Tabel 5.3.	TPT menurut Jenis Kelamin (persen), 2001-2007 .....	94
Tabel 5.4.	Jumlah Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (000), 2003-2007 .....	95
Tabel 5.5.	TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2003-2007 .....	96
Tabel 5.6.	TPT menurut Kelompok Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2003-2007 .....	97
Tabel 5.7.	TPT menurut Kelompok Umur (persen), 2001-2007 .....	98
Tabel 5.8.	TPT menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2001-2007 .....	100
Tabel 5.9.	TPT menurut Beberapa Negara (persen) .....	101
Tabel 6.1.	Lokasi Penelitian Studi Kualitatif Tentang Ketenagakerjaan .....	105

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (%), 2000-2007 .....	42
Gambar 4.1. Diagram Ketenagakerjaan .....	64
Gambar 4.2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2003-2007 .....	66
Gambar 4.3. <i>Inactivity Rate</i> , 2003-2007 .....	67
Gambar 4.4. Persentase Penduduk Bekerja Pada Kelompok Umur 25-54, 2003-2007 .....	68
Gambar 4.5. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, 2003-2007 .....	72
Gambar 4.6. Persentase Setengah Pengangguran (Jam Kerja < 35 Jam), 2003-2007 .....	73
Gambar 5.1. TPT (persen), 2001-2007 .....	91
Gambar 5.2. Pengangguran Terbuka menurut Kategori Pengangguran, 2001-2007 .....	92
Gambar 5.3. TPT menurut Jenis Kelamin (persen), 2001-2007 .....	94
Gambar 5.4. Jumlah Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (000), 2003-2007 .....	95
Gambar 5.5. Jumlah Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (000), 2003-2007 .....	96
Gambar 5.6. TPT menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (persen), 2003-2007 .....	96
Gambar 5.7. Jumlah Pengangguran SLTA Umum dan SLTA Kejuruan (000), 2003-2007 .....	97
Gambar 5.8. TPT Penduduk dengan Tingkat Pendidikan SLTA Umum dan SLTA Kejuruan (persen), 2003-2007 .....	97
Gambar 5.9. TPT menurut Kelompok Umur (persen), 2001-2007 .....	98
Gambar 5.10. TPT menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2001-2007 .....	100

# PENDAHULUAN

- Latar Belakang* ●
- Ruang Lingkup* ●
- Tujuan Penelitian* ●

1



### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) telah dirumuskan dalam prinsip *triple track strategy* yaitu *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi), *pro-job* (kesempatan/lapangan kerja) dan *pro-poor* (rakyat miskin). *Track* pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan yang mengutamakan ekspor dan investasi, *track* kedua dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja, dan *track* ketiga dengan merevitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi kemiskinan.

Dalam strategi tersebut jelas dinyatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas penting dalam pembangunan Indonesia karena tenaga kerja merupakan modal penting dalam menggerakkan roda pembangunan suatu negara. Namun demikian, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terus bergulir menjadi besar dan kompleks. Besar, karena jumlah angkatan kerja yang besar dan cenderung terus meningkat sejalan dengan transisi demografi yang menyebabkan komposisi penduduk usia produktif meningkat lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Kompleks, karena keterkaitan yang erat dengan berbagai faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan prasyarat bagi penciptaan lapangan kerja.

Untuk memotret kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan perkembangannya dari waktu ke waktu, Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin mengumpulkan data ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan survei dan sensus, antara lain Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Upah, Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), Sensus Penduduk (SP), Sensus Ekonomi (SE), dan Sensus Pertanian (ST). Ruang lingkup pengumpulan data ini ada yang bersifat nasional, namun ada juga yang dapat diestimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan statistik wilayah kecil

*Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia besar dan kompleks. Besar karena menyangkut besarnya jumlah penduduk dan meningkatnya komposisi penduduk usia produktif, dan kompleks karena terkait erat dengan faktor-faktor internal dan eksternal*

(*small area statistics*) BPS secara bertahap terus melakukan penyempurnaan. Beberapa indikator statistik ketenagakerjaan yang dapat diperoleh dari sumber data tersebut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), dan rata-rata upah nominal per bulan.

Hal utama yang melatar belakangi penyusunan publikasi ini ialah untuk mengetahui seberapa jauh *track pro-job* yang telah dicanangkan pemerintah dapat memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, serta perbandingannya dengan beberapa tahun sebelumnya. Selain itu, dengan mengetahui statistik ketenagakerjaan di beberapa negara di dunia dan membandingkannya dengan Indonesia, dapat diketahui seberapa jauh perbedaan kondisi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain seperti beberapa negara ASEAN dan negara-negara maju. Juga dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam penyempurnaan metodologi penyusunan indikator-indikator ketenagakerjaan.

### 1.2. Ruang Lingkup

Laporan Sosial Indonesia Tahun 2007 disusun untuk menganalisis perkembangan statistik ketenagakerjaan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir khususnya setelah dicanangkannya *triple track strategy* sebagai prinsip pembangunan Indonesia yang salah satunya adalah mengutamakan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran.

*Laporan Sosial Indonesia  
Tahun 2007 ini  
menganalisis  
perkembangan situasi  
ketenagakerjaan di  
Indonesia khususnya  
setelah dicanangkannya  
prinsip triple track strategy*

Publikasi ini terdiri dari enam bab. Bab satu berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup, dan tujuan disusunnya publikasi ini. Bab dua berisi penjelasan mengenai statistik ketenagakerjaan dunia yang berisi tentang indikator ketenagakerjaan kunci, sumber-sumber data ketenagakerjaan, perbedaan konsep dan definisi, serta analisis statistik ketenagakerjaan dunia. Bab tiga mengulas ketersediaan data statistik ketenagakerjaan berikut konsep dan definisinya yang ada di Indonesia baik yang berasal dari BPS maupun instansi luar BPS. Bab empat berisi ulasan

mengenai situasi ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan hasil Sakernas. Mengingat angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam memantau keberhasilan pembangunan di Indonesia, maka analisis tentang pengangguran di Indonesia disajikan dalam satu bab tersendiri yaitu bab lima.

Selain analisis kuantitatif yang datanya bersumber dari berbagai survei ketenagakerjaan, laporan ini dilengkapi juga dengan analisis kualitatif yang diperoleh dari hasil studi mendalam (*in-depth study*) di beberapa wilayah di Indonesia yang dilakukan pada tahun 2007. Analisis kualitatif ini diharapkan dapat mendukung gambaran situasi ketenagakerjaan di Indonesia berdasarkan hasil pengumpulan data kuantitatif.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Secara umum laporan ini bertujuan untuk menggambarkan situasi ketenagakerjaan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir yang dapat diketahui melalui :

1. Perkembangan statistik ketenagakerjaan di dunia dan perbandingannya dengan Indonesia
2. Perkembangan pengumpulan data ketenagakerjaan di Indonesia, konsep dan definisi, serta metodologi
3. Analisis perkembangan statistik ketenagakerjaan di Indonesia, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPPT)



# STATISTIK KETENAGAKERJAAN DUNIA

- Organisasi Ketenagakerjaan Dunia (ILO)* ●
- Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja* ●
- Sumber Data Ketenagakerjaan* ●
- Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan* ●
- Analisis Statistik Ketenagakerjaan Dunia* ●

2



Tenaga kerja adalah modal penting bagi Bergeraknya roda pembangunan di suatu negara. Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu negara dibutuhkan informasi mengenai statistik ketenagakerjaan, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Statistik ketenagakerjaan tersebut diperoleh melalui pengumpulan data baik sensus maupun survei. Demikian juga Indonesia selalu melaporkan indikator ketenagakerjaannya yang merupakan statistik resmi negara dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS setiap tahun. Melalui indikator-indikator tersebut dapat diketahui posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Namun demikian, dalam melakukan perbandingan perlu memperhatikan konsep dan definisi yang digunakan.

*Konsep dan definisi berperan penting dalam hal perbandingan statistik ketenagakerjaan antar negara*

Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di beberapa negara serta perbandingannya dengan Indonesia, bab ini membahas mengenai informasi ketenagakerjaan lintas negara yang mencakup indikator kunci pasar tenaga kerja, sumber data ketenagakerjaan, konsep dan definisi ketenagakerjaan, dan analisis statistik ketenagakerjaan beberapa negara di dunia. Tetapi sebelumnya, ulasan akan diawali dengan penjelasan mengenai organisasi ketenagakerjaan di dunia yang banyak berkontribusi dalam menentukan indikator perbandingan statistik ketenagakerjaan dunia. Karena kendala ketersediaan data, tulisan ini hanya membahas situasi ketenagakerjaan di enam negara, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Australia, dan Amerika Serikat.

### **2.1. Organisasi Ketenagakerjaan Dunia (ILO)**

Ada beberapa organisasi dunia yang berkontribusi menyediakan konsep, definisi, dan data ketenagakerjaan untuk keperluan negara-negara di dunia, antara lain *International Labour Organization (ILO)*, *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank (WB)*, dan *Asian Development Bank (ADB)*. Di antara organisasi-organisasi tersebut, ILO yang paling banyak menyediakan konsep dan statistik ketenagakerjaan dunia.

ILO dibentuk untuk membantu penduduk dunia baik perempuan maupun laki-laki untuk memiliki kesempatan

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dalam situasi bebas, adil, aman, dan bermartabat. ILO didirikan pada tahun 1919 dan kemudian pada tahun 1946 menjadi agen PBB yang bersifat spesialis. ILO merupakan satu-satunya agen PBB tripartit yang mengajak perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bekerjasama menyusun kebijakan dan program ketenagakerjaan dunia. Dengan demikian, standar ketenagakerjaan internasional yang dibangun oleh ILO dapat berlaku secara praktis dan sesuai prinsip. Beberapa konsep ketenagakerjaan disusun oleh ILO dan terangkum dalam Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja atau *Key Indicators of the Labour Market* (KILM). Saat ini ILO menyediakan KILM edisi ke-5 yang dapat diakses melalui internet di situs ILO dengan alamat <http://www.ilo.org>.

Untuk mewujudkan tujuan dibentuknya ILO, beberapa kali diadakan konvensi internasional, salah satunya menentukan batas usia minimum seseorang diperbolehkan bekerja. Penduduk usia kerja biasanya dikelompokkan ke dalam angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Pada umumnya negara-negara di dunia menentukan batasan usia minimum penduduknya untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Ini sesuai dengan keputusan Konvensi ILO (*International Labor Organization*) No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang dikeluarkan pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional ke-58 tanggal 26 Juni 1973 di Jenewa. Konvensi tersebut diadakan karena masih banyak negara yang tidak menerapkan beberapa konvensi sebelumnya dan melakukan berbagai bentuk penyimpangan batas usia minimum untuk bekerja. Sehingga ILO merasa perlu menyusun dan mengesahkan konvensi yang secara khusus mempertegas batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun. Namun, untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun.

*Sesuai dengan keputusan  
Konvensi ILO Nomor 38,  
batasan usia minimum  
untuk bekerja yang berlaku  
di berbagai negara adalah  
15 tahun*

Konvensi ini juga mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi menetapkan batas usia minimum penduduknya diperbolehkan bekerja, termasuk negara Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Indonesia sebagai anggota PBB dan anggota ILO menetapkan bahwa batas usia minimum seseorang diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun.

Indonesia telah mengesahkan konvensi tersebut melalui UU No. 20 Tahun 1999 dengan berbagai alasan, antara lain :

*Dengan meratifikasi berbagai instrumen PBB yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan mewujudkan kesepakatan Deklarasi ILO dalam Sidang Umum ke-86, menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak dasar anak khususnya di bidang ketenagakerjaan*

- (1) Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UUD 45.
- (2) Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Presiden dan DPR harus meratifikasi berbagai instrumen PBB yang berkaitan dengan HAM.
- (3) Mewujudkan kesepakatan Deklarasi ILO dalam Sidang Umumnya yang ke-86 di Jenewa bulan Juni 1998 yang menyatakan bahwa setiap negara wajib menghormati dan mewujudkan prinsip-prinsip ketujuh Konvensi Dasar ILO.

Pengesahan konvensi ini menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam memajukan dan melindungi hak dasar anak yang akan meningkatkan citra positif Indonesia dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional.

Perbedaan batas usia minimum untuk setiap jenis pekerjaan juga berlaku di negara-negara lain. Sebagai contoh, *The Fair Labor Standard Acts (FLSA)* tahun 1938 yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat menentukan batas umur minimum penduduknya untuk diperbolehkan bekerja adalah 16 tahun, dengan beberapa pengecualian yaitu dapat berusia 15 tahun atau kurang untuk bidang pertanian, perdagangan eceran, dan industri makanan.

### 2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja

Indikator-indikator kunci yang dapat menggambarkan situasi pasar tenaga kerja (*labor market*) di suatu wilayah atau negara dikenal dengan *The Key Indicators of the Labour Market* (KILM). Kumpulan indikator ini diterbitkan setiap tahun oleh lembaga ketenagakerjaan dunia yaitu ILO (*International Labour Organization*). KILM sangat bermanfaat untuk menganalisis ketenagakerjaan di suatu wilayah termasuk perbandingan antar negara. KILM terakhir yang diluncurkan pada bulan September 2007 merupakan edisi ke-5 dan terdiri dari 20 indikator aspek ketenagakerjaan, yaitu :

*Pada the Key Indicators of the Labour Market (KILM) edisi ke-5, ILO menyusun 20 indikator yang digunakan untuk menganalisis ketenagakerjaan di suatu wilayah termasuk perbandingan antar negara*

KILM 1 : *Labour force participation rate* / Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;

KILM 2 : *Employment-to-population ratio* / Rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia kerja;

KILM 3 : *Status in employment* / Penduduk bekerja menurut status pekerjaan;

KILM 4 : *Employment by sector* / Penduduk bekerja menurut sektor;

KILM 5 : *Part-time employment* / Penduduk bekerja paruh waktu;

KILM 6 : *Hours of work* / Proporsi penduduk bekerja menurut jam kerja;

KILM 7 : *Employment in the informal economy* / Penduduk bekerja di sektor informal;

KILM 8 : *Unemployment* / Tingkat Pengangguran Terbuka;

KILM 9 : *Youth unemployment* / Tingkat pengangguran usia muda;

KILM 10 : *Long-term unemployment* / Persentase pengangguran setahun atau lebih;

KILM 11 : *Unemployment by educational attainment* / Proporsi pengangguran menurut pendidikan yang ditamatkan;

KILM 12 : *Time-related underemployment* / Proporsi setengah pengangguran menurut jam kerja;

KILM 13 : *Inactivity rate* / Persentase penduduk bukan angkatan kerja usia 25-54 tahun terhadap total penduduk usia kerja;

KILM 14 : *Educational attainment and literacy* / Proporsi

angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan dan kemampuan baca tulis;

KILM 15 : *Manufacturing wage indices* / Indeks upah industri manufaktur;

KILM 16 : *Occupational wage and earning indices* / Indeks upah dan penghasilan;

KILM 17 : *Hourly compensation costs* / Biaya kompensasi per jam;

KILM 18 : *Labour productivity and unit labour costs* / Tingkat produktivitas pekerja dan biaya pekerja per satuan output;

KILM 19 : *Employment elasticities* / Elastisitas pekerjaan;

KILM 20 : *Poverty, working poverty, and income distribution* / Kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan

Keduapuluh indikator pasar tenaga kerja tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 8 kategori, yaitu (1) indikator partisipasi dalam dunia kerja; (2) indikator bekerja; (3) indikator pengangguran; (4) indikator pendidikan; (5) indikator upah; (6) indikator produktivitas pekerja; (7) indikator elastisitas pekerjaan; dan (8) indikator kemiskinan.

### **(1) Indikator Partisipasi Dalam Dunia Kerja**

KILM 1. *Labour force participation rate* / Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

*Proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif secara ekonomi diukur melalui TPAK*

TPAK merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (supply) yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi (*economically active population*) di suatu negara atau wilayah.

### **(2) Indikator Bekerja**

KILM 2. *Employment-to-population ratio* / Rasio penduduk bekerja terhadap penduduk usia kerja

Indikator ini berisi informasi tentang kemampuan suatu negara atau wilayah untuk menciptakan pekerjaan. Di beberapa

negara indikator ini seringkali lebih berarti dibandingkan tingkat pengangguran. Meskipun angka rasio yang tinggi memberi indikasi positif namun secara tunggal indikator ini tidak cukup untuk menggambarkan tingkat kepuasan pada suatu pekerjaan. Beberapa indikator tambahan masih diperlukan seperti penghasilan, jumlah jam kerja, sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi pekerjaan. Indikator ini didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja yang bekerja. Jika dirinci menurut jenis kelamin, indikator ini dapat menggambarkan perbedaan gender dalam aktivitas pasar tenaga kerja di suatu negara atau wilayah. Indikator ini didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja di suatu negara atau wilayah yang bekerja. Rasio yang tinggi menunjukkan besarnya proporsi penduduk yang bekerja, sedangkan rasio rendah menunjukkan besarnya proporsi penduduk yang tidak bekerja baik karena menganggur atau tidak termasuk dalam angkatan kerja.

### KILM 3. *Status in employment* / Status pekerjaan

Indikator ini berisi informasi tentang distribusi angkatan kerja menurut status pekerjaan yang dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu pekerja dibayar (*wage and salaried workers*), berusaha sendiri (*self-employed*), dan pekerja keluarga (*contributing family workers*) yang masing-masing dinyatakan dalam proporsi terhadap total penduduk bekerja. Kategorisasi status pekerjaan ini dapat membantu memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara atau wilayah. Untuk jangka panjang dapat diketahui perpindahan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa-jasa melalui peningkatan jumlah atau rasio pekerja dibayar dan penurunan jumlah pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga yang kebanyakan bekerja di sektor pertanian.

### KILM 4. *Employment by sector* / Sektor pekerjaan

Indikator ini membedakan pekerjaan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu pertanian, industri, dan jasa-jasa yang masing-masing dinyatakan sebagai persentase terhadap total penduduk bekerja. Informasi sektoral ini berguna untuk

mengetahui perubahan situasi ketenagakerjaan dan tingkat perkembangan ekonomi di suatu negara.

*KILM 5. Part-time employment / Pekerjaan paruh waktu*

Indikator ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan di pasar tenaga kerja dan juga dapat memberikan gambaran fleksibilitas pasar tenaga kerja akibat perubahan organisasi kerja di sektor industri serta pertumbuhan di sektor jasa-jasa. Pekerjaan paruh waktu didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh waktu (*full-time*). Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional tentang jumlah jam kerja per minggu yang dapat dianggap sebagai pekerjaan penuh waktu maka batasan jumlah jam kerja paruh waktu ditentukan menurut aturan masing-masing negara atau sesuai kebutuhan estimasi. Dua ukuran yang dapat dihasilkan dari indikator ini ialah proporsi pekerja paruh waktu terhadap total pekerja yang seringkali diistilahkan sebagai tingkat pekerjaan paruh waktu (*part-time employment rate*) dan persentase pekerja paruh waktu perempuan.

*KILM 6. Hours of work / Jumlah jam kerja*

Jumlah jam kerja memberi dampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan juga terhadap tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja (*labour cost*). Mengukur tingkat dan perkembangan jumlah jam kerja secara berkelompok maupun individual merupakan hal penting untuk memantau kondisi pekerjaan/kehidupan pekerja dan untuk menganalisis perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Dua ukuran yang dapat dihasilkan dari indikator ini ialah jumlah penduduk bekerja menurut kelompok jam kerja per minggu dan rata-rata jumlah jam kerja per tahun untuk setiap penduduk yang bekerja.

*KILM 7. Employment in the informal economy / Pekerjaan sektor informal*

Sektor informal merupakan hal penting dalam perekonomian, sosial, dan kehidupan politik di kebanyakan negara berkembang bahkan di beberapa negara maju baik dalam

hal jumlah maupun pertumbuhannya. Bahkan di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, peningkatan jumlah tenaga kerja cenderung lebih banyak diserap oleh sektor informal. Indikator ini dapat digunakan untuk menggambarkan situasi pasar tenaga kerja yang tidak cukup hanya digambarkan melalui indikator-indikator pengangguran saja. Pada umumnya, informasi tentang indikator sektor informal ini mengacu pada definisi dan ukuran-ukuran nasional.

### (3) Indikator Pengangguran

#### KILM 8. *Unemployment* / Pengangguran

Indikator ini merupakan ukuran pasar tenaga kerja yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Indikator ini merupakan proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Indikator ini tidak boleh diinterpretasikan sebagai ukuran kesengsaraan ekonomi walaupun seringkali berkorelasi. Meskipun ada korelasi antara pengangguran dan rendahnya tingkat perekonomian namun indikator ini tidak dapat diinterpretasikan sebagai kesengsaraan ekonomi. Sesuai kesepakatan internasional, pengangguran didefinisikan sebagai semua penduduk usia kerja yang pada suatu referensi waktu tidak punya pekerjaan (*without work*), sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*currently available for work*), dan sedang mencari pekerjaan (*seeking work*). Namun demikian, definisi dan ruang lingkup pengangguran di setiap negara bisa berbeda-beda karena batasan usia kerja, kriteria sedang mencari pekerjaan, dsb. Di Indonesia indikator ini didefinisikan sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

*TPT merupakan ukuran pengangguran yang paling banyak digunakan di dunia*

#### KILM 9. *Youth unemployment* / Pengangguran penduduk usia muda

Pengangguran usia muda merupakan isu politik yang penting di berbagai negara. Penduduk usia muda atau pemuda yang dimaksud di sini ialah mereka yang berusia antara 15 dan 24 tahun. Sedangkan penduduk dewasa berusia 25 tahun atau lebih. Indikator ini disajikan dalam empat ukuran, yaitu : (1)

tingkat pengangguran usia muda; (2) tingkat pengangguran usia muda sebagai persentase terhadap tingkat pengangguran usia dewasa; (3) kontribusi (*share*) penduduk usia muda dalam pengangguran total; dan (4) pengangguran usia muda sebagai proporsi terhadap total penduduk usia muda. Keempat ukuran ini harus dianalisis secara bersama sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang permasalahan yang dihadapi penduduk usia muda dalam mencari pekerjaan.

**KILM 10. *Long-term unemployment* / Pengangguran jangka panjang**

Efek pengangguran cenderung semakin lama semakin buruk. Masalah finansial akibat ketiadaan pekerjaan dalam jangka pendek biasanya dapat diatasi dengan mengambil tabungan atau mendapatkan bantuan dari anggota keluarga yang lain. Tetapi pengangguran yang telah berlangsung lebih dari satu tahun dapat mengakibatkan permasalahan finansial yang semakin parah. Pada umumnya penduduk menganggur di negara-negara berkembang hanya berlangsung sebentar, karena tidak adanya kompensasi pengangguran menyebabkan mereka harus bekerja. Sehingga, indikator ini bukan merupakan indikator penting di negara-negara berkembang. Berbeda dengan negara-negara maju yang menggunakan indikator pengangguran jangka panjang sebagai salah satu statistik ketenagakerjaannya. Dua ukuran pengangguran jangka panjang yang dihasilkan dari indikator ini ialah : (1) persentase penduduk menganggur selama satu tahun atau lebih terhadap total angkatan kerja dan (2) persentase penduduk menganggur selama satu tahun atau lebih terhadap pengangguran total. Ukuran yang terakhir ini seringkali disebut sebagai insiden pengangguran jangka panjang.

**KILM 11. *Unemployment by educational attainment* / Pengangguran menurut pendidikan**

Indikator ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara pendidikan pekerja dan tingkat pengangguran. Dengan indikator ini dapat diketahui dengan jelas karakteristik kunci tentang angkatan kerja yang menganggur dan dapat

membantu mengidentifikasi kemungkinan pengangguran yang akan terjadi pada kelompok pekerja yang berbeda. Indikator ini memberikan pengaruh penting baik untuk kebijakan ketenagakerjaan maupun kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, jika penduduk berpendidikan rendah memiliki resiko tinggi untuk menjadi pengangguran maka kebijakan pemerintah adalah untuk memperbaiki pendidikan atau menambah lapangan pekerjaan bagi penduduk berpendidikan rendah. Tidak hanya itu, indikator ini juga dapat menyediakan informasi pengangguran pendidikan tinggi yang salah satunya mengindikasikan kurangnya lapangan pekerjaan bagi profesional atau pekerjaan dengan teknologi tinggi.

KILM 12. *Time-related underemployment* / Setengah pengangguran terkait jam kerja

Penduduk setengah menganggur (*underemployment*) menggambarkan kurang optimalnya pemanfaatan angkatan kerja yang produktif. Indikator setengah pengangguran terkait waktu (*time-related underemployment*) merupakan satu-satunya komponen setengah pengangguran (*underemployment*) yang sampai saat ini digunakan di seluruh dunia sebagai proksi ukuran angkatan kerja yang kurang dimanfaatkan (*underutilized labour force*). Indikator ini disajikan dalam dua ukuran yaitu sebagai persentase terhadap total angkatan kerja dan sebagai persentase terhadap total penduduk bekerja yang dapat digunakan untuk memperkaya analisis efisiensi pasar tenaga kerja.

KILM 13. *Inactivity rate* / Persentase penduduk bukan angkatan kerja usia 25-54 tahun terhadap total penduduk usia kerja

Tingkat inaktifitas penduduk didefinisikan sebagai persentase penduduk yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan, atau dengan perkataan lain tidak termasuk dalam angkatan kerja. Meskipun indikator ini dapat dihitung untuk semua kelompok umur namun peningkatan pada kelompok umur 25-54 tahun paling banyak manfaatnya mengingat penduduk pada kelompok tersebut merupakan penduduk usia prima yang diharapkan masuk sebagai angkatan kerja. Jika indikator ini dijumlah dengan TPAK (KILM 1) akan sama dengan

100 persen. Jika ditinjau menurut jenis kelamin, tingkat inaktifitas penduduk perempuan dapat memberi gambaran luas tentang kebiasaan sosial di suatu negara, sikap perempuan terhadap pasar tenaga kerja, dan struktur keluarga secara umum.

#### **(4) Indikator Pendidikan**

KILM 14. *Educational attainment and literacy* / Proporsi angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan dan kemampuan baca tulis

Sampai saat ini, informasi mengenai tingkat pendidikan yang telah dicapai merupakan indikator terbaik mengenai tingkat keahlian di suatu pasar tenaga kerja. Selain itu, indikator ini seringkali menjadi salah satu prasyarat penduduk dalam mencari pekerjaan. Data statistik mengenai tingkat dan trend pendidikan angkatan kerja dapat digunakan untuk : (1) mengindikasikan kemampuan negara dalam mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonominya; (2) memberikan gambaran struktur keterampilan angkatan kerja; (3) menunjukkan pentingnya pendidikan sehingga dapat mendorong investasi di bidang ini; (4) menunjang analisis pengaruh tingkat pendidikan pada hasil-hasil perekonomian dan keberhasilan berbagai kebijakan dalam memperbaiki tingkat pendidikan penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja; (5) mengindikasikan adanya derajat ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan antar kelompok penduduk, khususnya antar penduduk laki-laki dan perempuan dan antar wilayah/negara; dan (6) mengindikasikan tingkat keterampilan yang dimiliki angkatan kerja yang khususnya dapat mengungkap potensi yang belum dimanfaatkan.

#### **(5) Indikator Upah**

KILM 15 : *Manufacturing wage indices* / Indeks upah industri manufaktur

Upah merupakan ukuran yang paling banyak digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang pendapatan pekerja. Informasi tersebut seringkali digunakan untuk menyusun, melaksanakan, dan memantau kebijakan-kebijakan ekonomi.

Upah riil dalam aktifitas ekonomi dapat dipandang sebagai indikator utama daya beli pekerja dan juga dapat menggambarkan tingkat pendapatan mereka. Indikator ini berisi indeks-indeks yang menunjukkan trend rata-rata upah di sektor industri manufaktur. Upah riil suatu kegiatan ekonomi dapat dipandang sebagai indikator makro daya beli pekerja dan sebagai proksi tingkat pendapatan mereka.

KILM 16 : *Occupational wage and earning indices* / Indeks upah dan penghasilan

Indikator ini menggambarkan kecenderungan dan perbedaan antar upah jabatan dalam kelompok sektor tertentu. Perubahan rata-rata upah pada suatu sektor tidak hanya disebabkan oleh perubahan tingkat upah atau penghasilan tetapi bisa juga disebabkan adanya perubahan komposisi jabatan dan proporsi pekerja laki-laki dan perempuan.

KILM 17 : *Hourly compensation costs* / Biaya kompensasi per jam

Biaya kompensasi per jam hanyalah satu faktor daya saing internasional, namun jika digunakan secara tunggal bisa memunculkan interpretasi yang menyesatkan (*misleading*). Oleh karena itu, indikator ini akan menjadi sangat bermanfaat jika dikombinasikan dengan beberapa indikator lain seperti produktivitas pekerja dan biaya pekerja per satuan output (KILM 18) untuk mengetahui trend daya saing.

### **(6) Indikator Produktivitas Pekerja**

KILM 18 : *Labour productivity and unit labour costs* / Tingkat produktivitas pekerja dan biaya pekerja per satuan output

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau sektor dapat dianggap sebagai peningkatan pekerjaan atau peningkatan efektivitas pekerja. Peningkatan efektivitas pekerja ini dapat digambarkan melalui data produktivitas pekerja. Oleh karena itu indikator ini merupakan ukuran kunci yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara/wilayah. Produktivitas pekerja (*labour productivity*) didefinisikan sebagai output per satuan input pekerja, dan biaya pekerja satuan (*unit labour cost*) adalah biaya pekerja per satuan output.

### **(7) Indikator Elastisitas Pekerjaan**

KILM 19 : *Employment elasticities* / Elastisitas pekerjaan

Elastisitas pekerjaan merupakan ukuran numerik tentang bagaimana pertumbuhan pekerjaan berubah bersama dengan pertumbuhan output ekonomi, atau dengan perkataan lain berapa besar pertumbuhan pekerjaan berhubungan dengan satu persen poin pertumbuhan ekonomi. Jika indikator ini digunakan bersama dengan indikator lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan angkatan kerja, kemiskinan, jumlah jam kerja, dan upah akan lebih bermakna untuk menggambarkan kecenderungan pasar tenaga kerja.

### **(8) Indikator Kemiskinan**

KILM 20 : *Poverty, working poverty, and income distribution* / Kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan

Kemiskinan dapat terjadi karena seseorang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mempertahankan standar kebutuhan hidup minimumnya. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan dapat dipandang sebagai akibat dari pasar tenaga kerja. Estimasi pekerja miskin (*working poor*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk bekerja yang tinggal dalam rumah tangga miskin atau berada di bawah garis kemiskinan.

## **2.3. Sumber Data Ketenagakerjaan**

Untuk menghasilkan statistik ketenagakerjaan setiap negara perlu melakukan pengumpulan data melalui sensus atau survei yang khusus dirancang untuk melihat keadaan umum situasi ketenagakerjaan serta melihat apakah ada pergeseran struktur ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Kebanyakan negara-negara di dunia mengumpulkan data ketenagakerjaannya seperti jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, dan status angkatan kerja yang rutin setiap tahunnya melalui survei angkatan kerja yaitu *Labor Force Survey* (LFS) dengan pendekatan rumah tangga. Meskipun pada umumnya kegiatan survei tersebut dilakukan oleh kantor-kantor statistik nasional tetapi di beberapa negara ada yang dilakukan oleh kementerian tenaga

*Pada umumnya, kegiatan survei angkatan kerja di berbagai negara dilakukan oleh kantor-kantor statistik nasional. Namun, di beberapa negara survei tersebut dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja atau institusi-institusi lainnya*

kerja atau institusi-institusi lainnya. Selain melalui survei, informasi ketenagakerjaan juga dapat diperoleh dari hasil sensus penduduk (*Population Census*) yang biasanya dilakukan setiap sepuluh tahun sekali atau survei-survei demografi lainnya.

Selain survei pendekatan rumah tangga, beberapa negara juga mengumpulkan data tenaga kerja melalui survei pendekatan perusahaan. Bahkan negara-negara maju yang memiliki sistem perlindungan sosial (*social security system*) bagi warga negaranya juga menyediakan statistik ketenagakerjaan yang lebih rinci dan bermanfaat. Sehingga, negara-negara dengan sistem ketenagakerjaan yang baik dan bersifat menyeluruh dapat menghasilkan statistik ketenagakerjaan yang lebih berkualitas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengumpulan data ketenagakerjaan di beberapa negara.

### **(1) Indonesia**

Data ketenagakerjaan di Indonesia terutama dihasilkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Secara khusus survei ini dirancang untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai situasi umum ketenagakerjaan di Indonesia antar periode pencacahan. Penduduk yang dicakup dalam survei ini meliputi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dalam rangka penyempurnaan hasil, Sakernas beberapa kali mengalami perubahan seperti penambahan sampel rumah tangga, periode pencacahan, dan metode pengumpulan data.

Sakernas pertama kali dilakukan pada tahun 1976 dengan cakupan wilayah yang sangat terbatas. Namun sejak tahun 1986 dilakukan secara periodik dan mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Selama periode 1986-1993 Sakernas dilakukan setiap tiga bulan dengan jumlah sampel masing-masing sekitar 20.500 rumah tangga. Minimnya jumlah sampel rumah tangga Sakernas ini menyebabkan estimasi hanya bisa dilakukan untuk tingkat nasional saja. Selama periode 1994-2001 Sakernas dilakukan hanya satu kali setahun yaitu pada bulan Agustus. Dengan alasan terbatasnya

*Data ketenagakerjaan  
utama di Indonesia  
diperoleh dari Sakernas  
yang dilakukan oleh BPS  
dua kali setahun*

anggaran jumlah sampel Sakernas selama kurun waktu tersebut terus berkurang. Sehingga, statistik ketenagakerjaan yang dihasilkan hanya di tingkat nasional. Sejak tahun 2005 dua kali setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Jumlah sampel Sakernas tahun 2005 dan 2006 masing-masing sekitar 68.000 rumah tangga. Dengan bertambahnya jumlah sampel ini maka data dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 jumlah sampel Sakernas diperbesar lagi menjadi 286.000 rumah tangga, sehingga dapat disajikan sampai tingkat Kabupaten/Kota. Data statistik ketenagakerjaan Indonesia dari BPS dapat diperoleh melalui internet di <http://www.bps.go.id>.

## **(2) Filipina**

Data ketenagakerjaan Filipina terutama dihasilkan dari survei angkatan kerja atau *Labor Force Survey* (LFS) yang dilakukan oleh kantor statistik nasional Filipina yaitu *National Statistics Office* (NSO). Survei ini merupakan modul dari Survei Rumah Tangga Terintegrasi atau *Integrated Survey of Households* (ISH). Pada awalnya survei ISH merupakan survei rumah tangga yaitu *Philippine Statistical Survey of Households* (PSSH) yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Filipina bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat melalui agen *International Cooperation Agency* (ICA) yang sekarang dikenal dengan USAID. Berbagai data statistik dari kantor ini dapat diakses melalui <http://www.census.gov.ph>.

Tujuan utama dilakukannya survei LFS ialah untuk menyediakan kerangka kerja kuantitatif sebagai persiapan rencana dan rumusan kebijakan bagi pasar tenaga kerja. Survei ini khusus dirancang untuk menghasilkan data statistik mengenai tingkat dan perkembangan pekerja, pengangguran, dan setengah pengangguran tingkat nasional dan wilayah administratif termasuk provinsi dan kota-kota utama.

Saat ini, survei LFS dilakukan empat kali setahun secara triwulanan, yaitu pada bulan-bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Kuesioner yang digunakan dirancang dengan mengadopsi dan memodifikasi konsep dan definisi pengukuran angkatan kerja dan karakteristik tenaga kerja. Kerangka

*Statistik ketenagakerjaan  
Filipina bersumber dari  
LFS yang dilakukan empat  
kali setahun*

sampel yang digunakan saat ini berasal dari hasil listing Sensus Penduduk 1995 (POPCEN) dengan master sampel sebanyak 3.416 barangay/*enumeration area* atau blok sensus (2.045 di perkotaan dan 1.371 di perdesaan). Masing-masing barangay terdiri dari 12 rumah tangga sehingga seluruhnya ada sebanyak 41.000 rumah tangga. Kuesioner LFS mencakup karakteristik demografi dan ekonomi individual dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara tatap muka.

Hasil awal survei ini disampaikan kepada media melalui *press release* 45 hari setelah pencacahan selesai yang meliputi indikator-indikator penting seperti TPAK dan angka pengangguran. Selanjutnya, *special release* dilaporkan 15 hari setelah *press release*. Hasil survei ini juga dilaporkan dalam buletin survei rumah tangga terintegrasi (ISH) 2 sampai 4 bulan setelah *press release*. Statistik ketenagakerjaan Filipina secara rutin dipublikasikan pada Buletin Statistik Bulanan (*Monthly Bulletin of Statistics*), Jurnal Statistik Filipina (*Journal of Philippine Statistics*), dan Statistik Tahunan (*Philippine Yearbook*).

Sebagai pelengkap hasil survei LFS, statistik ketenagakerjaan Filipina juga diperoleh dari beberapa survei perusahaan yang dilakukan oleh NSO yang dilakukan secara independen dengan survei LFS. Namun demikian, secara teoritis data tenaga kerja dari survei perusahaan seharusnya merupakan bagian dari hasil survei LFS. Demikian pula, catatan administratif juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran di Filipina. Jumlah pekerja yang diberhentikan karena perusahaan tutup atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperoleh dari laporan perusahaan di Departemen Buruh dan Tenaga Kerja yaitu *Department of Labor and Employment* (DOLE).

Meskipun survei LFS ini sudah diupayakan untuk disempurnakan namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain rancangan kuesioner tidak mampu menggambarkan kebutuhan tenaga kerja saat ini untuk memotret dinamika pasar tenaga kerja dan beberapa konsep tidak sesuai dengan konsep ILO dan tidak konsisten dengan Sistem Neraca Nasional (SNA).

### **(3) Singapura**

Data ketenagakerjaan Singapura terutama dihasilkan dari survei angkatan kerja (LFS) yang dilakukan setiap tahun. Survei ini pertama kali dilakukan pada tahun 1974 untuk menghasilkan data pasar tenaga kerja yang dapat dipercaya (*reliable*) dan tepat waktu. Survei ini dirancang untuk menghasilkan data aktivitas ekonomi penduduk termasuk informasi rinci mengenai penduduk bekerja, pengangguran, karakteristik angkatan kerja, dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi.

Survei LFS ini pertama kali dilakukan oleh Departemen Statistik Singapura (*Singapore Department of Statistics*) pada tahun 1973. Namun sejak diberlakukannya sistem statistik desentralisasi, sejak tahun 1974 survei ini dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja (*Ministry of Manpower*) secara rutin setiap tiga kali setahun. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data terkait pekerjaan, pengangguran, dan karakteristik ekonomi penduduk lainnya untuk membantu pemerintah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan. Informasi statistik ketenagakerjaan Singapura dari Kementerian Tenaga Kerja dapat diakses melalui <http://www.mom.gov.sg> atau melalui Departemen Statistik Singapura di <http://www.singstat.gov.sg>.

Sampai saat ini, Departemen Penelitian dan Statistik Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja Singapura telah melakukan LFS lengkap tahunan di setiap pertengahan tahun kecuali pada tahun 1990, 1995, 2000, dan 2005. Hal ini dikarenakan statistik ketenagakerjaan pada tahun-tahun tersebut diperoleh dari hasil sensus penduduk dan survei rumah tangga (*General Household Survey*) yang dilakukan oleh Departemen Statistik Singapura.

Dengan teknologi sistem informasi yang dimiliki Singapura, survei ini dapat dilakukan secara *on line* melalui sistem survei rumah tangga berbasis internet yaitu *the Internet Household Survey System* (iHSS). Melalui iHSS yang dapat diakses dengan fasilitas internet tersebut responden rumah tangga dapat mengisi kuesioner dengan cepat, aman, dan

nyaman tanpa perlu diwawancarai melalui telepon atau tatap muka. Informasi yang diberikan melalui sistem inipun terjamin kerahasiaannya. Tetapi sebelum survei dilakukan, terlebih dahulu rumah tangga yang terpilih menjadi responden diinformasikan oleh kantor Kementerian Tenaga Kerja melalui surat tertulis yang dikirim via pos.

*Statistik ketenagakerjaan Singapura bersumber dari LFS yang dilakukan secara on line dengan metode iHSS*

Statistik ketenagakerjaan yang disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja Singapura mengacu pada pedoman internasional yang direkomendasikan oleh ILO. Sedangkan pelaporan indikator kunci seperti partisipasi angkatan kerja dan angka pengangguran dirilis sesuai standar khusus diseminasi data (*Special Data Dissemination Standard*) yang disusun oleh IMF (*International Monetary Fund*).

Selain survei angkatan kerja (LFS), Kementerian Tenaga Kerja Singapura juga melakukan survei pasar tenaga kerja yaitu *Labour Market Survey* (LMS) yang bertujuan untuk mengetahui situasi pasar tenaga kerja di Singapura. Survei ini dilakukan dengan pendekatan perusahaan dengan mengirimkan kuesioner kepada sekitar 13.800 perusahaan swasta. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait tenaga kerja seperti lowongan pekerjaan, perputaran tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

#### **(4) Thailand**

Data ketenagakerjaan Thailand diperoleh dari hasil survei angkatan kerja yang dilakukan oleh kantor statistik nasional Thailand (*National Statistical Office*). Statistik ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh NSO Thailand dapat diakses melalui <http://web.nso.go.th>.

Survei ini dilakukan setiap tahun sejak tahun 1963 dengan tujuan utama untuk memperoleh estimasi jumlah dan karakteristik angkatan kerja di negara tersebut. Selama tahun 1971-1983, dilakukan dua kali setiap tahun yaitu bulan Januari-Maret (bukan musim tanam/panen) dan bulan Juli-September (musim tanam/panen). Selama tahun 1984-1997 survei dilakukan tiga kali dalam setahun, tapi sejak tahun 1998

*Sejak tahun 2001 LFS di Thailand dilakukan setiap bulan*

menjadi empat kali setahun yaitu pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Bahkan, sejak tahun 2001 survei ini dilakukan setiap bulan antara tanggal 1 sampai 12 setiap bulannya.

Survei ini dilakukan dengan pendekatan rumah tangga yang meliputi rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Metode pengumpulan data melalui wawancara tatap muka kepada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lainnya. Data statistik yang dihasilkan dari survei ini meliputi :

- (1) jumlah penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, dan status dalam angkatan kerja/bukan
- (2) jumlah penduduk bekerja menurut beberapa karakteristik seperti jabatan, lapangan usaha, status pekerjaan, jumlah jam kerja, dan pendapatan
- (3) jumlah pengangguran menurut lamanya mencari pekerjaan, jenis pekerjaan terakhir, dan cara mencari pekerjaan.

Untuk mengurangi *time lag*, laporan hasil survei selalu diupayakan untuk dipercepat. Saat ini, 50 persen data hasil LFS dapat dilaporkan 2 bulan setelah survei, sementara laporan lengkap 100 persen data tersedia 3 bulan setelah survei.

### **(5) Australia**

Data ketenagakerjaan Australia dihasilkan dari survei angkatan kerja LFS yang dilakukan setiap bulan oleh Biro Statistik Australia yaitu *Australian Bureau of Statistics (ABS)*. Survei ini pertama kali dilakukan pada bulan Februari 1964 dan beberapa kali mengalami perubahan dalam rangka penyempurnaan metodologi survei dan hasil. Kerangka konsep yang digunakan dalam survei ini mengikuti standar dan pedoman yang merupakan kesepakatan pada konferensi ahli-ahli statistik ketenagakerjaan (*Resolution of International Conferences of Labour Statisticians*) yang mengacu pada rekomendasi ILO. Informasi statistik dari ABS dapat diperoleh di <http://www.abs.gov.au>.

Survei dilakukan berdasarkan *multi-stage area sample* tempat tinggal pribadi yang saat ini ada sekitar 22.800 rumah dan daftar sampel tempat tinggal non-pribadi (seperti hotel, motel, dsb), sehingga total sampel setiap bulannya sebanyak 33.000 rumah (*dwelling*). Secara keseluruhan sampel pada survei LFS di Australia mencakup sekitar 0,24 persen dari total penduduk Australia.

Sejak Oktober 2003 metode pengumpulan data dilakukan secara komputerisasi menggunakan sistem *Computer-Assisted Interviewing (CAI)*, yaitu semua data diinput langsung ke dalam kuesioner elektronik melalui media komputer notebook dengan total pencacah sekitar 600 orang. Rumah tangga sampel diwawancarai setiap bulan selama periode delapan bulan. Wawancara pertama dilakukan secara tatap muka, kemudian selanjutnya dilakukan melalui telepon. Kegiatan wawancara biasanya berlangsung selama dua minggu mulai hari Minggu antara tanggal 5 sampai 11 setiap bulannya. Selama delapan bulan tersebut seperdelapan bagian responden rumah tangga diganti setiap bulannya. Total non respon sampai saat ini ada sekitar 3,5 persen untuk setiap survei. Survei LFS di Australia disusun sedemikian rupa sehingga setiap orang yang dicatat hanya berasal dari satu tempat tinggal. Hasil survei didiseminasikan dalam periode dua minggu setelah pencacahan.

*Survei LFS di Australia dilakukan setiap bulan secara komputerisasi dengan metode CAI*

### **(6) Amerika Serikat**

Data ketenagakerjaan yang dilaporkan oleh pemerintah pusat Amerika Serikat bersumber dari beberapa survei dan program, yaitu :

- (1) *Current Population Survey (CPS)*
- (2) *American Community Survey (ACS)*,
- (3) *Local Area Unemployment Statistics (LAUS) Program*
- (4) *Current Employment Statistics (CES) Program*
- (5) *Survey of Income and Program Participation (SIPP)*

Adanya variasi definisi, cakupan, metodologi, periode referensi, dan prosedur estimasi maka estimasi statistik ketenagakerjaan yang dihasilkan dari beberapa sumber data

ini bisa berbeda-beda. Di antara lima sumber data ketenagakerjaan ini, CPS merupakan sumber data yang sangat berkualitas untuk menghasilkan statistik resmi bulanan tentang ketenagakerjaan, seperti jumlah penduduk bekerja dan menganggur, tingkat pengangguran, dan jumlah jam kerja. Survei ini dilakukan oleh Biro Sensus Amerika (*Bureau of Census*) untuk Biro Statistik Tenaga Kerja (*Bureau of Labor Statistics*). Statistik ketenagakerjaan dari kedua instansi pemerintah ini dapat diakses melalui internet masing-masing dengan alamat situs <http://www.census.gov> untuk Biro Sensus Amerika dan <http://www.bls.gov> untuk Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika.

*Statistik ketenagakerjaan Amerika Serikat bersumber dari CPS yang dilakukan setiap bulan sejak tahun 1940*

Survei CPS dilakukan setiap bulan sejak tahun 1940 dan terus mengalami penyempurnaan. Saat ini jumlah sampel yang dicakup sekitar 60.000 rumah tangga setiap bulannya. Seperempat responden diganti setiap bulan sehingga tidak ada yang diwawancarai lebih dari 4 bulan berturut-turut. Setelah suatu rumah tangga menjadi sampel 4 bulan berturut-turut ia akan terpilih menjadi sampel lagi setelah 8 bulan berikutnya untuk periode pendataan selama selama 4 bulan berikutnya secara berturut-turut. Setelah dua kali periode pendataan masing-masing selama 4 bulan berturut-turut, responden rumah tangga tersebut tidak akan dipilih lagi menjadi sampel. Dengan cara ini sekitar 75 persen sampel akan sama setiap bulannya dan sekitar 50 persen sampel akan sama setiap tahunnya.

Mengingat survei ini merupakan sumber data utama dalam penghitungan jumlah pengangguran, maka pertanyaan status ketenagakerjaan responden, seperti bekerja atau menganggur, tidak ditanyakan langsung kepada responden. Hal ini untuk menghindari responden menentukan sendiri status ketenagakerjaannya sehingga kesamaan konsep dan definisi akan terjamin. Bahkan, pencacahpun tidak diperbolehkan menentukan status ketenagakerjaan responden, mereka hanya menanyakan dan mencatat sesuai aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, responden akan diklasifikasikan sebagai penduduk bekerja atau tidak oleh komputer sesuai data dan definisi yang telah diprogram di komputer tersebut.

Konsep klasifikasi ketenagakerjaan penduduk yang dianut oleh Amerika Serikat cukup sederhana, yaitu (1) Penduduk yang mempunyai pekerjaan termasuk dalam kelompok penduduk bekerja; (2) Penduduk tanpa pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan siap untuk memulai pekerjaan termasuk dalam kelompok pengangguran; dan (3) Penduduk yang tidak pernah bekerja dan tidak pernah menganggur termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja.

### 2.4. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan

Perbandingan statistik ketenagakerjaan antar negara-negara di dunia dapat dilakukan dengan memperhatikan perbedaan konsep dan definisi ketenagakerjaan yang berlaku di masing-masing negara, seperti batasan umur, referensi waktu, dan status pekerjaan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa konsep dan definisi pekerjaan di beberapa negara. Pada umumnya, konsep dan definisi yang digunakan dalam survei angkatan kerja (LFS) di dunia sudah mengikuti rekomendasi ILO, seperti usia kerja, referensi waktu, penduduk bekerja, dan pengangguran. Namun demikian, seringkali ada perbedaan yang tidak dapat dihindari karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing negara.

*Meskipun responden Sakernas adalah penduduk usia 10 tahun ke atas, tetapi statistik ketenagakerjaan yang dihasilkan mengacu pada penduduk usia 15 tahun ke atas*

#### (1) Indonesia

Sesuai konvensi ILO yang juga disepakati oleh Indonesia, penduduk usia kerja di Indonesia adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Namun demikian, untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan pekerja anak maka individual responden yang dicakup pada Sakernas ialah mereka yang berumur 10 tahun ke atas. Kelompok penduduk usia kerja ini dikategorikan lagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, statistik-statistik ketenagakerjaan dihitung dari angkatan kerja.

Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Kegiatan bekerja sendiri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh

pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Batasan waktu seminggu yang lalu ini merupakan referensi waktu pencacahan dalam Sakernas.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Konsep pengangguran seperti ini dikenal sebagai pengangguran terbuka. Selain angka pengangguran, informasi pengangguran yang dapat dihasilkan dari Sakernas adalah pengangguran berdasarkan jumlah jam kerja. Penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dikenal sebagai pengangguran terbuka, sedangkan penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu dikenal sebagai pengangguran kritis.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan yang terdiri dari 7 kategori, yaitu (1) berusaha sendiri; (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar; (3) berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; (4) buruh/karyawan/pegawai; (5) pekerja bebas di pertanian; (6) pekerja bebas di non pertanian; dan (7) pekerja tak dibayar.

## **(2) Filipina**

Pada awal dilakukannya survei angkatan kerja (LFS) di Filipina menggunakan referensi waktu seminggu sebelumnya (*past week*) atau 7 hari sebelum tanggal pencacahan. Tetapi sejak tahun 1971 terjadi perubahan besar referensi waktu menjadi triwulan sebelumnya (*past quarter*). Namun demikian, sejak tahun 1987 kembali lagi menjadi seminggu sebelum pencacahan. Batas umur minimal penduduk diperbolehkan bekerja di Filipina ialah 15 tahun. Oleh karena itu survei LFS hanya mencakup penduduk yang berumur 15 tahun keatas baik yang bekerja maupun tidak.

Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang selama seminggu sebelum pencacahan baik menerima bayaran dalam bentuk uang atau barang maupun pekerja keluarga tidak dibayar, termasuk juga untuk mendapatkan keuntungan. Penduduk dianggap bekerja apabila selama referensi waktu pencacahan melakukan pekerjaan selama paling sedikit satu jam, atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena sakit, cuti, atau alasan lain. Termasuk sebagai penduduk bekerja ialah mereka yang akan segera bekerja atau memulai kegiatan usaha pertanian atau bisnis selama dua minggu sejak tanggal pencacahan dianggap bekerja.

Penduduk setengah menganggur ialah semua penduduk bekerja yang menginginkan jam kerja lebih banyak dari pekerjaan sekarang, atau menginginkan pekerjaan tambahan, atau menginginkan pekerjaan baru dengan jam kerja yang lebih panjang. Di Filipina, penduduk setengah pengangguran kentara (*visibly underemployed persons*) ialah mereka yang bekerja kurang dari 40 jam selama seminggu yang lalu dan menginginkan jam kerja tambahan.

*Batas jumlah jam kerja untuk menghitung jumlah penduduk setengah pengangguran kentara di Filipina adalah kurang dari 40 jam seminggu*

Penduduk menganggur ialah penduduk usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi secara aktif mencari pekerjaan. Termasuk sebagai penduduk menganggur ialah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena yakin tidak ada pekerjaan yang tersedia karena sakit, cuaca buruk, atau menunggu wawancara pekerjaan.

Penduduk bukan angkatan kerja ialah mereka yang berumur 15 tahun atau lebih baik bukan dianggap penduduk bekerja maupun bukan pengangguran sesuai konsep dan definisi di atas, karena mengurus rumah tangga atau sekolah, seperti ibu rumah tangga, pelajar, orang cacat, dan pensiunan.

Kategori pekerja yang dapat diartikan sebagai status pekerjaan terdiri dari 7 kelompok, yaitu (1) Pekerja rumah tangga, seperti pembantu rumah tangga, tukang masak, tukang kebun, supir keluarga, dsb, (2) Pekerja perusahaan swasta, (3) Pekerja untuk pemerintah atau perusahaan

pemerintah, (4) Berusaha sendiri, (5) Berusaha dibantu pekerja dibayar, (6) Pekerja keluarga dibayar, dan (7) Pekerja keluarga tidak dibayar.

Sedangkan indikator yang dapat dihasilkan dari survei LFS ini antara lain (1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*Labor Force Participation Rate*), yaitu :  $\{(\text{jumlah penduduk bekerja} + \text{jumlah penduduk menganggur}) / \text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}\} \times 100$ ; (2) Tingkat Kesempatan Kerja (*Employment Rate*), yaitu :  $(\text{Jumlah penduduk bekerja} / \text{Jumlah angkatan kerja}) \times 100$ ; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka (*Unemployment Rate*), yaitu :  $(\text{Jumlah penduduk menganggur} / \text{Jumlah angkatan kerja}) \times 100$ ; dan (4) Tingkat Setengah Pengangguran (*Underemployment Rate*), yaitu :  $(\text{Jumlah penduduk setengah menganggur} / \text{Jumlah penduduk bekerja}) \times 100$ .

### **(3) Singapura**

Usia minimum penduduk diperbolehkan bekerja di Singapura ialah 15 tahun. Meskipun tidak ada batas umur maksimal tetapi data ketenagakerjaan Singapura seringkali disajikan dalam tiga kelompok umur yaitu 15+, 15-64, dan 25-64. Umur 64 tahun ini biasanya digunakan sebagai batas maksimum umur penduduk diperbolehkan bekerja yang berlaku di negara-negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*).

Referensi waktu bekerja ialah seminggu yang lalu atau tujuh hari sebelum tanggal pencacahan. Bagi mereka yang sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti maka referensi waktunya adalah seminggu terakhir sebelum cuti.

Serupa dengan negara-negara di Asia lainnya, di Singapura penduduk bekerja didefinisikan sebagai seseorang penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan selama periode seminggu yang lalu untuk memperoleh upah atau keuntungan. Termasuk di sini adalah mereka yang punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pekerja keluarga tidak dibayar.

*Meskipun tidak ada atas umur maksimal penduduk bekerja di Singapura, tetapi data ketenagakerjaannya biasa disajikan dalam tiga kelompok umur, 15+, 15-64, dan 25-64 tahun*

Sedangkan penduduk menganggur didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang selama periode referensi pencacahan tidak mempunyai pekerjaan tetapi secara aktif sedang mencari pekerjaan atau merencanakan untuk berusaha sendiri. Pengangguran di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pengangguran yang sebelumnya bekerja dan pengangguran yang sebelumnya tidak pernah bekerja.

Penduduk usia kerja dikelompokkan lagi menjadi penduduk yang aktif secara ekonomi (*economically active population*) yang meliputi penduduk bekerja maupun menganggur, dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi (*economically inactive population*) yaitu penduduk usia kerja yang tidak sedang bekerja dan tidak mencari pekerjaan selama periode referensi pencacahan. Penduduk inaktif ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, masing-masing (1) Mengurus rumah tangga, yaitu orang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan bayaran, termasuk ibu rumah tangga; (2) Pelajar; dan (3) Lainnya yang terdiri dari pensiunan, orang cacat, dan penduduk yang memperoleh pemasukan uang dari kekayaan sendiri. Termasuk di sini ialah tahanan, pasien rumah sakit jiwa, penghuni rumah jompo, dan mereka yang sedang menanti panggilan layanan nasional (*national service*).

Status pekerjaan dibedakan menjadi 4 kelompok, masing-masing (1) Pengusaha (*employers*) yaitu mereka yang berusaha sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain dan mempekerjakan paling sedikit satu tenaga kerja dibayar; (2) Berusaha sendiri baik yang dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain tanpa tenaga kerja dibayar, (3) Pekerja yaitu mereka yang bekerja untuk individual, perusahaan, organisasi, atau pemerintah dan menerima upah; dan (4) Pekerja keluarga tidak dibayar.

Jenis pekerjaan di Singapura dibedakan menggunakan klasifikasi baku pekerjaan Singapura tahun 2000 (*The Singapore Standard Occupational Classification 2000*) yang mengacu pada standar internasional yaitu *the International Standard Classification of Occupations 1988* (ISCO-88).

#### **(4) Thailand**

*Konsep dan definisi dalam LFS di Thailand beberapa kali mengalami perubahan*

Konsep dan definisi yang digunakan dalam survei angkatan kerja LFS Thailand beberapa kali mengalami perubahan, namun demikian tetap mengacu pada kerangka dasar bahwa total populasi ialah total penduduk bekerja dan pengangguran ditambah penduduk yang tidak termasuk angkatan kerja.

Selama tahun 1963-1976, konsep penduduk usia kerja yang digunakan ialah penduduk usia 11 tahun atau lebih yang diklasifikasikan menjadi bekerja, pengangguran, dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, selama periode 1977-1982 menggunakan konsep pemanfaatan (*Utilization Concept*) dimana total penduduk usia 11 tahun ke atas diklasifikasikan menjadi pemanfaatan penuh (*fully-utilized*), pemanfaatan kurang (*under-utilized*), dan bukan angkatan kerja. Sejak tahun 1983 sampai 2000 konsep *Labour Utilization* dibatalkan dan batas umur bekerja menjadi 13 tahun ke atas yang diklasifikasikan menjadi bekerja, menganggur, angkatan kerja inaktif musiman, dan bukan angkatan kerja. Namun, sejak tahun 2001, terjadi perubahan batas minimum usia kerja yaitu menjadi 15 tahun. Sehingga, batasan penduduk usia kerja di Thailand saat ini ialah seseorang yang berumur 15 tahun atau lebih.

Dengan mengadopsi referensi waktu bekerja adalah seminggu yang lalu atau tujuh hari sebelum tanggal pencacahan, penduduk bekerja di Thailand didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas yang selama referensi waktu seminggu sebelum pencacahan termasuk dalam salah satu kategori berikut :

- (1) melakukan pekerjaan paling sedikit satu jam untuk memperoleh gaji, profit, dividen, atau pembayaran lainnya dalam bentuk uang maupun barang; atau
- (2) sementara tidak sedang bekerja tetapi mempunyai pekerjaan tetap, usaha, atau pertanian, karena sakit, berlibur, mogok kerja, cuaca buruk, perusahaan tutup sementara, baik dibayar maupun tidak selama tidak bekerja tersebut; atau

- (3) bekerja paling sedikit satu jam tanpa menerima bayaran di perusahaan atau pertanian yang dimiliki sendiri/anggota rumah tangga lainnya

Sedangkan, pengangguran ialah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang selama referensi waktu pencacahan tidak bekerja selama satu jam, tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai usaha atau pertanian sendiri. Termasuk dalam kategori ini ialah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan selama 30 hari sebelum pencacahan dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sakit atau merasa tidak ada pekerjaan yang cocok, sedang menunggu pekerjaan baru, sedang menunggu musim pertanian, atau alasan lain.

### (5) Australia

Penduduk usia kerja di Australia ialah seseorang yang berumur 15 tahun atau lebih yang kemudian dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Oleh karena itu, cakupan survei LFS adalah seluruh penduduk usia 15 tahun atau lebih kecuali anggota militer, anggota diplomatik negara lain, warga negara Australia yang tinggal di luar negeri, dan anggota militer non-Australia (beserta tanggungannya) yang tinggal di Australia.

Di Australia, angkatan kerja dikonsepsikan sebagai penawaran (*supply*) tenaga kerja yang juga merupakan ukuran populasi penduduk aktif secara ekonomis (*economically active population*). Ukuran ini serupa dengan yang digunakan oleh sistem neraca PBB (*United Nations System of National Accounts*).

Serupa dengan negara-negara di Asia pada umumnya, referensi waktu bekerja di Australia juga mengacu pada seminggu yang lalu atau tujuh hari sebelum tanggal pencacahan. Begitu juga bagi mereka yang akan segera memulai pekerja. Tetapi referensi waktu yang digunakan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan adalah empat minggu yang lalu. Sedangkan, penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti maka referensi waktunya adalah seminggu terakhir sebelum cuti.

Di Australia, penduduk bekerja didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun atau lebih yang selama seminggu yang lalu melakukan kegiatan paling sedikit satu jam untuk mendapatkan bayaran, komisi, atau keuntungan (terdiri dari pengusaha, pekerja, dan berusaha sendiri); atau melakukan kegiatan paling sedikit satu jam tanpa memperoleh bayaran di usaha/pertanian keluarga dalam hal ini adalah pekerja keluarga tidak dibayar; atau memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja; atau punya pekerjaan atau usaha tetapi tidak ikut bekerja. Status pekerjaan bagi penduduk bekerja tersebut dibedakan menjadi empat kategori, yaitu pekerja, pengusaha (majikan), pekerja berusaha sendiri (*own-account workers*), dan pekerja keluarga.

Pengangguran adalah seseorang yang berumur 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja selama seminggu yang lalu tetapi secara aktif mencari pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu selama empat minggu sebelum tanggal pencacahan; dan bersedia bekerja selama seminggu yang lalu atau menunggu untuk memulai pekerjaan selama seminggu yang lalu.

Penduduk setengah menganggur ialah penduduk bekerja yang menginginkan dan bersedia untuk menambah jam kerja dari jumlah jam kerjanya yang sekarang. Penduduk setengah menganggur terdiri dari pekerja penuh-waktu yang bekerja dengan jumlah jam kerja paruh-waktu selama seminggu yang lalu dan pekerja paruh-waktu (biasanya jumlah kerja kurang dari 35 jam seminggu selama seminggu yang lalu) dan bersedia untuk menambah jam kerja pada referensi waktu survei. Indikator penduduk setengah menganggur yang lebih lengkap tersedia dari hasil Survei Pekerja Setengah Menganggur (*Survey of Underemployed Workers*).

Jumlah jam kerja meliputi jam kerja dibayar maupun tidak dibayar untuk semua pekerjaan yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Status pekerjaan penuh-waktu atau paruh-waktu dibedakan menurut jumlah jam kerja. Pekerja penuh-waktu didefinisikan sebagai penduduk bekerja dengan total jam kerja untuk semua pekerjaan adalah 35 jam atau lebih per minggu, termasuk juga mereka yang biasanya bekerja

*Batasan pekerja penuh-waktu di Australia adalah apabila bekerja 35 jam atau lebih per minggunya*

kurang dari 35 jam per minggu tetapi selama seminggu yang lalu tercatat bekerja selama 35 jam atau lebih.

Sementara itu, bukan angkatan kerja adalah seseorang yang berumur 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja. Termasuk di sini ialah orang-orang yang mengurus rumah tangga (tanpa bayaran), pensiunan, sukarelawan yang sedang tidak aktif, tahanan, dan pasien rumah sakit.

### (6) Amerika Serikat

Berbeda dengan negara-negara Asia pada umumnya, penduduk usia kerja di Amerika Serikat adalah penduduk yang telah berumur paling sedikit 16 tahun. Akan tetapi, referensi waktu bekerja yang digunakan adalah sama yaitu seminggu sebelum tanggal pencacahan.

*Batas umur penduduk diperbolehkan bekerja di Amerika Serikat adalah 16 tahun atau lebih*

Penduduk bekerja didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan untuk mendapatkan bayaran atau keuntungan selama referensi waktu yaitu seminggu yang lalu, baik untuk bekerja secara penuh-waktu (*full-time*) maupun paruh-waktu (*part-time*). Termasuk penduduk bekerja ialah mereka yang sementara tidak bekerja, antara lain karena cuti, sakit, atau cuaca buruk. Pekerja keluarga tidak dibayar juga termasuk penduduk bekerja apabila selama referensi waktu pencacahan melakukan pekerjaan selama paling sedikit 15 jam.

Sedangkan, pengangguran didefinisikan sebagai seorang penduduk usia 16 tahun atau lebih yang tidak memiliki pekerjaan tetapi selama 4 minggu sebelum tanggal pencacahan aktif mencari pekerjaan, atau pada saat pencacahan berlangsung siap untuk bekerja. Termasuk penduduk menganggur apabila pada saat pencacahan sedang tidak bekerja dan sedang menunggu untuk dipanggil kembali bekerja.

Sementara itu, karena sulitnya membangun kriteria objektif yang dapat digunakan pada survei rumah tangga periode bulanan, maka tidak ada statistik resmi pemerintah Amerika Serikat yang mengeluarkan data mengenai jumlah penduduk yang tergolong dalam setengah pengangguran (*underemployment*).

## **2.5. Analisis Statistik Ketenagakerjaan Dunia**

Untuk mengetahui perbandingan antar negara dan perbandingan kondisi ketenagakerjaan Indonesia dengan beberapa negara lain dapat digunakan beberapa indikator kunci KILM yang direkomendasikan oleh ILO, seperti partisipasi angkatan kerja, angka pengangguran, dan tingkat produktivitas pekerja.

### **2.5.1. Partisipasi Angkatan Kerja**

Tabel 2.1 menyajikan perbandingan TPAK (KILM 1) dan TPT (KILM 8) di enam negara, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Australia, dan Amerika Serikat. Dibandingkan tiga negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki TPAK di urutan kedua setelah Thailand diikuti oleh Singapura dan Filipina. Tetapi, TPAK Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Australia dan Amerika Serikat. TPAK Indonesia pada tahun 2007 sebesar 67,0 persen, sedangkan Australia dan Amerika Serikat masing-masing sebesar 64,5 persen dan 66,0 persen. Karena secara absolut jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) sangat besar maka jumlah penduduk bukan angkatan kerjanya juga besar, meskipun TPAK Indonesia cukup tinggi.

*Indonesia memiliki TPAK yang cukup tinggi, tetapi dengan TPT yang cukup tinggi pula mengindikasikan kurangnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya*

Dari hasil Sakernas diketahui hanya sekitar seperempat dari penduduk bukan angkatan kerja ini yang melakukan kegiatan utama sehari-hari dengan bersekolah, sementara sekitar 60 persennya mengurus rumah tangga yang mayoritas dilakukan oleh perempuan. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya daya saing perempuan di pasar tenaga kerja atau faktor sosial budaya yang lebih mengutamakan perempuan untuk melakukan kegiatan mengurus rumah tangga dari pada bekerja. Selain itu, rendahnya proporsi penduduk usia kerja yang bersekolah didukung rendahnya APS usia 16-18 tahun baik laki-laki maupun perempuan (hasil Susenas) menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak bersekolah lagi tetapi mereka juga tidak terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja baik untuk bekerja maupun mencari pekerjaan.

**Tabel 2.1. TPAK (KILM 1) dan TPT (KILM 8) Beberapa Negara di Dunia, 2005-2007**

Negara	Umur	Total Penduduk (000)			Total Angkatan Kerja (000)			TPAK (%)			TPT (%)		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)
Indonesia	15+	158.491,4	160.811,5	164.118,3	105.857,7	106.388,9	109.941,4	66,8	66,2	67,0	11,2	10,3	9,1
Filipina	15+	54.792,0	55.634,0	56.839,0	35.492,0	35.508,0	35.916,0	64,8	63,8	63,2	7,4	7,4	7,3
Singapura	15+	-	2.892,9	2.944,7	-	1.880,7	1.918,2	-	65,0	65,1	-	4,5	4,0
Thailand	15+	50.004,4	50.540,8	51.118,8	36.842,6	36.867,2	37.611,7	73,7	72,9	73,6	1,4	1,2	1,2
Australia	15+	16.376,5	16.651,3	16.943,6	10.474,5	10.664,7	10.927,6	64,0	64,0	64,5	5,0	4,8	4,2
AS	16+	226.083,0	228.815,0	231.866,0	149.321,0	151.428,0	153.125,0	66,0	66,2	66,0	5,1	4,6	4,6

Sumber : Indonesia (BPS), lainnya (ILO)

### 2.5.2. Pengangguran

Jika ditinjau lebih jauh, ternyata tingginya TPAK di Indonesia tidak diikuti dengan tingginya proporsi penduduk bekerja terhadap total angkatan kerja, melainkan disebabkan oleh tingginya angka pengangguran (TPT). Sebagai contoh, selama kurun waktu 2005-2007, TPT Indonesia tercatat paling tinggi dibandingkan Filipina, Singapura, Thailand, Australia, dan Amerika Serikat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa meskipun persentase penduduk usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja di Indonesia tinggi namun penyerapannya masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia selama periode 2000-2005 cenderung meningkat dari 6,1 persen menjadi 11,2 persen. Kemudian turun lagi menjadi 9,1 persen pada tahun 2007 (Tabel 2.2). Tingginya TPT ini terutama berasal dari kelompok penduduk perempuan, bahkan pada tahun 2005 mencapai 14,7 persen, tetapi pada tahun 2007 turun lagi menjadi 10,8 persen. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Filipina yang memiliki angka TPT yang cukup tinggi, TPT perempuan selama periode 2005-2007 lebih rendah dari pada TPT laki-laki. Bahkan, Thailand dan Amerika Serikat selalu memiliki TPT perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Sebagai negara yang memiliki PDB per kapita cukup rendah, Thailand patut menjadi contoh karena merupakan salah satu negara dengan tingkat pengangguran terendah di dunia. Selama periode 2000-2007 TPT Thailand

*Thailand merupakan salah satu negara dengan tingkat pengangguran paling rendah di dunia*

telah berkurang setengahnya yaitu dari 2,4 persen menjadi 1,2 persen, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan Singapura, Australia, dan Amerika Serikat yang memiliki PDB per kapita tiga sampai lima kali lebih besar dari pada Thailand.

**Tabel 2.2. TPT Beberapa Negara (%), 2000-2007**

Negara	PDB per kapita <sup>1</sup> PPP (US\$)	Umur	Jenis Kelamin	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Indonesia	3 600	15+	Total	6,1	8,1	9,1	9,7	9,9	11,2	10,3	9,1
			Laki-laki	5,7	6,6	7,5	7,9	8,1	9,3	8,5	8,1
			Perempuan	6,7	10,6	11,8	12,7	12,9	14,7	13,4	10,8
Filipina	3 200	15+	Total	10,1	9,8	10,2	10,2	10,9	7,4	7,4	7,3
			Laki-laki	10,3	9,4	10,1	10,1	10,4	7,4	7,7	7,5
			Perempuan	9,9	10,3	10,2	10,3	11,7	7,3	6,9	7,0
Singapura	23 700	15+	Total	...	3,8	5,6	5,9	5,8	...	4,5	4,0
			Laki-laki	...	3,7	5,6	5,7	5,6	...	4,1	3,7
			Perempuan	...	3,9	5,8	6,2	6,2	...	4,9	4,3
Thailand	8 000	15+	Total	2,4	2,6	1,8	1,5	1,5	1,4	1,2	1,2
			Laki-laki	2,4	2,7	2,0	1,6	1,6	1,5	1,3	1,3
			Perempuan	2,3	2,5	1,6	1,4	1,4	1,2	1,1	1,1
Australia	37 300	15+	Total	6,4	6,8	6,4	5,9	5,5	5,0	4,8	4,4
			Laki-laki	6,5	7,1	6,6	5,9	5,3	4,9	4,7	4,1
			Perempuan	6,2	6,5	6,2	6,0	5,6	5,2	5,0	4,8
A.S.	45 800	16+	Total	4,0	4,8	5,8	6,0	5,5	5,1	4,6	4,6
			Laki-laki	3,9	4,8	5,9	6,3	5,6	5,1	4,6	4,7
			Perempuan	4,1	4,7	5,6	5,7	5,4	5,1	4,6	4,5

Catatan : <sup>1</sup>Tahun 2007

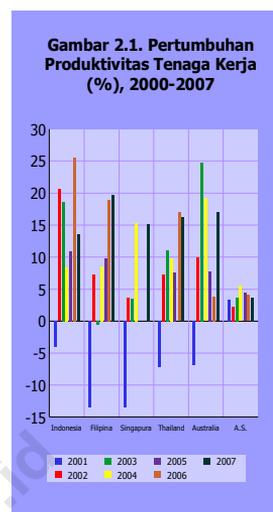
Sumber : Indonesia (Sakernas), lainnya (ILO)

### 2.5.3. Produktivitas Tenaga Kerja

Meskipun angka pengangguran di Thailand rendah namun produktivitas tenaga kerja yang didefinisikan sebagai PDB yang dihasilkan oleh setiap penduduk bekerja hanya berkisar antara 3,72 US\$ sampai 6,61 US\$ selama periode 2000-2007. Rendahnya angka pengangguran ini ditengarai lebih disebabkan oleh banyaknya penyerapan tenaga kerja di sektor industri padat karya dengan upah rendah. Justru Singapura yang memiliki angka pengangguran lebih tinggi dari Thailand memiliki produktivitas tinggi yaitu sebesar 62,54 US\$ sampai 87,59 US\$ untuk setiap tenaga kerja selama periode yang sama. Pada tahun 2007 bahkan nilainya lebih tinggi dari Australia, yaitu 87,59 US\$ per pekerja sedangkan Australia

sebesar 87,03 US\$ per pekerja. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3.

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Indonesia selama periode 2001-2007 cenderung berfluktuatif antara -4,0 persen sampai 13,5 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 25,5 persen. Hal ini juga terjadi di Filipina dan Thailand dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 18,9 persen dan 17,0 persen. Sedangkan, Amerika Serikat yang tercatat memiliki produktivitas tenaga kerja terbesar memiliki pertumbuhan yang cenderung konstan berkisar antara 2,3 persen sampai 5,5 persen selama periode 2001-2007.



**Tabel 2.3. Produktivitas Tenaga Kerja (US\$ per pekerja), 2000-2007**

Negara	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Indonesia	1,84	1,77 (-4,0)	2,13 (20,6)	2,53 (18,6)	2,74 (8,4)	3,04 (10,9)	3,82 (25,5)	4,33 (13,5)
Filipina	2,73	2,37 (-13,4)	2,54 (7,3)	2,52 (-0,6)	2,74 (8,5)	3,01 (9,8)	3,57 (18,9)	4,28 (19,7)
Singapura	62,54	54,10 (-13,5)	56,09 (3,7)	58,02 (3,5)	66,88 (15,3)	...	76,01 ...	87,59 (15,2)
Thailand	3,72	3,45 (-7,2)	3,70 (7,3)	4,11 (11,1)	4,52 (9,8)	4,86 (7,6)	5,69 (17,0)	6,61 (16,2)
Australia	43,57	40,63 (-6,8)	44,70 (10,0)	55,79 (24,8)	66,52 (19,2)	71,71 (7,8)	74,42 (3,8)	87,03 (17,0)
A.S.	72,61	74,98 (3,3)	76,71 (2,3)	79,58 (3,7)	83,92 (5,5)	87,64 (4,4)	91,25 (4,1)	94,54 (3,6)

Catatan : Angka dalam tanda kurung menyatakan pertumbuhan terhadap tahun sebelumnya  
Sumber Data : ILO dan IMF

### 2.5.4. Tenaga Kerja menurut Sektor Agregat

Jumlah tenaga kerja menurut sektor agregat merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan perpindahan situasi ketenagakerjaan antar sektor dan perkembangan ekonomi suatu negara. Ukuran ini juga disusun oleh ILO dalam indikator pasar tenaga kerjanya yang ke empat (KILM 4). Pada indikator ini, jumlah tenaga kerja dikelompokkan ke dalam tiga sektor agregat, yaitu Pertanian atau *Agriculture (A)*, Industri

atau *Manufacturing* (M), dan Jasa-jasa atau *Services* (S). Melalui tiga sektor agaregat ini dapat diindikasi tingkat perekonomian suatu negara.

Tabel 2.4. Proporsi Tenaga Kerja menurut Sektor Agregat (%), 2000-2007

Negara	Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Indonesia	A	45,3	43,8	44,3	46,4	43,3	44,0	42,1	41,3
	M	17,4	18,7	18,8	17,7	18,0	18,8	18,6	18,8
	S	37,3	37,5	36,9	35,9	38,7	37,2	39,3	39,9
Filipina	A	37,5	37,4	37,4	37,2	37,1	37,0	36,6	36,1
	M	16,0	15,6	15,4	15,7	15,4	14,9	14,9	15,1
	S	46,5	47,0	47,2	47,1	47,5	48,1	48,5	48,8
Thailand	A	48,8	46,0	46,1	44,9	42,4	42,6	42,2	41,8
	M	19,0	18,8	19,8	19,8	20,5	20,3	20,7	20,7
	S	32,2	35,2	34,0	35,3	37,1	37,1	37,1	37,5
Australia	A	5,0	4,8	4,4	3,9	3,8	3,6	3,5	3,4
	M	21,7	20,9	21,0	21,0	21,3	21,2	21,3	21,2
	S	73,3	74,3	74,5	75,0	75,0	75,2	75,2	75,4
A.S.	A	2,6	2,4	2,5	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
	M	23,2	22,6	21,8	20,9	20,8	20,6	20,8	20,6
	S	74,3	75,0	75,6	77,5	77,6	77,8	77,7	78,0

Sumber : ILO

Tabel 2.4 menyajikan proporsi tenaga kerja menurut sektor agregat selama periode 2000-2007 yang diperoleh dari database ILO di <http://laborsta.ilo.org>. Data Singapura tidak ikut disajikan mengingat hanya tersedia data di sektor agregat jasa-jasa. Di antara lima negara, Indonesia dan Thailand memiliki proporsi jumlah tenaga kerja di sektor agregat pertanian terbesar dibandingkan dua sektor agregat lainnya. Sedangkan, Filipina meskipun memiliki proporsi tenaga kerja sektor agregat pertanian cukup besar tetapi masih lebih kecil dibandingkan sektor agregat jasa-jasa. Sementara itu, Australia dan Amerika yang merupakan negara maju memiliki proporsi tenaga kerja sektor pertanian yang sangat kecil, yaitu masing-masing berkisar antara 3,4-5,0 persen dan 1,4-2,6 persen selama periode 2000-2007. Proporsi tenaga kerja sektor pertanian selama periode tersebut cenderung turun kecuali di Indonesia yang sempat berfluktuatif selama periode 2001-2005. Proporsi tenaga kerja sektor agregat pertanian yang cenderung turun ini mengindikasikan terjadinya peningkatan pemakaian teknologi mesin di bidang pertanian yang menggantikan tenaga kerja manusia. Cukup tingginya proporsi tenaga kerja sektor pertanian di beberapa negara

ASEAN ini namun dengan kecenderungan menurun menunjukkan negara-negara tersebut masih tergolong sebagai negara berkembang. Sementara, tenaga kerja di Australia dan Amerika yang mayoritas diserap di sektor agregat jasa-jasa menunjukkan bahwa kedua negara tersebut tergolong sebagai negara maju.

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, proporsi tenaga kerja di sektor agregat pertanian dan industri cenderung didominasi oleh laki-laki, sedangkan sektor agregat jasa-jasa berimbang. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5

**Tabel 2.5. Proporsi Tenaga Kerja menurut Sektor Agregat dan Jenis Kelamin (%), 2000-2007**

Negara	Jenis Kelamin	Sektor Agregat	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Indonesia	Laki-laki	A	73,8	72,5	74,3	74,5	75,5	75,3	75,4	76,6
		M	75,2	75,9	77,0	77,4	78,0	78,5	79,0	78,9
		S	46,0	45,9	45,9	46,3	46,5	46,6	46,5	46,5
	Perempuan	A	26,2	27,5	25,7	25,5	24,5	24,7	24,6	23,4
		M	24,8	24,1	23,0	22,6	22,0	21,5	21,0	21,1
		S	54,0	54,1	54,1	53,7	53,5	53,4	53,5	53,5
Filipina	Laki-laki	A	75,2	74,0	73,8	74,3	75,1	74,1	74,5	74,7
		M	68,7	69,8	70,6	71,1	71,4	69,8	71,0	71,6
		S	49,3	47,6	47,6	48,9	49,8	49,1	49,2	48,9
	Perempuan	A	24,8	26,0	26,2	25,7	24,9	25,9	25,5	25,3
		M	31,3	30,2	29,4	28,9	28,6	30,2	29,0	28,4
		S	50,7	52,4	52,4	51,1	50,2	50,9	50,8	51,1
Thailand	Laki-laki	A	56,2	57,5	57,2	57,4	57,3	55,7	55,6	55,8
		M	59,1	56,1	57,1	57,3	58,1	57,2	57,7	57,1
		S	50,9	51,6	51,1	50,8	51,1	49,3	49,9	49,8
	Perempuan	A	43,8	42,5	42,8	42,6	42,7	44,3	44,4	44,2
		M	40,9	43,9	42,9	42,7	41,9	42,8	42,3	42,9
		S	49,1	48,4	48,9	49,2	48,9	50,7	50,1	50,2
Australia	Laki-laki	A	69,2	67,8	69,2	70,0	68,0	69,4	68,9	69,1
		M	78,8	79,1	79,3	79,2	80,1	80,0	80,6	81,1
		S	48,2	48,1	48,0	47,8	47,8	47,4	47,0	47,0
	Perempuan	A	30,8	32,2	30,8	30,0	32,0	30,6	31,1	30,9
		M	21,2	20,9	20,7	20,8	19,9	20,0	19,4	18,9
		S	51,8	51,9	52,0	52,2	52,2	52,6	53,0	53,0
A.S.	Laki-laki	A	73,8	72,5	74,3	74,5	75,5	75,3	75,4	76,6
		M	75,2	75,9	77,0	77,4	78,0	78,5	79,0	78,9
		S	46,0	45,9	45,9	46,3	46,5	46,6	46,5	46,5
	Perempuan	A	26,2	27,5	25,7	25,5	24,5	24,7	24,6	23,4
		M	24,8	24,1	23,0	22,6	22,0	21,5	21,0	21,1
		S	54,0	54,1	54,1	53,7	53,5	53,4	53,5	53,5

Sumber : ILO

# SUMBER DATA STATISTIK KETENAGAKERJAAN

- Data Statistik Ketenagakerjaan BPS* ●
- Data Statistik Ketenagakerjaan Depnakertrans* ●

3



*Tersedianya data yang berkesinambungan diperlukan untuk melakukan koreksi pada program yang sedang berjalan*

Dalam melaksanakan tugasnya, BPS bertanggung jawab atas tersedianya data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral. Data-data tersebut digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan. Tersedianya data yang berkesinambungan akan sangat membantu untuk melakukan koreksi pada program yang sedang dilaksanakan apabila diperlukan. Oleh karena itu, data ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari data sosial dan kependudukan juga secara rutin disediakan oleh BPS melalui sensus atau survei. Selain BPS, instansi lain seperti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) juga menyediakan informasi ketenagakerjaan Indonesia.

Data ketenagakerjaan yang dihasilkan BPS dapat berasal dari survei rumah tangga maupun survei perusahaan. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) merupakan sumber data utama dan lengkap yang dirancang khusus untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Survei ini dilakukan dengan pendekatan rumah tangga. Survei rumah tangga lainnya yang juga memuat informasi ketenagakerjaan ialah Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sedangkan, catatan administrasi yang dibuat oleh Depnakertrans berisi informasi mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja atau lebih dikenal dengan sebutan "kartu kuning".

### **3.1. Data Statistik Ketenagakerjaan BPS**

Konsep dan definisi yang digunakan dalam survei BPS mengacu pada konsep ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh *The International Labour Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu Penduduk Usia Kerja dan Penduduk Bukan Usia Kerja. Kelompok penduduk usia kerja dibedakan lagi menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penduduk pengangguran. Konsep bekerja yang digunakan BPS ialah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan yang berlangsung selama paling sedikit 1 (satu) jam dan tidak terputus selama seminggu yang lalu. Termasuk pula kegiatan ekonomi pekerja keluarga/tak dibayar yang membantu di suatu usaha atau kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan definisi penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya.

*Mengacu pada konsep ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh ILO, BPS mendefinisikan bekerja sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam dan tidak terputus selama seminggu yang lalu*

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan BPS tidak hanya bersumber dari sensus/survei dengan pendekatan rumah tangga saja, tetapi ada juga yang dihasilkan dari sensus atau survei dengan pendekatan perusahaan/usaha khususnya yang mengumpulkan data terkait ekonomi, seperti Sensus Ekonomi (SE), Sensus Pertanian (ST), Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), dan Survei Upah. Meskipun menggunakan konsep dan definisi ketenagakerjaan yang terkadang berbeda dengan sensus/survei rumah tangga, informasi ketenagakerjaan yang dihasilkan cukup bermanfaat untuk menggambarkan permintaan (*demand*) tenaga kerja di pasar tenaga kerja (*labor market*).

Untuk keperluan-keperluan tertentu BPS juga beberapa kali melakukan survei atau studi khusus terkait ketenagakerjaan di Indonesia baik yang merupakan kegiatan intern BPS maupun kerja sama dengan instansi lain. Salah satunya adalah Studi Kriteria Usaha Marjinal (SKUM) yang merupakan kerja sama BPS dengan Departemen Tenaga Kerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Studi ini bertujuan untuk menghasilkan kriteria usaha marjinal sebagai salah satu determinan Upah Minimum Regional (UMR).

### **3.1.1. Sensus/Survei Rumah Tangga**

Data statistik ketenagakerjaan yang dihasilkan BPS utamanya bersumber dari Sakernas yang merupakan survei rumah tangga. Informasi ketenagakerjaan juga dapat diperoleh dari beberapa survei maupun sensus rumah tangga lainnya, seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan studi khusus. Data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari survei rumah tangga tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, masing-masing (1) karakteristik demografi individu rumah tangga dan (2) karakteristik ekonomi individu rumah tangga.

#### **(1) Sakernas**

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah survei rumah tangga yang digunakan untuk mengumpulkan informasi lengkap mengenai ketenagakerjaan dan khusus dirancang untuk mengetahui keadaan umum/situasi ketenagakerjaan. Selain itu, untuk melihat apakah ada pergeseran struktur ketenagakerjaan antar periode pencacahan. Survei ini menggunakan konsep dan definisi yang mengacu pada konsep yang berlaku secara internasional yaitu *ILO Concept Approach*, sehingga dapat dibandingkan dengan negara lain. Secara bertahap, Sakernas beberapa kali mengalami perubahan untuk meningkatkan kualitas hasil.

Survei ini pertama kali dilakukan pada tahun 1976 dengan cakupan wilayah yang sangat terbatas. Namun sejak tahun 1986 dilakukan secara periodik dan mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Sejarah Sakernas yang berisi perubahan jumlah sampel rumah tangga, cakupan wilayah, dan tingkat penyajian dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Selama kurun waktu 1986-1993, kegiatan Sakernas dilakukan secara triwulanan dengan jumlah sampel setiap triwulannya sekitar 20.500 rumah tangga. Minimnya jumlah sampel rumah tangga Sakernas ini menyebabkan estimasi hanya bisa dilakukan di tingkat nasional saja. Angka rata-rata tahunan diperoleh dengan menggabungkan estimasi triwulanan dengan jumlah sampel menjadi 82.000 rumah

*Sakernas adalah survei rumah tangga yang dirancang khusus untuk mengetahui situasi ketenagakerjaan dan pergeseran struktur ketenagakerjaan antar periode pencacahan*

tangga. Mulai tahun 1994 sampai tahun 2001 Sakernas dilakukan secara tahunan dan dilaksanakan setiap bulan Agustus. Selama periode tersebut jumlah sampel Sakernas selalu diturunkan setiap tahunnya dengan alasan keterbatasan dana. Akibatnya, data ketenagakerjaan hanya dapat diestimasi sampai tingkat nasional.

**Tabel 3.1. Sejarah Sakernas, 1986 - 2008**

Tahun	Jadwal Pelaksanaan	Jumlah sampel (rumah tangga)	Cakupan Wilayah	Tingkat Penyajian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1986-1989	Triwulanan : Feb, Mei, Ags, Nov	65 440	Seluruh Indonesia	Provinsi
1990-1993	Triwulanan : Feb, Mei, Ags, Nov	82 080	Seluruh Indonesia	Provinsi
1994, 1996, 1997	Tahunan : Agustus	65 664	Seluruh Indonesia	Provinsi
1998	Tahunan : Agustus	57 456	Seluruh Indonesia	Provinsi
1999	Tahunan : Agustus	49 248	Seluruh Indonesia (tanpa Timor Timur)	Provinsi
2000	Tahunan : Agustus	32 384	Seluruh Indonesia (tanpa Maluku)	Pulau
2001	Tahunan : Agustus	34 176	Seluruh Indonesia	Pulau
2002	a. Tahunan : Agustus	68 608	a. Seluruh Indonesia	Provinsi
	b. Triwulanan : Feb, Mei, Ags, Nov		b. Seluruh Indonesia, kecuali NAD, Maluku Utara, Maluku, dan Papua	Provinsi
2003-2004	a. Tahunan : Agustus	67 072	a. Seluruh Indonesia	Provinsi
	b. Triwulanan : Feb, Mei, Ags, Nov		b. Seluruh Indonesia, kecuali NAD, Maluku Utara, Maluku, dan Papua	Provinsi
2005	Semesteran : a. Feb	69 408	Seluruh Indonesia	Provinsi
	b. Nov	69 408		Provinsi
2006	Semesteran : a. Feb	68 800	Seluruh Indonesia	Provinsi
	b. Ags	68 800		Provinsi
2007	Semesteran : a. Feb	68 800	Seluruh Indonesia	Provinsi
	b. Ags	285 904		Kabupaten/Kota
2008	Semesteran : a. Feb	68 800	Seluruh Indonesia	Provinsi
	b. Ags	285 904		Kabupaten/Kota

Pada tahun 2005 dan 2006 Sakernas dilakukan secara semesteran dengan jumlah sampel lebih dari 68.000 rumah tangga tiap semester. Data yang disajikan dari Sakernas semesteran ini dapat diestimasi sampai tingkat provinsi. Pada

tahun 2007 dan 2008 Sakernas juga dilakukan secara semesteran. Sakernas semester pertama dilakukan pada bulan Februari dengan jumlah sampel sebanyak 68.800 rumah tangga dan estimasi dilakukan sampai tingkat provinsi. Sakernas semester kedua dilaksanakan pada bulan Agustus dengan jumlah sampel yang lebih besar yaitu sebanyak 286.000 rumah tangga dan disajikan sampai tingkat kabupaten/kota.

Meskipun data ketenagakerjaan yang dikumpulkan melalui Sakernas adalah keterangan perorangan dari setiap anggota rumah tangga sampel yang berumur 10 tahun ke atas, akan tetapi indikator-indikator ketenagakerjaan yang bersifat umum dihitung dari penduduk umur 15 tahun ke atas. Sedangkan indikator pekerja anak dihitung dari penduduk usia 10-14 tahun.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang yang melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Konsep ini mengalami perluasan dan penyempurnaan. Pada Sakernas 2001 status pekerjaan hanya terdiri dari lima kategori, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, dan pekerja tak dibayar. Sejak tahun 2002 ditambah dua kategori baru, yaitu pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian.

Untuk menyesuaikan dengan konsep ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas yaitu selain mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan termasuk juga penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dari data Sakernas dapat dihasilkan berbagai indikator ketenagakerjaan utama yang mengacu pada *the Key Indicators of the Labour Market (KILM)* yang direkomendasikan oleh ILO. Menurut KILM edisi 5 yang merupakan edisi terakhir saat ini ada 20 indikator KILM yang dapat digunakan untuk

*Beberapa indikator ketenagakerjaan KILM yang direkomendasikan oleh ILO dapat dihasilkan dari Sakernas, seperti TPAK dan TPT*

menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu negara. Namun karena keterbatasan jumlah variabel yang dicakup dalam Sakernas, maka tidak semua indikator KILM dapat dihitung.

### **(2) SP dan SUPAS**

Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk (SP) yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun-tahun berakhiran "0". Sejak Indonesia merdeka, Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak lima kali sejak yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000. Untuk menjembatani ketersediaan data kependudukan di antara dua periode sensus, BPS melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Survei ini telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu tahun 1976, 1985, 1995, dan 2005. Informasi kependudukan yang dikumpulkan melalui SP dan SUPAS sangat lengkap, seperti data migrasi, keluarga berencana (KB), dan pendidikan. Selain data pokok demografi, SP dan SUPAS juga mengumpulkan data tentang aktivitas ekonomi penduduk, antara lain mengenai angkatan kerja dan kesempatan kerja.

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan dari SP dan SUPAS berisi informasi ketenagakerjaan dari penduduk yang bekerja dan berdomisili di wilayah geografis Indonesia. Karena menggunakan pendekatan rumah tangga maka data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari SP dan SUPAS dapat menggambarkan ketersediaan atau penawaran (*supply*) tenaga kerja di Indonesia. Daftar pertanyaan mengenai ketenagakerjaan pada SP dan SUPAS tidak serinci Sakernas dan Susenas, tetapi sudah mencakup semua pertanyaan penting yang diperlukan untuk analisis struktur angkatan kerja dan kesempatan kerja.

### **(3) Susenas**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah survei rumah tangga yang mengumpulkan data sosial dan ekonomi Indonesia secara lengkap. Dua jenis data Susenas dikumpulkan setiap tahunnya melalui kuesioner Kor dan Modul. Kuesioner Kor berisi keterangan rumah tangga dan anggota rumah

tangga yang dikumpulkan setiap tahun, antara lain kondisi dan fasilitas perumahan dan lingkungan tempat tinggal, pengeluaran konsumsi rumah tangga, pendidikan, kesehatan/gizi, perilaku ber KB, kegiatan sosial budaya, dan kegiatan ekonomi anggota rumah tangga.

Kuesioner Modul berisi keterangan rumah tangga dan anggota rumah tangga yang difokuskan pada suatu topik yang berbeda-beda dan dikumpulkan setiap tiga tahun sekali secara bergantian, yaitu modul konsumsi, modul pendidikan dan sosial budaya, serta modul kesehatan dan perumahan. Keterangan yang dikumpulkan dalam Modul merupakan pertanyaan yang lebih rinci dan mendalam dibandingkan pertanyaan untuk topik yang sama dalam Kor. Untuk meningkatkan ketepatan estimasi dan cakupan wilayah estimasi, ukuran sampel Susenas selalu diupayakan untuk diperbesar. Hal ini dilakukan karena semakin luasnya pemakaian data Susenas baik dari sisi penerapan maupun pengguna datanya.

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan dari Susenas merupakan kegiatan terbanyak yang dilakukan oleh ART berumur 10 tahun keatas dengan referensi waktu seminggu sebelum pencacahan berlangsung, seperti aktivitas bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, dicatat juga informasi ketenagakerjaan lain, seperti penduduk yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha. Dalam Susenas dicatat juga informasi mengenai lapangan usaha/bidang pekerjaan utama dan status/kedudukan dalam pekerjaan utama, dan jam kerja.

Sampel rumah tangga dalam kegiatan Susenas beberapa kali mengalami perubahan. Setelah tahun 1963 yaitu antara tahun 1964/65, 1967, 1969 dan 1970 sampel rumah tangga Susenas berkisar antara 16.000 sampai 24.000 rumah tangga. Pada tahun 1976 Susenas dilakukan secara triwulanan dan data ketenagakerjaannya dikumpulkan pada triwulan ke empat, dengan jumlah sampel sebanyak 78.000 rumah tangga. Sedangkan, pada triwulan sebelumnya hanya menggunakan 17.000 rumah tangga. Susenas tahun 1979-1980 dilakukan semesteran dengan sampel berkisar antara 54.000 sampai

102.000 rumah tangga. Mulai tahun 1992 Susenas diorganisir ke dalam dua daftar pertanyaan yaitu Kor dan Modul. Jumlah sampel Kor sebanyak 65.600 rumah tangga sehingga estimasi dapat dilakukan sampai tingkat provinsi. Mulai tahun 1993 jumlah sampel rumah tangga untuk Kor diperbesar menjadi 202.000 rumah tangga sehingga data yang dihasilkan dapat diestimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Sedangkan sampel untuk Modul tetap sebanyak 65.600 rumah tangga.

### 3.1.2. Sensus/Survei Perusahaan

Informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui survei perusahaan dapat menggambarkan permintaan (*demand*) tenaga kerja di Indonesia, antara lain melalui Sensus Ekonomi (SE), Sensus Pertanian (ST), Survei Usaha Terintegrasi (SUSI), dan Survei Upah.

#### (1) Sensus Ekonomi

Sensus Ekonomi (SE) yang diadakan setiap 10 tahun sekali pada tahun-tahun berakhiran "6" utamanya digunakan untuk mengumpulkan data mengenai perusahaan/usaha dari seluruh kegiatan ekonomi di semua sektor kecuali pertanian yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk juga informasi pekerja pada perusahaan/usaha tersebut. Sensus ini dilakukan dengan pendekatan perusahaan/usaha. Sampai saat ini BPS telah melakukan Sensus Ekonomi sebanyak empat kali yang dimulai pada tahun 1976. Sensus Ekonomi terakhir yang dilakukan BPS pada tahun 2006 (SE06) terdiri dari :

- (1) Kegiatan pendaftaran perusahaan/usaha (*listing*) untuk seluruh perusahaan/usaha skala mikro, kecil, menengah, dan besar.
- (2) Kegiatan SE lanjutan secara lengkap (sensus) untuk perusahaan/usaha skala menengah dan besar (UMB), sedangkan untuk perusahaan/usaha skala mikro dan kecil (UMK) dilakukan secara sampel.

Dalam Sensus Ekonomi tahun 2006 (SE06), tenaga kerja dibedakan menjadi dua yaitu pekerja/karyawan dibayar dan pekerja/karyawan tidak dibayar. Data ketenagakerjaan

*SE yang merupakan sensus perusahaan/usaha juga menghasilkan data ketenagakerjaan yang dapat menunjukkan permintaan (demand) tenaga kerja di Indonesia*

yang dapat disajikan dari hasil listing SE06 mencakup struktur tenaga kerja perusahaan/usaha menurut jenis kelamin, kategori lapangan usaha, skala usaha, tahun beroperasi perusahaan/usaha, dan status badan hukum.

## **(2) Sensus Pertanian**

Sumber utama data pertanian adalah Sensus Pertanian (ST) yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun-tahun berakhiran "3". Sampai saat ini, Sensus Pertanian telah dilaksanakan sebanyak lima kali sejak tahun 1963. Dari Sensus Pertanian dapat juga diketahui informasi ketenagakerjaan khusus yang bekerja di sektor pertanian. Sensus ini dilakukan mengingat masih cukup tingginya peran dan kontribusi pertanian dalam struktur ekonomi Indonesia. Sehingga, pertanian masih merupakan sumber dan tempat mata pencaharian bagi mayoritas penduduk Indonesia. Tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan besarnya peranan sektor ini dalam perekonomian Indonesia karena masih banyak rumah tangga yang menggantungkan hidupnya di sektor ini. Sementara itu, distribusi penguasaan lahan pertanian cenderung semakin timpang dan ketimpangan tertinggi ada di desa-desa berbasis lahan sawah.

Kegiatan Sensus Pertanian dilakukan dua tahap, yaitu : (1) pencacahan lengkap yang mencakup perusahaan pertanian dan Koperasi Unit Desa (KUD) serta Survei Potensi Desa; (2) pencacahan sampel petani pemilik tanah dan berbagai sub sektor rumah tangga pertanian. Tahap pertama mencakup sub sektor tanaman bahan makanan dan hortikultura. Data pekerja dalam kegiatan ini dibedakan menurut jenis kelamin, pendidikan, pekerja administrasi/lapangan/pabrik dan apakah sebagai manajer/asisten/pekerja biasa, serta pekerja tetap/sementara (harian atau bulanan). Survei perusahaan dalam ST mencakup lima sub sektor, yaitu Tanaman Industri (termasuk agathis, akasia, dan kayu jati), Binatang Buas serta Pariwisata Alam dan Budaya, Hak Pengolahan Hutan (HPH) dan Ijin Penebangan Hutan (IPH), Ternak Besar dan Kecil, dan Perikanan. Sedangkan tahap

kedua sampelnya mencakup 20 persen dari daerah pencacahan dan 20 persen dari rumah tangga di daerah terpilih.

### **(3) Survei Usaha Terintegrasi (SUSI)**

Survei dengan pendekatan perusahaan/usaha lainnya yang dilakukan oleh BPS ialah Survei Usaha Kecil dan Rumah Tangga Terintegrasi (SUSI). Kerangka sampelnya berasal dari perusahaan/usaha hasil Sensus Ekonomi (SE) yang tidak berbadan hukum. Cakupan sektornya sama dengan SE dan juga tidak termasuk pertanian. SUSI pertama kali dilaksanakan pada tahun 1998 sebagai tindak lanjut dari SE 1996. Data yang sebelumnya dikumpulkan sendiri-sendiri, seperti dalam Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) dan Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga (SKKR) diintegrasikan dalam SUSI.

SUSI mengumpulkan informasi rinci tentang aktivitas perusahaan termasuk struktur ongkos, kapital, dan sektor. Data ketenagakerjaan dalam SUSI dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan dibayar/tidak dibayar dan kelompok pendapatan/penghasilan. Informasi ketenagakerjaan yang diperoleh dari SUSI hampir sama dengan informasi ketenagakerjaan dari Sensus Ekonomi sehingga hasilnya dapat menggambarkan permintaan (*demand*) tenaga kerja untuk perusahaan/usaha yang tidak berbadan hukum.

### **(4) Survei Upah**

Satu-satunya survei BPS yang dirancang khusus untuk mengetahui perkembangan upah yang diberikan perusahaan/usaha kepada pekerjanya yang berstatus buruh ialah Survei Upah. Survei ini pertama kali dilakukan pada tahun 1979/1980 setiap triwulan. Pada awalnya survei ini hanya mencakup beberapa lapangan usaha, yaitu pertambangan non migas, industri pengolahan, perhotelan, dan angkutan darat.

Seiring berjalannya waktu serta untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan data statistik upah secara cepat dan tepat maka dilakukan penyederhanaan metodologi dan kuesioner. Oleh karena itu, sejak tahun 1992 BPS

melaksanakan Survei Upah dengan metode dan kuesioner yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penyederhanaan antara lain dilakukan dengan tidak dicakupnya lagi lapangan usaha angkutan darat, jumlah perusahaan sampel diperkecil, dan variabel dalam kuesioner disederhanakan. Selain itu, sejak tahun 1998/1999 cakupan lapangan usaha diperluas yaitu dengan menambah lapangan usaha Perdagangan yang meliputi sub sektor Restoran, Perdagangan Besar (ekspor, impor dan lainnya), Eceran (swalayan dan *Departemen Store*) dan lapangan usaha Konstruksi. Saat ini, Survei Upah dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia tetapi hanya meliputi perusahaan di lapangan usaha industri pengolahan, perhotelan, pertambangan, perdagangan besar dan eceran, serta peternakan dan perikanan.

Data yang dikumpulkan dari setiap perusahaan terpilih adalah keterangan umum perusahaan yang mencakup jumlah hari kerja dan jam kerja seminggu, upah terendah dan tertinggi, keterangan karyawan perusahaan yang mencakup jumlah seluruh karyawan menurut jenis kelamin dan jumlah karyawan produksi/pelaksana lebih rendah dari pengawas/mandor/supervisor menurut status karyawan dan sistem pembayaran. Selain itu juga dikumpulkan data mengenai upah karyawan produksi lebih rendah dari pengawas/mandor dalam satu periode pembayaran yang mencakup jumlah upah/gaji, tunjangan, upah lembur dan rata-rata upah per karyawan.

Dari hasil survei upah triwulanan ini dapat diperoleh informasi/data statistik upah yang berkesinambungan, cermat, dan cepat sehingga dapat digunakan untuk menyempurnakan kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan, pengendalian, dan analisis upah pekerja/karyawan. Melalui survei ini dapat dimonitor hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pengaruh penetapan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap pembayaran upah/gaji oleh perusahaan kepada pekerja/karyawan.
- (2) Perkembangan rata-rata upah/gaji, sektoral dan regional sehubungan dengan perubahan biaya hidup dan kebutuhan perusahaan atas tenaga kerja.

*Data upah yang dihasilkan dari survei upah triwulanan digunakan untuk penyempurnaan kebijakan pemerintah khususnya dalam hal pengaturan, pengendalian, dan analisis upah pekerja/karyawan*

### **3.1.3. Survei/Studi Khusus**

Pada tahun 2006, BPS melalui Direktorat Analisis Statistik melakukan survei khusus yaitu Studi Kriteria Usaha Marjinal (SKUM) untuk keperluan penyempurnaan penentuan Upah Minimum regional (UMR). Studi ini dilakukan untuk mengetahui kriteria/karakteristik usaha marjinal yang menjadi salah satu komponen dalam penetapan UMR selain Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat produktivitas pekerja, kondisi pasar kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, studi ini bertujuan untuk menentukan kriteria/karakteristik tentang usaha marjinal dan mengetahui rata-rata upah yang diterima pekerja di sektor usaha marjinal.

Studi khusus ini dilakukan dengan pendekatan perusahaan/usaha yang meliputi perusahaan/usaha berskala kecil, mikro dan menengah. Studi dilakukan di 8 provinsi yang mencakup 14 Kabupaten/Kota dan terdiri dari sekitar 1.150 perusahaan/usaha. Instrumen yang digunakan dibedakan untuk pengusaha/pemilik/pengelola perusahaan/usaha dan untuk pekerja perusahaan/usaha yang berkaitan dengan upah minimum. Lapangan usaha yang dicakup pada studi ini lebih diutamakan pada industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran; serta jasa perusahaan dan jasa lainnya. Karena ketiga sektor tersebut diduga mengarah pada kriteria usaha marjinal.

Data yang dikumpulkan untuk pemilik/pengelola, antara lain mengenai kegiatan utama (kategori/lapangan usaha), nilai asset (diluar tanah dan bangunan), nilai produksi/omset, jumlah tenaga kerja, dan upah pekerja. Sedangkan data yang dikumpulkan untuk tenaga kerja produksi dengan upah minimum, antara lain jenis pekerjaan, masa kerja, jumlah tanggungan, dan upah yang diterima. Dari kedua jenis kuesioner ini dapat diketahui rata-rata upah minimum yang diterima oleh tenaga kerja produksi yang menerima upah terendah dan apakah sudah mencukupi kebutuhan hidup serta sesuai dengan kriteria upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

### **3.2. Data Statistik Ketenagakerjaan Depnakertrans**

Sumber data ketenagakerjaan Indonesia lainnya disediakan pula dari catatan administrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Cakupan data administrasi yang ada meliputi lowongan kerja, pencari kerja, peserta program kerja publik (*public works*), program pelatihan, dan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dari catatan administrasi tersebut, bisa diketahui jumlah pencari kerja sampai tingkat kecamatan. Informasinya diperoleh jumlah kartu identitas pencari kerja yang disebarakan oleh dinas ketenagakerjaan beserta jajarannya di bawahnya sampai tingkat kecamatan. Namun demikian, berdasarkan informasi di beberapa daerah, data pencari kerja tersebut kurang lengkap karena yang tercatat di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota hanya pada satu tahun terakhir saja dan tahun berjalan. Selain itu, keberadaan Dinas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota tidak seragam, ada yang bergabung menjadi Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan, ada juga yang bergabung menjadi Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Hal ini cukup menyulitkan pengguna data mencari data ketenagakerjaan yang diperlukan.

*Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan Depnakertrans melalui kartu pencari kerja atau "kartu kuning" dapat digunakan untuk memonitor keberadaan calon pencari kerja termasuk yang sudah tersalurkan*

Tujuan pengisian atau pembuatan kartu pencari kerja atau biasa dikenal dengan sebutan "kartu kuning" adalah untuk memonitor keberadaan calon pencari kerja termasuk yang sudah tersalurkan. Dari pendaftar kartu pencari kerja atau kartu kuning di setiap daerah/wilayah dapat diketahui jumlah tenaga kerja siap pakai yang tersedia. Pembuat kartu kuning umumnya adalah lulusan SLTA yang sering mencari lowongan kerja lewat Depnakertrans, tetapi ada juga yang lulusan sarjana. Selain memiliki pendidikan tinggi, umumnya mereka juga memiliki keahlian (keterampilan) khusus. Salah satu keuntungan memiliki kartu kuning ialah para pencari kerja dapat mengikuti kursus keterampilan yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) dan bila telah selesai dapat disalurkan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja tersebut melalui BLK.

Kartu kuning atau kartu pencari kerja dapat dibuat di Dinas Ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota yang menjadi wilayah tempat tinggal para pencari kerja dengan lama pembuatan hanya memakan waktu satu sampai dua hari bahkan syarat-syaratnya mudah dan biayanya sangat terjangkau. Masa berlaku kartu kuning ini hanya 6 bulan tetapi dapat diperpanjang apabila pemiliknya belum mendapatkan pekerjaan.

Dari catatan administrasi sebetulnya dapat diperoleh data-data ketenagakerjaan yang lengkap termasuk tingkat pendidikan, jenis kelamin, usia, dan jenis keahlian yang dikuasai. Sayangnya, tidak semua dokumen pencari kerja diolah oleh Depnakertrans untuk menjadi suatu *database* ketenagakerjaan khususnya dari sisi penawaran (*supply*), sehingga kurang memberikan manfaat untuk analisis pasar tenaga kerja yang lebih luas.

Data lain yang juga dikeluarkan oleh Depnakertrans adalah informasi mengenai kesempatan kerja yang diciptakan dalam program padat karya dan program pemerintah lainnya, penyelenggaraan program latihan kerja/kursus keterampilan yang diselenggarakan oleh BLK dan Depnakertrans, jumlah lowongan kerja, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, dan jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tetapi, karena tidak semua dokumen diproses/diolah sehingga data tersebut tidak tersimpan dengan rapi dan lengkap. Padahal ketersediaan data tersebut sangat bermanfaat untuk menggambarkan sisi permintaan (*demand*) tenaga kerja. Sebagai contoh, tidak semua lowongan pekerjaan dilaporkan oleh perusahaan ke Depnakertrans sehingga data tersebut tidak tercatat secara lengkap. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan swasta yang mengumumkan sendiri adanya lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut terutama jika tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sedikit. Selain itu, perusahaan umumnya enggan berhubungan dengan Depnakertrans karena birokrasi yang cukup berbelit. Namun demikian, perusahaan yang mencari tenaga kerja dalam jumlah besar umumnya mendaftar.

<https://www.bps.go.id>

# STATISTIK KETENAGAKERJAAN INDONESIA

*Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja •  
Karakteristik Penduduk Bekerja •*

4

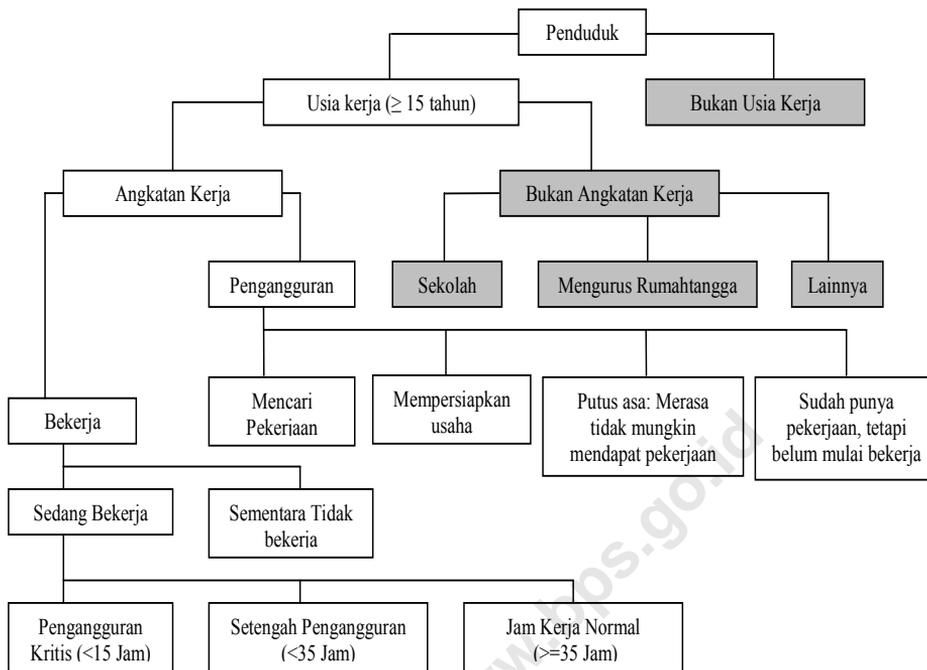


Pada bab ini akan dibahas mengenai kondisi ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS, sesuai konsep ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization (ILO)*. Adapun rincian bahasan mencakup kondisi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja selama periode 2003-2007 serta gambaran penduduk yang bekerja menurut berbagai kategori yang digambarkan melalui beberapa indikator KILM.

#### **4.1. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja**

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan BPS dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1. Penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja (berumur 15 tahun ke atas) dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan sisanya adalah Bukan Angkatan Kerja.

Dalam konsep yang digunakan BPS, bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu (mengacu pada tanggal pencacahan), termasuk pekerja keluarga/tak dibayar yang ikut membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha seperti sewa, bunga, dan keuntungan, baik berupa uang maupun barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup baik yang sedang bekerja, maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena cuti, sakit, dan lainnya. Penduduk yang bekerja sesuai konsep BPS ini termasuk dalam kelompok Angkatan Kerja.



**Gambar 4.1 Diagram Ketenagakerjaan**

Selain penduduk yang bekerja, pengangguran juga termasuk dalam kelompok Angkatan Kerja. Penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sementara itu, penduduk yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk yang hanya melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

Berdasarkan hasil Sakernas yang disajikan pada Tabel 4.1 jumlah penduduk usia kerja selama periode 2003-2007 meningkat dari 152,65 juta orang menjadi 164,12 juta orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam kelompok Angkatan

Kerja berkisar antara 65,7 persen sampai 67,6 persen dengan angka yang berfluktuasi setiap tahunnya. Persentase jumlah Angkatan Kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja tersebut dikenal juga sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang juga merupakan indikator pertama dalam kumpulan Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja atau *Key Indicators of the Labour Market* (KILM). Secara umum, TPAK didefinisikan sebagai ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja.

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke atas menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2003-2007**

Kategori	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Usia 15+</b>	152.649.981	153.948.922	158.491.396	160.811.498	164.118.323
<b>Angkatan Kerja</b>	100.316.007 (65,7%)	103.973.387 (67,6%)	105.857.653 (66,8%)	106.388.935 (66,2%)	109.941.359 (67,0%)
Bekerja	90.784.917 90,5%	93.722.036 90,1%	93.958.387 88,8%	95.456.935 89,7%	99.930.217 90,9%
Pengangguran	9.531.090 9,5%	10.251.351 9,9%	11.899.266 11,2%	10.932.000 10,3%	10.011.142 9,1%
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	52.333.974 (34,3%)	49.975.535 (32,5%)	52.633.743 (33,2%)	54.422.563 (33,8%)	54.176.964 (33,0%)
Sekolah	11.730.912 22,4%	11.582.932 23,2%	13.581.943 25,8%	13.530.160 24,9%	13.777.378 25,4%
Mengurus	32.654.468 62,4%	30.890.607 61,8%	30.619.529 58,2%	31.977.973 58,8%	31.989.042 59,0%
Rumah Tangga	7.948.594 15,2%	7.501.996 15,0%	8.432.271 16,0%	8.914.430 16,4%	8.410.544 15,5%
Lainnya					

Catatan: - Tahun 2005 menunjukkan kondisi November sedangkan tahun-tahun lainnya menunjukkan kondisi Agustus  
 - Angka dalam kurung menyatakan persentase terhadap penduduk umur 15 tahun ke atas

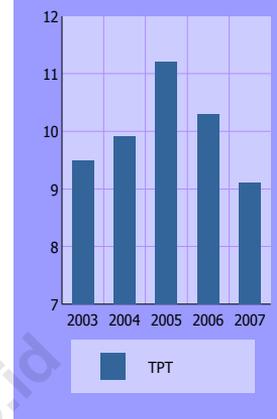
Seiring dengan peningkatan jumlah Angkatan Kerja, jumlah penduduk yang bekerja juga terus meningkat dari 90,78 juta orang menjadi 99,93 juta orang. Meskipun jumlahnya meningkat, persentase penduduk bekerja berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2003 ada sekitar 90,5 persen penduduk bekerja, tetapi pada tahun 2004 dan 2005 turun menjadi 90,1 persen dan 88,8 persen. Pada tahun 2006 dan 2007 terjadi

peningkatan masing-masing menjadi 89,7 persen dan 90,9 persen. Persentase penduduk bekerja terhadap penduduk angkatan kerja dikenal sebagai Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Indikator ini menunjukkan seberapa besar penduduk yang berpotensi secara ekonomis untuk menghasilkan barang dan jasa secara riil ikut berpartisipasi menghasilkan barang dan jasa tersebut, atau dengan perkataan lain termasuk ke dalam golongan penduduk bekerja.

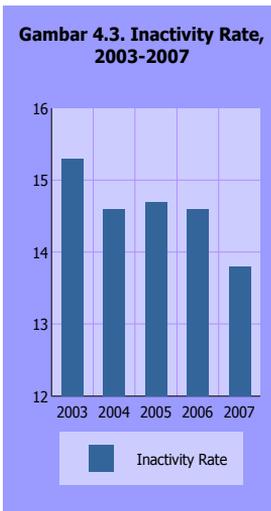
Sebagai kebalikan dari TKK adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sering disebut angka pengangguran. Indikator ini dihitung sebagai persentase penduduk pengangguran terhadap angkatan kerja. Dalam KILM, TPT merupakan KILM ke-8 dengan istilah internasional adalah *Unemployment*. Angka ini dapat dihitung secara mudah sebagai selisih antara 100 persen dengan angka TKK. Selama periode 2003-2007, TPT berfluktuasi pada kisaran 9,1 persen dan 11,2 persen. Meskipun selama periode 2003 - 2005 TPT meningkat dari 9,5 persen menjadi 11,2 persen, namun pada dua tahun berikutnya terjadi perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia karena TPT turun masing-masing menjadi 10,3 persen dan 9,1 persen.

Penduduk yang mengurus rumah tangga merupakan kelompok dominan dalam golongan penduduk Bukan Angkatan Kerja, terutama yang merupakan ibu rumah tangga yaitu yang hanya melakukan kegiatan kerumahtangaan, seperti memasak, mencuci, dan sebagainya. Dalam konsep ini tidak termasuk pembantu rumah tangga yang mengerjakan hal yang sama tetapi mendapat upah atau gaji. Selama periode 2003-2007 penduduk yang mempunyai kegiatan hanya mengurus rumah tangga berkisar antara 58,2 persen dan 62,4 persen. Sementara itu, proporsi penduduk yang bersekolah terhadap penduduk Bukan Angkatan Kerja pada tahun 2005 merupakan yang tertinggi selama periode 2003-2007 yaitu sebesar 25,8 persen. Sedangkan penduduk Bukan Angkatan Kerja yang hanya melakukan kegiatan lainnya seperti olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial, termasuk yang tidak mampu melakukan kegiatan apapun seperti orang lanjut usia, cacat jasmani, dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi hanya berkisar antara 15,0 persen dan 16,4 persen.

**Gambar 4.2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2003-2007**



*Selama tahun 2006 dan 2007 TPT turun menjadi 10,3 persen dan 9,1 persen.*



Penduduk yang termasuk dalam usia kerja dan juga merupakan kelompok penduduk usia prima (25-54 tahun) merupakan penduduk yang sangat berpotensi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam pasar tenaga kerja guna mengaktifkan roda perekonomian suatu negara. Kelompok penduduk ini merupakan bagian dari penduduk usia produktif (15-64 tahun). Namun, pada kenyataannya tidak semua penduduk usia prima masuk ke dalam Angkatan Kerja. Dalam KILM indikator penduduk dengan karakteristik tersebut disebut *Inactivity rate* dan masuk ke dalam KILM ke-13, yaitu persentase penduduk bukan angkatan kerja usia 25-54 tahun terhadap total penduduk usia kerja. Dengan demikian, *Inactivity rate* menggambarkan persentase penduduk usia prima yang seharusnya masuk dalam pasar tenaga kerja tetapi tidak ikut andil.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tingkat inaktivitas (*Inactivity rate*) selama periode 2003-2007 turun dari 15,3 persen menjadi 13,8 persen. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan orientasi kegiatan penduduk usia prima dari kegiatan yang tidak menciptakan barang dan jasa, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga menjadi kegiatan yang menghasilkan barang/jasa (bekerja) atau berusaha untuk menghasilkan barang dan jasa (mencari pekerjaan).

**Tabel 4.2. Inactivity Rate (persen), 2003-2007**

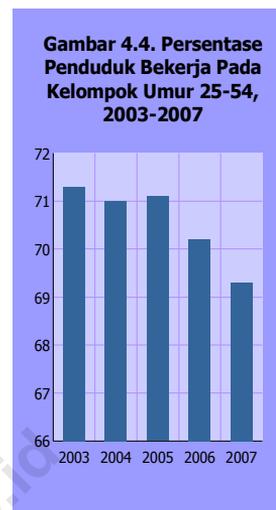
Tahun	Proporsi
(1)	(2)
2003	15,3
2004	14,6
2005	14,7
2006	14,6
2007	13,8

Catatan: - Tahun 2005 menunjukkan kondisi November sedangkan tahun-tahun lainnya menunjukkan kondisi Agustus

## 4.2. Karakteristik Penduduk Bekerja

### 4.2.1. Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur

Dalam analisis ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja dapat dibedakan menurut kelompok umur. Tujuannya adalah untuk melihat kontribusi pekerja muda, pekerja prima, dan pekerja tua dalam dunia pasar tenaga kerja. Idealnya, mayoritas penduduk yang bekerja dalam pasar tenaga kerja berusia prima. Namun tidak menutup kemungkinan penduduk usia muda dan tua dapat ikut andil dalam pasar tenaga kerja tersebut. Hal ini antara lain disebabkan adanya rasa tanggung jawab untuk mencari nafkah, membantu ekonomi rumah tangga atau keluarga, adanya kebutuhan akan sosialisasi, dan pengakuan dari masyarakat.



**Tabel 4.3. Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur (persen), 2003-2007**

Kelompok Umur	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-19	5,0	5,3	4,8	5,0	5,7
20-24	11,2	10,6	11,0	11,2	11,2
<b>Total 15-24</b>	<b>16,2</b>	<b>16,0</b>	<b>15,8</b>	<b>16,2</b>	<b>16,9</b>
25-29	13,5	12,8	13,1	13,2	12,8
30-34	14,3	13,8	13,4	13,6	13,0
35-39	13,7	13,7	13,7	13,1	12,9
40-44	12,3	12,4	12,3	12,0	12,2
45-49	9,8	10,1	10,6	10,4	10,4
50-54	7,8	8,1	8,0	7,9	8,0
<b>Total 25-54</b>	<b>71,3</b>	<b>71,0</b>	<b>71,1</b>	<b>70,2</b>	<b>69,3</b>
55-59	4,6	4,8	5,3	5,5	5,5
60+	7,8	8,2	7,8	8,1	8,3
<b>Total 55+</b>	<b>12,4</b>	<b>13,0</b>	<b>13,1</b>	<b>13,6</b>	<b>13,8</b>

Catatan: - Tahun 2005 menunjukkan kondisi November sedangkan tahun-tahun lainnya menunjukkan kondisi Agustus

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi penduduk yang bekerja menurut kelompok umur. Selama periode 2003-2007 penduduk yang bekerja mayoritas berumur 25-54 tahun (usia prima) dengan persentase yang terus berkurang. Sementara itu, penduduk usia muda (15-19 tahun) yang bekerja selama

periode 2003-2007 berkisar antara 15,8 persen dan 16,9 persen tetapi berfluktuasi. Pekerja usia muda ini termasuk juga mereka yang sedang bersekolah. Sedangkan persentase penduduk usia tua (55 tahun ke atas) yang bekerja berkisar antara 12,4 persen dan 13,8 persen. Pekerja usia tua ini termasuk juga mereka yang sudah memasuki masa pensiun namun masih tetap berkarya.

#### **4.2.2. Penduduk Bekerja menurut Tingkat Pendidikan**

Selain dapat dibedakan menurut kelompok umur, dalam analisis ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut tingkat pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu atau sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat. Sebaliknya, karena tingginya permintaan tenaga kerja pada jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik atau berpendidikan rendah, maka mereka yang berpendidikan rendah justru dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Selama periode 2003-2007, lebih dari sepertiga penduduk yang bekerja adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan cenderung tetap tanpa perubahan yang signifikan kecuali pada tahun 2006 turun dari 38,3 persen menjadi 36,6 persen. Tingkat pendidikan berikutnya ialah SLTP yang berkisar antara 18,8 persen dan 20,4 persen. Sementara penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma ke atas hanya berkisar antara 4,6 persen dan 6,2 persen dengan kecenderungan meningkat. Hal ini salah satunya mengindikasikan kurangnya tingkat kesempatan kerja bagi penduduk yang berpendidikan tinggi karena jenis pekerjaan yang dibutuhkan umumnya memerlukan tingkat keahlian dan keterampilan yang rendah.

*Selama periode 2003-2007, lebih dari sepertiga penduduk yang bekerja adalah berpendidikan Sekolah Dasar (SD)*

**Tabel 4.4. Penduduk Bekerja menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2003-2007**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	5,2	5,7	5,0	5,4	5,4
Tidak/Belum Tamat SD	13,1	13,4	12,1	12,5	13,0
Sekolah Dasar (SD)	38,3	37,5	38,3	36,6	38,0
SLTP	20,1	19,8	20,4	19,2	18,8
SMTA Umum	13,0	12,1	12,7	13,5	12,8
SMTA Kejuruan	5,7	6,3	6,0	6,5	5,8
Diploma I/II/III	1,9	2,2	2,3	2,6	2,6
Universitas	2,7	3,0	3,2	3,6	3,6
SMTA Ke atas	23,2	23,6	24,2	26,2	24,8

Catatan: - Tahun 2005 menunjukkan kondisi November sedangkan tahun-tahun lainnya menunjukkan kondisi Agustus

### 4.2.3. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha yang digunakan BPS mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha termasuk dalam KILM ke-4, yaitu *Employment by sector*.

Lapangan usaha dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori tergantung analisis yang diinginkan. Salah satu pengelompokan lapangan usaha adalah mengikuti KBLI tahun 2005 yang biasa disebut dengan kategori lapangan usaha, yaitu :

- A. Pertanian, perburuan, kehutanan
- B. Perikanan
- C. Pertambangan dan penggalian
- D. Industri pengolahan
- E. Listrik, gas dan air
- F. Konstruksi
- G. Perdagangan besar dan eceran
- H. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
- I. Transportasi, pergudangan, dan komunikasi
- J. Perantara keuangan
- K. Real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan

- L. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib
- M. Jasa pendidikan
- N. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
- O. Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya
- P. Jasa perorangan yang melayani rumahtangga

Untuk analisis ketenagakerjaan, biasanya 16 kategori tersebut dikelompokkan menjadi 9 jenis lapangan usaha. Terjadi beberapa penggabungan kategori yaitu Kategori A dan B menjadi Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. Kategori G dan H menjadi Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel. Kategori J dan K menjadi Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan. Kategori L, M, N, O, dan P menjadi Jasa Kemasyarakatan. Sedangkan lima kategori lainnya tetap.

Analisis yang digunakan dalam tulisan ini hanya menggunakan pengelompokan lapangan usaha dalam tiga kelompok. Lapangan usaha Pertanian atau *Agriculture* (A) terdiri dari pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Lapangan usaha Industri atau *Manufacturing* (M) terdiri dari pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, dan konstruksi. Lapangan usaha Jasa-jasa atau *Services* (S) adalah selain Pertanian dan Industri.

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia bertumpu pada sektor Pertanian terutama di daerah perdesaan. Pada tahun 2003, persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sudah mencapai 46,4 persen, namun proporsinya terus menurun sampai tahun 2007 menjadi 41,2 persen, kecuali tahun 2005 sedikit meningkat menjadi 44,0 persen dari 43,3 persen pada tahun sebelumnya. Sektor berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja ialah Jasa-jasa, yaitu berkisar antara 35,9 persen dan 40,0 persen selama periode 2003-2007 dengan kecenderungan meningkat. Berbeda dengan sektor pertanian, proporsi penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa pada tahun 2005 sedikit menurun dari 38,7 persen menjadi 38,0 persen. Sementara itu, sektor

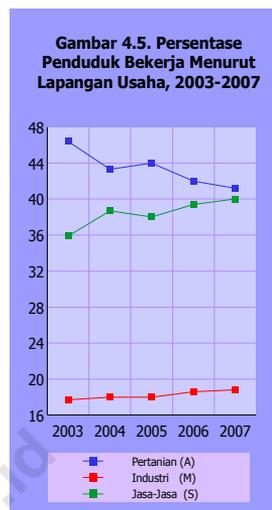
*Mayoritas penduduk Indonesia bertumpu pada sektor Pertanian terutama di daerah perdesaan*

Industri meskipun terus mengalami peningkatan pada periode yang sama, namun hanya menyerap tenaga kerja antara 17,7 persen dan 18,8 persen.

**Tabel 4.5. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha (persen), 2003-2007**

Lapangan Usaha	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian (A)	46,4	43,3	44,0	42,0	41,2
Industri (M)	17,7	18,0	18,0	18,6	18,8
Jasa-Jasa (S)	35,9	38,7	38,0	39,4	40,0

Catatan: - Tahun 2005 menunjukkan kondisi November sedangkan tahun-tahun lainnya menunjukkan kondisi Agustus



#### 4.2.4. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Indikator ini merupakan KILM ke-3 yaitu *Status in Employment*. Salah satu kegunaan indikator ini adalah untuk mengetahui pekerja di sektor informal.

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2003-2007, di antara 7 kategori status pekerjaan, buruh/karyawan tercatat yang terbanyak dan mengalami peningkatan yaitu dari 26,0 persen pada tahun 2003 menjadi 28,1 persen pada tahun 2007. Penduduk yang berusaha dibantu pekerja tak dibayar proporsinya juga cukup besar tetapi turun dari 24,1 persen menjadi 21,0 persen selama periode 2003-2007. Sementara itu, penduduk yang berusaha sendiri meningkat dari 18,2 persen menjadi 20,3 persen pada periode yang sama. Kelompok penduduk lainnya yang proporsinya cukup besar ialah pekerja keluarga, namun demikian cenderung turun dari 20,3 persen pada tahun 2003 menjadi 17,3 persen pada tahun 2007.

*Berdasarkan hasil Sakernas 2003-2007 proporsi buruh/karyawan merupakan yang terbanyak di antara 7 kategori status pekerjaan dan terus meningkat selama periode 2003-2007 dari 26,0 persen menjadi 28,1 persen*

**Tabel 4.6. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan (persen), 2003-2007**

Status Pekerjaan	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Berusaha Sendiri	18,2	19,5	18,4	20,4	20,3
2. Berusaha Dibantu Pekerja Tak Dibayar	24,1	22,9	22,3	20,9	21,0
3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap	2,9	3,2	3,0	3,0	2,9
4. Buruh/Karyawan	26,0	27,2	27,7	28,1	28,1
5. Pekerja Keluarga	20,3	18,5	18,0	16,9	17,3
6. Pekerja Bebas Pertanian	5,0	4,8	5,9	5,8	5,9
7. Pekerja Bebas Non Pertanian	3,5	4,0	4,6	4,8	4,5

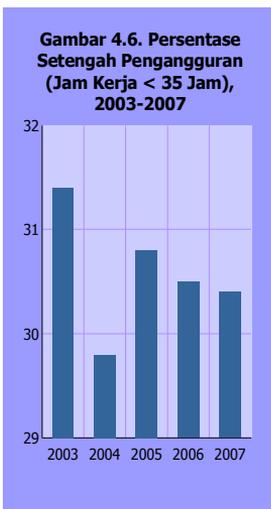
Catatan: - Tahun 2005 menunjukkan kondisi November sedangkan tahun-tahun lainnya menunjukkan kondisi Agustus

#### 4.2.5. Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja

Proporsi penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja yang merupakan KILM ke-6 (*Hours of Work*) dan proporsi setengah pengangguran karena lama waktu bekerja kurang dari jumlah jam kerja normal (*time-related underemployment*) yang merupakan KILM ke-12 merupakan indikator-indikator yang juga dapat dihasilkan dari Sakernas. Indikator setengah pengangguran ini sebelumnya dikenal sebagai pengangguran kentara (*visible underemployment*).

Kedua indikator ini berguna untuk mengetahui proporsi penduduk bekerja yang dapat dikategorikan sebagai pekerja "murni" dan proporsi penduduk bekerja namun dikategorikan pengangguran karena jumlah jam kerjanya kurang dari jumlah jam kerja normal. Di Indonesia seseorang dikatakan murni bekerja apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu dengan konsep jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu.

Hasil Sakernas 2003 - 2007 yang disajikan pada tabel 4.7 menggambarkan persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (< 35 jam seminggu) atau dapat dikategorikan sebagai setengah penganggur. Selama periode 2003-2007, persentase penduduk setengah menganggur cenderung turun dari 31,4 persen menjadi 30,4 persen



meskipun pada tahun 2005 sempat terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Begitu juga, penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu yang biasa dikategorikan sebagai pengangguran kritis cenderung turun dari 4,6 persen pada tahun 2003 menjadi 4,3 persen pada tahun 2006. Tetapi pada tahun 2007 meningkat secara signifikan menjadi 5,2 persen. Sementara itu, penduduk yang sementara tidak bekerja yaitu sudah mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu sebelum pencacahan tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja sehingga jam kerjanya nol berkisar antara 2,2 sampai 2,7 persen. Penduduk dengan jam kerja nol tersebut tetap dikategorikan sebagai penduduk bekerja.

*Selama periode 2003-2007, persentase penduduk setengah pengangguran cenderung turun dari 31,4 persen menjadi 30,4 persen meskipun pada tahun 2005 sempat terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya.*

**Tabel 4.7. Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu (persen), 2003-2007**

Tahun	Jam kerja		
	0*) Jam	1-14 Jam	1-34 Jam
(1)	(2)	(3)	(4)
2003	2,7	4,6	31,4
2004	2,4	4,5	29,8
2005	2,2	4,3	30,8
2006	2,6	4,3	30,5
2007	2,4	5,2	30,4

Catatan: \*) Sementara tidak bekerja

Tahun 2005 menunjukkan kondisi November sedangkan tahun-tahun lainnya menunjukkan kondisi Agustus

# STATISTIK PENGANGGURAN INDONESIA

*Konsep dan Definisi Pengangguran •*  
*Kebijakan dan Program Penanggulangan Pengangguran •*  
*Analisis Pengangguran •*

5



Pengangguran atau Tuna Karya - yang dikutip dari Wikipedia edisi Bahasa Indonesia di <http://id.wikipedia.org/wiki/pengangguran> - adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya terjadi karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya.

*Pengangguran merupakan masalah perekonomian negara karena menjadi salah satu penyebab kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya*

Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran atau konsumsinya yang pada akhirnya akan mengakibatkan menurunnya tingkat kualitas hidup atau kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan atau berlangsung lama juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi penganggur bahkan keluarganya. Dari sisi nasional, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, keamanan, dan sosial sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*) dan pendapatan per kapita suatu negara.

Data pengangguran dikumpulkan BPS melalui survei rumah tangga, seperti Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Di antara sensus/survei tersebut Sakernas merupakan survei yang khusus dirancang untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan secara periodik. Saat ini Sakernas diselenggarakan dua kali setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus.

### 5.1. Konsep dan Definisi Pengangguran

Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*short reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah statistik yang timbul karena adanya perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu (yang lalu) paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja, termasuk Indonesia.

Batas bawah usia kerja bervariasi antar negara. Indonesia menggunakan batas bawah usia 15 tahun, namun dalam kuesioner tetap dicatat 10 tahun ke atas. Mesir menggunakan batas bawah usia 6 tahun, Brazil 10 tahun, Swedia dan USA masing-masing 16 tahun, Kanada 14 tahun dan 15 tahun, India 5 tahun dan 15 tahun, serta Venezuela 10 tahun dan 15 tahun. Beberapa negara menentukan batas atas usia kerja dan bervariasi antar negara. Denmark, Swedia, Norwegia, dan Finlandia menggunakan batas atas usia kerja 74 tahun. Sementara Mesir, Malaysia, dan Meksiko masing-masing 65 tahun. Namun, banyak pula negara yang tidak membatasi batas atas usia kerja penduduknya termasuk Indonesia. Penduduk yang dibatasi dengan batas-batas usia kerja ini disebut penduduk usia kerja.

Konsep dan definisi yang digunakan BPS dalam Sakernas mengacu pada konsep yang berlaku secara internasional dari ILO (*ILO Concept Approach*). Hal ini bertujuan agar indikator ketenagakerjaan Indonesia bersifat internasional sehingga dapat dibandingkan dengan negara lain. Menurut konsep ini, penduduk usia kerja dibedakan berdasarkan kegiatan utamanya menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang hanya bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan

*Dalam sensus/survei ketenagakerjaannya, BPS menggunakan konsep ketenagakerjaan yang direkomendasikan oleh ILO*

kegiatan lainnya. Sementara itu, bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan berlangsung paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. Mulai tahun 2001 mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja dikategorikan sebagai pengangguran (sesuai konsep ILO pada buku *An ILO Manual on Concepts and Methods* hal. 97). Beberapa contoh mengenai penduduk yang sementara tidak bekerja, antara lain : (1) pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya; (2) petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau menunggu hujan turun agar bisa menggarap sawah); dan (3) orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resikonya sendiri dalam suatu bidang keahlian, yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan, dan sebagainya, seperti dalang, tukang cukur, dan tukang pijat.

Menurut konsep ILO, penganggur terbuka atau dikenal dengan istilah pengangguran didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini mencakup : (1) penduduk yang mencari pekerjaan; (2) penduduk yang mempersiapkan usaha; (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa); dan (4) penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Definisi standar untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja, dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan, mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat pencacahan orang tersebut sedang mencari pekerjaan, misalnya : orang yang belum pernah bekerja tetapi sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau orang yang sudah pernah bekerja tetapi karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud di sini adalah apabila "tindakannya nyata", seperti : mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, baik yang telah maupun sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha ini nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*), sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = (\text{Penganggur} / \text{Angkatan Kerja}) \times 100 \%$$

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Yang lebih utama lagi indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian Indonesia selain angka kemiskinan. Oleh karena itu, indikator TPT selalu diumumkan setiap tahun pada Pidato Presiden tanggal 16 Agustus sebagai bukti kinerja Pemerintah Indonesia.

Setengah pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang telah bekerja, tetapi mengalami ketidakpuasan atas pekerjaan yang dilakukannya. Di Indonesia, setengah pengangguran didefinisikan sebagai penduduk bekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Dari keadaan tersebut, maka konsep setengah pengangguran dibedakan menjadi dua, yaitu:

- (1) Setengah Pengangguran Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain (*visible underemployment*).
- (2) Setengah Pengangguran Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, sering disebut juga sebagai pekerja paruh waktu (*part time worker*).

Indikator setengah pengangguran ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Selain pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, ada beberapa konsep pengangguran lainnya yang terkait dengan pendidikan, lapangan usaha, jenis pekerjaan/jabatan, dan status pekerjaan. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu diketahui beberapa konsep berikut :

- (1) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dan mendapatkan surat tanda tamat belajar (ijazah)

- (2) Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam yang digunakan oleh seseorang untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan dan sebagainya.
- (3) Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/ usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Selama periode Sakernas 1986-2005, pengelompokan lapangan usaha mengalami beberapa kali perubahan.
- (4) Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja.
- (5) Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.

Jenis pengangguran lainnya yang juga digunakan di beberapa negara di dunia adalah (dikutip dari <http://organisasi.org>) :

- (1) Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*), adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dan pembuka lapangan kerja.
- (2) Pengangguran Struktural (*Structural Unemployment*), adalah keadaan dimana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju keadaan perekonomian di suatu daerah maka akan terjadi peningkatan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
- (3) Pengangguran Musiman (*Seasonal Unemployment*), adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai

contoh, petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya.

- (4) Pengangguran Bersiklus (*Siclical Unemployment*), adalah pengangguran yang terjadi akibat imbas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.

## **5.2. Kebijakan dan Program Penanggulangan Pengangguran**

Salah satu masalah ketenagakerjaan di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia adalah pengangguran. Dilihat dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari situasi dimana telah terjadi ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia bahkan terus bertambah, antara lain karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja dan kurang efektifnya informasi pasar tenaga kerja bagi pencari kerja. Selain itu pengangguran juga dapat disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup/mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain.

Jumlah pengangguran yang tinggi akan saling berkaitan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan serta berdampak terhadap timbulnya berbagai masalah kerawanan sosial di suatu wilayah. Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemerintah Indonesia menargetkan penurunan angka pengangguran secara bertahap dari tahun ke tahun.

*Platform* ekonomi pemerintahan saat ini - di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia untuk periode tahun 2004-2009 - menjanjikan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, peningkatan daya beli, peningkatan investasi, perawatan dan pengelolaan infrastruktur, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat.

*Pengangguran dapat disebabkan oleh PHK akibat krisis ekonomi, keamanan negara yang tidak kondusif, dan terhambatnya investasi*

Dalam platform ekonominya tersebut, Pemerintah menargetkan angka pengangguran turun dari 10,1 persen menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Sementara kemiskinan akan ditekan hingga 8,2 persen dari 17,4 persen (tahun 2003). Pendapatan per kapita juga akan ditingkatkan 2 kali lipat dari US\$ 968 menjadi US\$ 1.731 pada tahun 2009. Investasi ditargetkan akan naik menjadi 30 persen dari PDB yang saat ini hanya 16,7 persen. Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan akan dipacu 7,6 persen pada 2009 dengan pertumbuhan rata-rata 6,6 persen per tahun dengan alasan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen sampai 5 persen tidak cukup untuk mendorong pemulihan ekonomi.

*Pemerintah menargetkan angka pengangguran dan kemiskinan pada tahun 2009 turun masing-masing menjadi 5,1 persen dan 8,2 persen*

Untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan khususnya masalah pengangguran tentunya diperlukan kebijakan dan program penanggulangan pengangguran secara komprehensif dan tepat. Secara legal formal, sebenarnya arahan dan acuan kebijakan dan program penanggulangan pengangguran telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Disamping itu, wacana tentang solusi penanggulangan pengangguran dari masyarakat luas (pemerhati ketenagakerjaan) juga patut untuk dijadikan bahan masukan dan kajian.

### **(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan produktivitas.

Pemahaman tentang produktivitas telah berkembang dengan pesat dari waktu ke waktu. Produktivitas tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan antara input dan output,

efisiensi dan efektivitas, tetapi berbagai faktor yang semakin memperkaya pemahaman tentang produktivitas. Dimensi waktu dan mutu dalam proses produksi serta kuantitas input yang digunakan, kreativitas, inovasi dan akuntabilitas, serta asset intelektual merupakan indikator lain yang mulai diperhitungkan dalam pengukuran produktivitas.

Pengaruh globalisasi telah memunculkan permasalahan baru, kesenjangan keterampilan tenaga kerja yang tersedia di pasar domestik, dan semakin terbukanya penggunaan tenaga kerja Indonesia yang dapat mendatangkan devisa bagi negara. Demikian halnya dengan perubahan dunia kerja terjadi melalui pergeseran struktur kesempatan kerja pada jenis pekerjaan yang lebih berorientasi pada pengetahuan (*knowledge*) dan tenaga kerja kompeten, dan banyak jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan dikontrakkan di luar perusahaan (*outsourc*) sehingga akan berdampak pada meningkatnya jumlah pekerja mandiri daripada sebagai pekerja dibayar.

Peningkatan produktivitas secara total dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya merupakan tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Perkembangan kebutuhan dunia kerja yang begitu cepat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pasar kerja bebas, perlu diantisipasi oleh sistem pengembangan sumberdaya manusia yang fleksibel, sehingga setiap lowongan kerja dan peluang kerja dapat diisi oleh pencari kerja. Oleh karena itu, perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat agar selalu meningkatkan daya saingnya di dunia internasional.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi telah pula memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan di bidang ketenagakerjaan. Fungsi pembinaan kualitas dan produktivitas sebagai urusan pemerintah daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya perbedaan kemampuan daerah, infrastruktur ketenagakerjaan yang ada belum dioptimalkan pendaayagunaannya, sehingga diperlukan adanya komitmen

nasional guna membangun daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas dan produktivitas.

Menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan, yaitu :

- (1) Paket 31 Agustus 2005, yang meliputi Kebijakan Energi, Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Kebijakan Sektor Riil.
- (2) Paket Insentif 1 Oktober 2005 yang disusun dalam kerangka reformasi ekonomi untuk memperkuat fondasi perekonomian dan mempertahankan momentum percepatan laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya saing dan menggairahkan investasi dalam rangka penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan. Cakupan paket kebijakan ini meliputi Paket Insentif Fiskal, Reformasi Regulasi dalam Sektor Perdagangan, Reformasi Regulasi dalam Sektor Perhubungan, Peningkatan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Beras dan Gabah Petani, serta Subsidi Langsung Tunai.

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam bidang Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) melaksanakan berbagai kebijakan strategis yang salah satunya adalah Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) tahun 2008. Program Aksi GPP ini merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja dalam rangka menanggulangi pengangguran dan kemiskinan. Pelaksanaan Program Aksi GPP ini meliputi berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Sejumlah dana telah dialokasikan oleh pemerintah untuk mendukung program pokok ketenagakerjaan yang meliputi Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja, Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Pengembangan Wilayah Tertinggal, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## **(2) Seputar Wacana Solusi Masalah Pengangguran di Indonesia**

Menurut Tjepy Aloewie, Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pengangguran dan setengah pengangguran merupakan permasalahan di muara yang tidak bisa diselesaikan pada titik itu saja, tetapi juga harus ditangani dari hulu. Sektor di hulu yang banyak berdampak pada pengangguran dan setengah pengangguran adalah sektor kependudukan, pendidikan, dan ekonomi.

Masyarakat, dalam hal ini para pemerhati masalah ketenagakerjaan, secara terbuka telah banyak memberikan solusi berkaitan dengan masalah pengangguran di Indonesia, salah satu diantaranya adalah solusi yang ditawarkan oleh Daulat Sinuraya, Sekjen Himpunan Pembina Sumberdaya Manusia Indonesia (HIPSMI). Menurutnya, banyak pihak sering menyatakan bahwa persoalan pengangguran itu adalah masalah muara. Berbicara mengenai pengangguran banyak aspek dan teori disiplin ilmu terkait. Yang jelas pengangguran hanya dapat ditanggulangi secara konseptual, komprehensif, integral baik terhadap persoalan hulu maupun muara. Menurutnya, solusi pengangguran dapat dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang dapat ditempuh melalui kebijakan makro (umum) dan mikro (khusus).

Kebijakan makro yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi, dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan), dan lainnya. Dalam keputusan rapat-rapat kabinet, hal-hal itu harus jelas keputusannya dengan fokus pada penanggulangan pengangguran. Jadi setiap lembaga pemerintah yang terkait dengan pengangguran harus ada komitmen dalam keputusannya dan pelaksanaannya.

Kebijakan mikro dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, pengembangan *mindset* dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memiliki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai, dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.

Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan.

Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Hal ini dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus.

Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun kelompok. Hal ini untuk merangsang pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sebagai contoh, bahan organik sampah dapat dijadikan kompos, dan bahan non-organiknya dapat didaur ulang. Sampah sebagai bahan baku pupuk organik dapat diolah untuk menciptakan lapangan kerja dan pupuk organik dapat didistribusikan ke wilayah-wilayah tandus yang berdekatan untuk meningkatkan produksi lahan. Semua memiliki nilai ekonomis tinggi dan akan menciptakan lapangan kerja.

Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun serta dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (*brainware*), perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung kondisinya.

Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (*skilled*). Hal ini dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Bagi pemerintah Daerah yang memiliki lahan cukup, gedung, perbankan, keuangan dan aset lainnya yang memadai dapat membangun Badan Usaha Milik Daerah Pengerahan Jasa Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri (BUMD-PJTJKI). Tentunya badan itu diperlengkapi dengan lembaga pelatihan (*Training Center*) yang kompeten untuk jenis-jenis keterampilan tertentu yang sangat banyak peluang di negara lain.

Kedelapan, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sisdiknas perlu reorientasi supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal.

Kesembilan, upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentudan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur.

Kesepuluh, segera mengembangkan potensi kelautan. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan remuneratif.

Di masa-masa mendatang, diharapkan kebijakan ketenagakerjaan dapat diubah (reorientasi) kembali agar dapat berfungsi secara optimal untuk memerangi pengangguran.

### 5.3. Analisis Pengangguran

Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang ada. Sebagai akibatnya timbul sejumlah pekerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Ini merupakan akibat tidak langsung dari *supply* (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta.

Pembangunan merupakan upaya perubahan struktural yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan penduduk. Namun demikian tidak semua penduduk memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses dan kegiatan pembangunan, sehingga masih ada yang tertinggal dan tidak terangkat dari kemiskinan. Sementara, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang timbul dalam pembangunan bersama-sama dengan pengangguran dan kesenjangan sosial, dan ketiganya saling berkaitan.

Menurut para pakar pembangunan ekonomi, salah satu gejala pembangunan ekonomi yang pesat seperti negara berkembang yang lebih mengutamakan proses industrialisasi yang pesat khususnya industrialisasi yang padat modal, adalah terjadinya peningkatan pengangguran, terutama di daerah perkotaan yang merupakan pusat sebagian besar industri yang baru didirikan. Masalah pengangguran terbuka pada umumnya adalah ciri khas dari angkatan kerja di daerah perkotaan. Pengangguran banyak dicirikan oleh perempuan, berusia muda, berpendidikan relatif tinggi, dan baru pertama kali mencari pekerjaan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT memberikan indikasi besarnya angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Dalam sub bab ini, analisis pengangguran terutama berkaitan dengan pengangguran menurut kategori, provinsi, jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, daerah tempat tinggal, dan analisis pengangguran menurut beberapa negara.

*Pengangguran terjadi sebagai akibat dari tidak sempurnanya pasar tenaga kerja, atau tidak mampunya pasar tenaga kerja menyerap tenaga kerja yang ada*

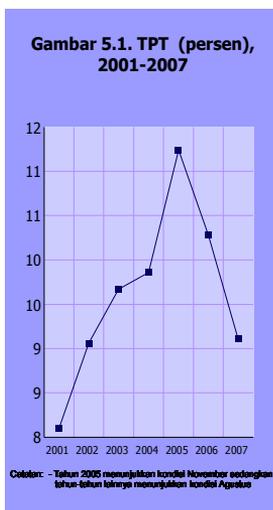
5.3.1. Pengangguran menurut Kategori

Tabel 5.1 dan Gambar 5.1 menunjukkan TPT selama periode 2001-2005 terus meningkat, tetapi pada tahun 2006 mengalami sedikit penurunan dan berlanjut pada tahun 2007. Hasil Sakernas semester 2 menunjukkan bahwa TPT pada bulan Agustus tahun 2001 hanya sebesar 8,10 persen, tetapi kemudian terus meningkat sehingga mencapai 11,24 persen pada bulan November 2005. Pada bulan Agustus 2006 TPT turun menjadi 10,28 persen, dan pada bulan Agustus 2007 kembali turun menjadi 9,11 persen.

Tabel 5.1. Jumlah Pengangguran Terbuka menurut Kategori, 2001-2007

Tahun	Bulan Pencacahan	Kategori Pengangguran				Jumlah	TPT (%)
		Mencari Pekerjaan	Mempersiapkan Usaha	Putus Asa	Mempunyai Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2001	Agustus	5.330.101	158.956	2.124.223	391.751	8.005.031	8,10
2002	Agustus	5.909.386	113.878	2.651.809	457.031	9.132.104	9,06
2003	Agustus	5.756.332	114.773	3.319.687	748.509	9.939.301	9,67
2004	Agustus	6.478.394	76.288	2.867.799	828.870	10.251.351	9,86
2005	Februari	6.735.061	100.972	3.607.169	411.052	10.854.254	10,26
	November	7.559.480	68.628	3.790.205	480.953	11.899.266	11,24
2006	Februari	7.231.763	100.136	3.441.149	331.645	11.104.693	10,45
	Agustus	7.348.560	95.285	3.135.728	352.427	10.932.000	10,28
2007	Februari	7.643.228	168.810	2.457.467	278.412	10.547.917	9,75
	Agustus	8.320.017	139.876	1.214.735	336.514	10.011.142	9,11

Sumber: Sakernas 2001 - 2007, BPS



TPT yang cukup tinggi pada bulan November 2005 tersebut diduga kuat sebagai dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah pada 1 Oktober 2005. Kebijakan tidak populer ini menyebabkan "efek domino" pada semua sektor ekonomi, dan ujung-ujungnya jumlah pengangguran meningkat. Namun setelah berjalan sekitar satu hingga dua tahun, kembali dunia pasar tenaga kerja sedikit demi sedikit mampu menyerap sebagian angkatan kerja. Sehingga berdasarkan pantauan pada bulan Agustus 2006 dan Agustus 2007 hasil Sakernas, TPT kembali mengalami penurunan sebagai akibat mulai bergairahnya iklim usaha atau berkembangnya pasar tenaga kerja.

Jika dilihat lebih jauh berdasarkan kategori pengangguran (Gambar 5.2), kelompok mencari pekerjaan selalu memiliki proporsi terbesar dari sisi jumlah penganggur dan cenderung selama periode 2001-2007. Sedangkan, kelompok mempersiapkan usaha memiliki proporsi paling kecil. Sementara, kelompok putus asa dan belum mulai bekerja berfluktuasi setiap tahunnya.

Dari gambaran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa angkatan kerja yang berstatus penganggur mayoritas dikarenakan sedang mencari pekerjaan, sedangkan sebagian kecilnya karena mempersiapkan usaha atau karena memang sudah dapat pekerjaan tetapi belum mulai aktif bekerja. Di pihak lain yang patut untuk dicermati adalah bahwa kategori penganggur karena putus asa ternyata jumlahnya relatif cukup besar. Ada apa sebenarnya dengan semangat para pencari kerja selama ini, sehingga mereka mudah berputus asa. Untuk menjawab fenomena ini perlu penelitian atau kajian lebih mendalam.

### 5.3.2. Pengangguran menurut Provinsi

TPT menurut provinsi yang disajikan pada Tabel 5.2 menunjukkan tingkat pengangguran pada bulan November 2005 merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun lainnya di sebagian besar provinsi. Sedangkan kondisi bulan Agustus 2007 cenderung lebih rendah dibanding tahun-tahun lainnya. Pada tahun 2003 dan 2004, Sulawesi Selatan tercatat memiliki angka pengangguran paling tinggi yaitu masing-masing sebesar 17,32 persen dan 15,93 persen. Sedangkan pada bulan November 2005, meskipun TPT Sulawesi Selatan tidak turun namun masih lebih rendah dibandingkan Banten yang tercatat sebesar 16,59 persen. Pada bulan Agustus tahun 2006 dan 2007 Banten masih memiliki TPT tertinggi yaitu masing-masing 18,91 persen dan 15,75 persen. Selain dua provinsi tersebut, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku juga memiliki angka pengangguran yang tinggi.



*Penduduk yang sedang mencari pekerjaan merupakan mayoritas dari angkatan kerja yang berstatus penganggur*

Dari fakta tersebut dapat ditunjukkan bahwa kenaikan harga BBM per 1 Oktober 2005 menimbulkan dampak yang cukup luas jika dilihat dari jangkauan wilayah. Hal ini terindikasi dari adanya peningkatan TPT di seluruh provinsi di Indonesia pada bulan November 2005, kecuali Riau, Kalimantan Tengah, dan Papua.

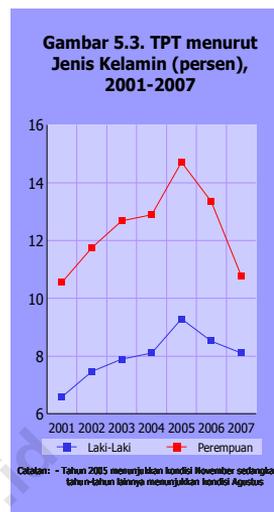
**Tabel 5.2. TPT menurut Provinsi (persen), 2003-2007**

Provinsi	Tahun							
	2003	2004	2005		2006		2007	
			Feb	Nov	Feb	Agu	Feb	Agu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
NAD	8,97	9,35	12,50	14,00	12,08	10,43	10,27	9,84
Sumatera Utara	11,02	11,08	10,98	11,90	14,82	11,51	10,63	10,10
Sumatera Barat	10,38	12,74	11,50	13,34	12,93	11,87	11,02	10,31
R i a u	10,74	15,25	13,91	12,16	11,46	10,24	10,39	9,79
J a m b i	6,50	6,04	8,59	10,74	7,77	6,62	6,74	6,22
Sumatera Selatan	9,08	8,37	8,56	12,82	12,10	9,33	10,40	9,34
Bengkulu	7,48	6,29	6,15	8,91	6,91	6,04	5,12	4,68
Lampung	9,14	7,38	6,85	8,47	9,76	9,13	8,29	7,58
Bangka Belitung	7,37	7,14	8,10	7,19	5,95	8,99	7,36	6,49
Kepulauan Riau	-	-	-	-	10,69	12,24	8,86	9,01
DKI Jakarta	14,86	14,70	14,73	15,77	14,31	11,40	13,27	12,57
Jawa Barat	12,49	13,69	14,73	15,53	14,50	14,59	14,51	13,08
Jawa Tengah	7,02	7,72	8,51	9,54	8,20	8,02	8,10	7,70
D.I Yogyakarta	5,62	6,26	5,05	7,59	6,25	6,31	6,08	6,10
Jawa Timur	8,79	7,69	8,45	8,51	7,72	8,19	7,45	6,79
B a n t e n	14,18	14,31	14,23	16,59	16,34	18,91	16,11	15,75
B a l i	5,36	4,66	4,03	5,32	5,32	6,04	4,89	3,77
NTB	6,34	7,48	8,93	10,29	8,96	8,90	7,55	6,48
NTT	4,02	4,48	5,46	4,82	4,98	3,65	3,98	3,72
Kalimantan Barat	6,53	7,90	8,61	8,13	7,06	8,53	7,08	6,47
Kalimantan Tengah	7,59	5,59	4,85	4,91	5,13	6,68	5,02	5,11
Kalimantan Selatan	7,67	6,02	6,18	7,34	8,78	8,87	7,31	7,62
Kalimantan Timur	9,69	10,39	9,04	11,17	12,11	13,43	12,83	12,07
Sulawesi Utara	10,79	10,91	14,40	14,05	13,67	14,62	13,04	12,35
Sulawesi Tengah	4,64	5,85	7,63	7,71	8,90	10,31	7,01	8,39
Sulawesi Selatan	17,32	15,93	13,58	15,93	12,32	12,76	12,01	11,25
Sulawesi Tenggara	10,30	9,35	8,92	10,93	7,42	9,67	6,93	6,40
Gorontalo	10,17	12,29	9,79	14,04	9,77	7,62	7,26	7,16
Sulawesi Barat	-	-	-	-	4,64	6,45	4,09	5,45
Maluku	12,63	11,67	12,30	15,01	15,76	13,72	14,37	12,20
Maluku Utara	7,50	7,53	8,88	13,09	8,54	6,90	8,34	6,05
Papua Barat	-	-	-	-	11,17	10,17	10,18	9,46
P a p u a	6,21	8,00	7,12	7,31	4,50	5,83	5,52	5,01
Jumlah	9,67	9,86	10,26	11,24	10,45	10,28	9,75	9,11

Sumber: Sakernas 2002 - 2007, BPS

### 5.3.3. Pengangguran menurut Jenis Kelamin

Secara umum, TPT perempuan selalu lebih tinggi dari pada TPT laki-laki, sebagaimana hasil Sakernas yang disajikan pada Tabel 5.3 dan Gambar 5.3. Selama periode 2001-2007, TPT perempuan berkisar antara 10,55 persen (Agustus 2001) dan 14,71 persen (November 2005). Sedangkan, TPT laki-laki hanya berkisar antara 6,59 persen (Agustus 2001) dan 9,29 persen (November 2005). Selama periode 2001-2005 TPT baik perempuan maupun laki-laki terus meningkat, tetapi pada tahun 2006 dan 2007 terjadi penurunan.



**Tabel 5.3. TPT menurut Jenis Kelamin (persen), Tahun 2001-2007**

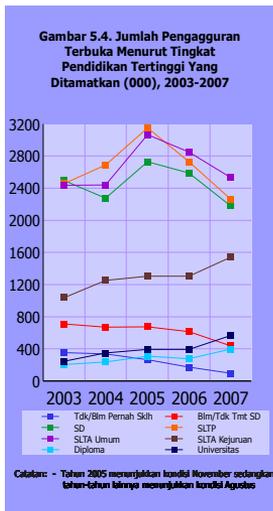
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2001	Agustus	6,59	10,55	8,10
2002	Agustus	7,47	11,75	9,06
2003	Agustus	7,89	12,68	9,67
2004	Agustus	8,11	12,89	9,86
2005	Februari	8,28	13,57	10,26
	November	9,29	14,71	11,24
2006	Februari	8,58	13,72	10,45
	Agustus	8,52	13,35	10,28
2007	Februari	8,53	11,83	9,75
	Agustus	8,11	10,77	9,11

Sumber: Sakernas 2001 - 2007, BPS

### 5.3.4. Pengangguran menurut Pendidikan

Kualitas mutu dan kompetensi sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui sarana transformasi pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang termasuk angkatan kerja akan mempengaruhi dan meningkatkan tingkat produktivitas dalam pekerjaannya. Untuk itu analisis pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar tenaga kerja memanfaatkan *supply* angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terdidik merupakan indikator dari besarnya jumlah dan persentase pengangguran yang memiliki



tingkat pendidikan cukup tinggi di suatu wilayah. Indikator ini mampu menggambarkan perbandingan jumlah pencari kerja yang berpendidikan tingkat atas (SLTA) dan yang setara ditambah dengan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi (perguruan tinggi/universitas), yang dianggap merupakan kelompok terdidik, terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut.

Secara absolut, jumlah penganggur di Indonesia terdistribusi di semua jenjang pendidikan, seperti disajikan pada Tabel 5.4. Selama periode 2003-2007, penganggur dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD, SLTP, dan SLTA Umum proporsinya berimbang yaitu masing-masing sekitar 22-26 persen dari total pengangguran di semua tingkat pendidikan. Diikuti oleh penganggur SLTA kejuruan, yaitu sekitar 10-15 persen. Sedangkan, jumlah penganggur di tingkat pendidikan lainnya hanya berkisar antara 1-7 persen. Sebagai contoh, di antara sekitar 10 juta penganggur (hasil Sakernas bulan Agustus 2007) terdapat sebanyak 94,3 ribu orang penganggur yang tidak/belum pernah sekolah; 438,5 ribu orang belum/tidak tamat SD; SD, SLTP, dan SLTA Umum masing-masing sebanyak 2,18 juta orang, 2,26 juta orang dan 2,53 juta orang; SLTA Kejuruan 1,54 juta orang; dan DI-DIII/Akademi dan Universitas masing-masing sebanyak 397,2 ribu orang dan 566,6 ribu orang.

**Tabel 5.4. Jumlah Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (000), 2003-2007**

Tahun	Bulan	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Belum/ Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	Diploma I, II, III/ Akademi	Univer- sitas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2003	Agustus	352,5	710,4	2.495,9	2.458,9	2.435,8	1.037,1	202,8	245,9	9.939,3
2004	Agustus	336,0	668,3	2.275,3	2.690,9	2.441,2	1.254,3	237,3	348,1	10.251,4
2005	Februari	342,7	670,1	2.541,0	2.680,8	2.680,8	1.230,8	322,8	385,4	10.854,3
	November	264,5	673,5	2.729,9	3.151,2	3.069,3	1.306,8	308,5	395,5	11.899,3
2006	Februari	234,5	615,0	2.675,5	2.860,0	2.842,9	1.204,1	297,2	375,6	11.104,7
	Agustus	170,7	611,3	2.589,7	2.730,0	2.851,5	1.305,2	278,1	395,6	10.932,0
2007	Februari	145,8	520,3	2.753,5	2.643,1	2.630,4	1.114,7	330,3	409,9	10.547,9
	Agustus	94,3	438,5	2.179,8	2.264,2	2.532,2	1.538,3	397,2	566,6	10.011,1

Sumber: Sakernas 2003 - 2007, BPS

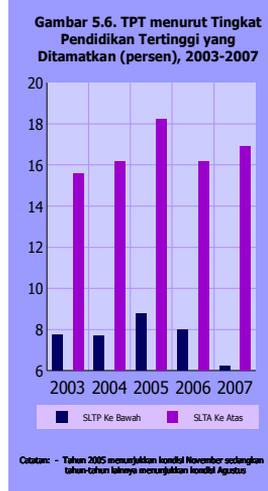
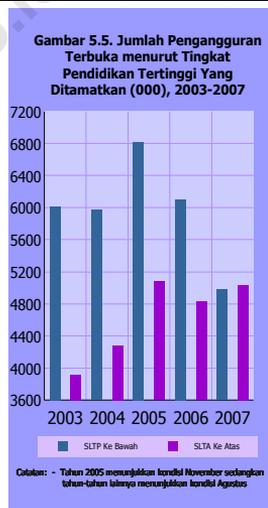
Tabel 5.5. TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2003-2007

Tahun	Bulan	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Belum/ Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	Diploma I, II, III/ Akademi	Univer- sitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2003	Agustus	6,68	5,43	6,53	11,69	17,07	16,64	10,39	9,14
2004	Agustus	5,93	5,07	6,08	12,65	17,66	17,53	10,34	10,94
2005	Februari	5,85	5,11	6,69	12,62	18,82	16,38	12,93	11,46
	November	5,37	5,59	7,05	14,15	20,40	18,92	12,33	11,64
2006	Februari	4,33	5,06	6,88	13,06	19,21	16,89	12,16	10,64
	Agustus	3,22	4,86	6,91	12,94	18,08	17,27	9,99	10,40
2007	Februari	2,68	4,51	6,93	11,78	17,11	15,99	11,95	10,55
	Agustus	1,72	3,26	5,43	10,73	16,57	21,00	13,26	13,61

Sumber: Sakernas 2003 - 2007, BPS

Merujuk pada Tabel 5.5 yang menyajikan TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, secara umum TPT di semua tingkat pendidikan selama kurun waktu tahun 2003-2007 cenderung turun terutama pada kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Peningkatan terutama terjadi di bulan November 2005 untuk semua jenjang pendidikan kecuali tidak/belum pernah sekolah. Selama periode tersebut, TPT tingkat SLTA umum dan kejuruan tercatat sebagai yang tertinggi. Sedangkan yang paling rendah adalah tidak/belum pernah sekolah dan belum/tidak tamat SD. Pada bulan Agustus tahun 2007 terjadi penurunan TPT yang cukup nyata dibanding tahun sebelumnya kecuali SLTA Kejuruan, DI-DIII/Akademi, dan Universitas.

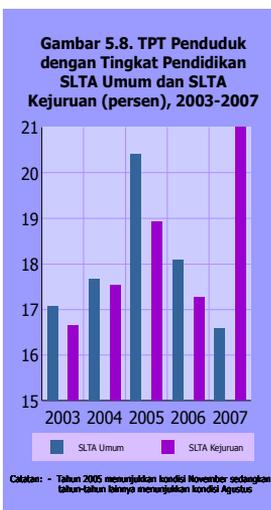
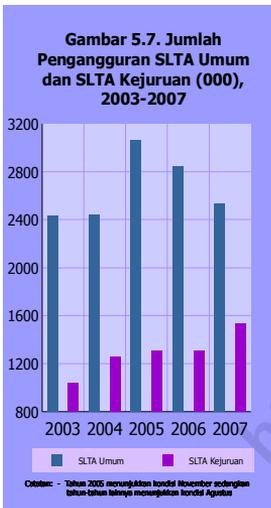
Jika dibedakan antara kelompok penganggur dengan tingkat pendidikan SLTP ke bawah dan SLTA ke atas, dapat ditunjukkan bahwa selama kurun waktu 2003-2007 jumlah pengangguran tingkat SLTP ke bawah lebih banyak dari pada SLTA ke atas (Gambar 5.5). Namun demikian, jumlah penganggur di kelompok SLTP ke bawah cenderung turun, sedangkan SLTA ke atas cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2005. Berbeda dengan angka absolut pengangguran, TPT pada kelompok pendidikan SLTA ke atas jauh lebih tinggi dibandingkan TPT SLTP ke bawah (Tabel 5.6 dan Gambar 5.6).



**Tabel 5.6. TPT menurut Kelompok Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2003-2007**

Tahun	Bulan	SLTP ke bawah	SLTA ke atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2003	Agustus	7,75	15,60	9,67
2004	Agustus	7,70	16,18	9,86
2005	Februari	7,97	16,73	10,26
	November	8,74	18,24	11,24
2006	Februari	8,15	16,91	10,45
	Agustus	7,98	16,15	10,28
2007	Februari	7,66	15,47	9,75
	Agustus	6,21	16,91	9,11

Sumber: Sakernas 2003 - 2007, BPS



Jika ditinjau pada kelompok pengangguran dengan tingkat pendidikan SLTA, dapat ditunjukkan bahwa jumlah penganggur dengan tingkat pendidikan SLTA Umum rata-rata hampir dua kali lebih banyak dari pada SLTA Kejuruan (Gambar 5.7). Jumlah pengangguran pendidikan SLTA Umum selama periode 2003-2007 berkisar antara 2,44 juta orang dan 3,07 juta orang. Sedangkan jumlah pengangguran pendidikan SLTA Kejuruan berkisar antara 1,04 juta orang dan 1,54 juta orang.

Sementara itu, Gambar 5.8 menunjukkan bahwa selama periode 2003-2007 TPT SLTA Kejuruan berkisar antara 15,99 persen sampai 21,00 persen. Sedangkan TPT SLTA Umum berkisar antara 16,57 persen hingga 20,40 persen.

### 5.3.5. Pengangguran menurut Kelompok Umur

Tabel 5.7 dan Gambar 5.9 yang menyajikan TPT menurut kelompok umur selama periode 2001-2007 menunjukkan bahwa angkatan kerja usia kurang dari 30 tahun mempunyai TPT paling besar. Jika dirinci lagi, TPT tertinggi tercatat pada angkatan kerja usia 15-19 tahun, yaitu berkisar antara 28,72 persen sampai 41,01 persen. Berikutnya adalah kelompok umur 20-24 tahun dengan TPT berkisar antara 20,99 persen hingga 29,42 persen, dan kelompok umur 25-29 tahun yang berkisar antara 8,66 persen sampai dengan 12,94

persen. Sedangkan, TPT pada kelompok umur lima tahunan yang berusia 30 tahun ke atas umumnya kurang dari 10 persen. Dari hasil Sakernas ini secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kelompok umur, ada kecenderungan semakin rendah pula tingkat penganggurannya.

*Kelompok umur 15-19 tahun mempunyai TPT paling tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya*

**Tabel 5.7. TPT menurut Kelompok Umur (persen), 2001-2007**

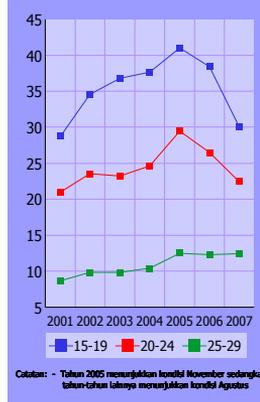
Tahun	Bulan	Kelompok Umur									
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60 +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2001	Agustus	28,72	20,99	8,66	4,12	2,36	2,13	2,24	2,46	2,63	4,82
2002	Agustus	34,57	23,56	9,80	4,52	3,01	2,11	2,13	3,09	3,73	2,84
2003	Agustus	36,79	23,22	9,81	4,58	2,97	2,17	2,36	3,10	4,35	9,21
2004	Agustus	37,65	24,63	10,38	4,80	2,87	2,27	2,10	2,81	3,95	8,00
	Februari	34,88	25,24	11,41	4,90	3,00	2,00	2,22	2,97	4,24	8,04
2005	November	41,01	29,42	12,48	5,96	3,51	2,57	2,24	2,49	3,24	6,66
	Februari	37,09	27,20	11,90	5,92	3,41	2,58	2,51	2,48	2,71	5,17
2006	Agustus	38,39	26,48	12,29	5,40	3,12	2,83	2,03	2,62	3,11	3,70
	Februari	28,82	23,56	12,94	6,92	4,56	3,70	3,35	2,71	2,76	1,89
2007	Agustus	30,02	22,42	12,43	7,42	4,84	2,32	1,71	1,57	2,01	1,41

Sumber: Sakernas 2001 - 2007, BPS

Satu hal menarik yang patut untuk dikaji lebih jauh berkaitan dengan TPT menurut kelompok umur adalah jika pada tulisan ini didefinisikan bahwa kelompok umur muda adalah angkatan kerja yang berusia antara 15 sampai 24 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2001-2007 kelompok usia muda ini memiliki TPT tertinggi. Fenomena ini cukup menarik mengingat penduduk pada kelompok umur ini merupakan penduduk usia sekolah yang selayaknya melakukan kegiatan pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Dengan perkataan lain, angkatan kerja pada kelompok usia muda ini yang juga merupakan angkatan kerja baru belum siap memasuki dunia kerja.

Ada beberapa latar belakang mengapa kelompok usia muda itu ikut terjun ke pasar kerja, antara lain kesulitan ekonomi keluarga sehingga memaksa mereka untuk berhenti sekolah/kuliah dan terpaksa memasuki dunia kerja.

**Gambar 5.9. TPT menurut Kelompok Umur (persen), 2001-2007**



Sebaliknya, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pengalaman dan keahlian menyebabkan mereka ikut terjebak dalam kelompok pengangguran, sehingga menambah akumulasi jumlah penganggur menjadi lebih banyak lagi (BPS, Statistik Pengangguran 2001-2006). Faktor-faktor lainnya ialah kelompok usia muda umumnya masih bersifat idealis termasuk dalam memilih pekerjaan, misalnya sesuai keinginan, keahlian, hobi, standar gaji, dan gengsi. Akibatnya lapangan pekerjaan mereka menjadi terbatas. Selain itu, kelompok usia ini belum memiliki banyak beban tanggungan ekonomi keluarga dan masih ada jaring pengaman ekonomi baginya yaitu keluarga dan masyarakat sosialnya.

### **5.3.6. Pengangguran menurut Daerah Tempat Tinggal**

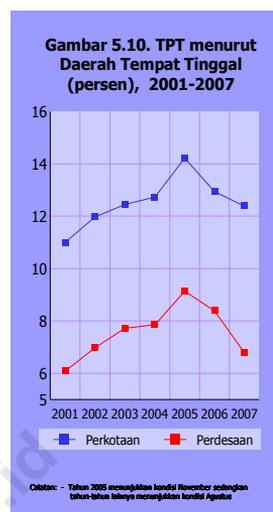
Hasil Sakernas yang disajikan pada Tabel 5.8 menunjukkan bahwa TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Selama periode 2001-2007 TPT di daerah perkotaan berkisar antara 10,99 persen hingga 14,22 persen, sedangkan TPT di daerah pedesaan hanya berkisar antara 6,09 persen hingga 9,14 persen. TPT baik di perkotaan maupun perdesaan terus meningkat sejak 2001 sampai 2005 kemudian turun sampai bulan Agustus 2007. Jika dicermati lebih jauh, peningkatan TPT di daerah perkotaan lebih cepat bila dibandingkan perdesaan. Hal ini terjadi selama periode tahun 2001-2005, seperti ditunjukkan pada Gambar 5.10. Tetapi selama periode tahun 2005-2007 penurunan TPT di daerah perkotaan secara umum lebih lambat dibandingkan penurunan TPT di daerah pedesaan.

Pengangguran terbuka merupakan fenomena penduduk perkotaan dan pekerja terdidik (Sakernas, 1996-2006). Ini merupakan dampak dari mobilitas penduduk ke daerah perkotaan dan perubahan perkembangan status suatu wilayah itu sendiri yang menjadikan perkotaan tampak mempengaruhi tingginya proporsi penduduk bertempat tinggal di daerah perkotaan. Mobilitas penduduk yang terjadi tidak terlepas dari penyebaran kegiatan perekonomian di pusat-pusat pengembangan (BPS, Statistik Pengangguran 2001-2006).

**Tabel 5.8. TPT menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2001-2007**

Tahun	Bulan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	Agustus	10,99	6,09	8,10
2002	Agustus	11,97	6,97	9,06
2003	Agustus	12,45	7,72	9,67
2004	Agustus	12,73	7,86	9,86
2005	Februari	13,51	7,98	10,26
	November	14,22	9,14	11,24
2006	Februari	13,32	8,44	10,45
	Agustus	12,94	8,39	10,28
2007	Februari	13,18	7,35	9,75
	Agustus	12,39	6,80	9,11

Sumber: Sakernas 2001 - 2007, BPS



### 5.3.7. Pengangguran menurut Negara

Permasalahan pengangguran tidak saja terjadi di negara miskin dan negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju bahkan kelompok negara-negara industri maju. Dari perbandingan tingkat pengangguran antar negara, dapat ditunjukkan posisi suatu negara terhadap negara-negara di sekitarnya atau negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Dari Tabel 5.9 tampak bahwa tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2006 tercatat sebagai yang tertinggi baik di antara negara-negara ASEAN lainnya maupun negara-negara di kawasan benua Asia lainnya. Secara keseluruhan, TPT tertinggi terjadi negara-negara yang berada di kawasan Afrika dan Afrika Selatan. Negara Kenya yang berada di kawasan Afrika memiliki TPT tertinggi yaitu 40,0 persen pada tahun 2001. Sedangkan negara Afrika Selatan yang berada di kawasan Afrika Selatan memiliki TPT tertinggi sebesar 25,5 persen pada tahun 2006.

Dari fakta tersebut pada akhirnya menimbulkan sebuah pertanyaan besar, yaitu bahwa meskipun dari segi sumber kekayaan alam negara Indonesia jauh lebih melimpah bila dibandingkan dengan negara-negara lain, namun mengapa tingkat pengangguran di Indonesia justru masih lebih tinggi

dibandingkan dengan negara-negara lain. Apakah karena SDM di Indonesia masih kurang memadai dalam mengelola kekayaan alamnya, apakah karena masalah manajemen pengelolaan alam yang belum tepat, atau mungkin ada sebab-sebab lain. Penelitian dan kajian secara mendalam serta komprehensif berkaitan dengan hal tersebut di atas menjadi sangat diperlukan.

**Tabel 5.9. TPT menurut Beberapa Negara (persen)**

<b>Negara</b>	<b>TPT</b>	<b>Tahun</b>
(1)	(2)	(3)
Malaysia	3,5	2006 <sup>*)</sup>
Brunei Darussalam	4,0	2006
Indonesia	10,3	Agustus 2006 <sup>*)</sup>
Bangladesh	2,5	2006 <sup>*)</sup>
Cina	4,2	2005
India	7,8	2006 <sup>*)</sup>
Pakistan	6,5	2006 <sup>*)</sup>
Vietnam	2,0	2006 <sup>*)</sup>
Jepang	4,1	2006 <sup>*)</sup>
Jerman	7,1	2006 <sup>*)</sup>
Inggris	2,9	2006 <sup>*)</sup>
Perancis	8,7	Desember 2006 <sup>*)</sup>
Italia	6,8	2006 <sup>*)</sup>
Kanada	6,4	2006 <sup>*)</sup>
Algeria	15,7	2006 <sup>*)</sup>
Kamerun	30,0	2001 <sup>*)</sup>
Ghana	20,0	1997 <sup>*)</sup>
Kenya	40,0	2001 <sup>*)</sup>
Maroko	7,7	2006 <sup>*)</sup>
Nigeria	5,8	2006 <sup>*)</sup>
Sudan	18,7	2002 <sup>*)</sup>
Tunisia	13,9	2006 <sup>*)</sup>
Afrika Selatan	25,5	2006 <sup>*)</sup>

Catatan : <sup>\*)</sup> Perkiraan

Sumber: The World Factbook dari <http://id.wikipedia.org/wiki/pengangguran>



# STUDI KUALITATIF TENTANG KETENAGAKERJAAN DI LIMA WILAYAH PENELITIAN

*Pendahuluan* ●

*Gambaran Wilayah Penelitian* ●

*Ketenagakerjaan* ●

*Pemahaman dan Saran Perbaikan Konsep Ketenagakerjaan* ●

6



### 6.1. Pendahuluan

Kajian terhadap aspek ketenagakerjaan yang dilakukan pada tahun 2007 dilengkapi dengan studi mendalam yang dilakukan di 5 (lima ) wilayah penelitian. Studi mendalam tersebut dilakukan untuk menggali informasi dari beberapa informan yang terdiri dari Disnaker, aparat kecamatan, dan nara sumber lainnya serta responden rumah tangga tentang konsep dan kondisi ketenagakerjaan. Seperti diketahui, konsep ketenagakerjaan yang digunakan BPS untuk menyajikan beberapa indikator kunci ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), ada kemungkinan dianggap kurang pas oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, melalui studi mendalam ini diharapkan dapat diperoleh opini masyarakat terkait dengan konsep yang digunakan BPS dan sekaligus tentang kondisi ketenagakerjaan.

*Melalui studi mendalam ini diharapkan dapat diperoleh opini masyarakat terkait dengan konsep ketenagakerjaan yang digunakan BPS*

Penentuan kelima wilayah tersebut dilakukan secara *purposive*, tanpa merujuk kepada suatu metode sampling tertentu, namun mengingat keterbatasan waktu penelitian, jarak dari ibukota provinsi ke wilayah penelitian menjadi pertimbangan. Disamping itu, pertimbangan terhadap jumlah pengangguran yang ada juga dijadikan kriteria penentuan wilayah penelitian.

**Tabel 6.1. Lokasi Penelitian Studi Kualitatif Tentang Ketenagakerjaan**

<b>Provinsi</b>	<b>Kota</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan / Desa</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sumatera Utara	Kota Medan	Medan Johor	Kel. Kuala Bekal
2. Sumatera Barat	Kota Padang	Padang Timur	Kel. Sawahan Timur Kel. Simpang Haru
3. Bali	Kota Denpasar	Denpasar Selatan	Desa Sanur Kauh
4. Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Jekan Raya	Kel. Menteng Kel. Palangka
5. Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Kendari	Kel. Kasilampae

### **6.2. Gambaran Wilayah Penelitian**

#### **6.2.1. Kondisi Geografis**

Kondisi geografis di lima wilayah penelitian (kota) sangat beragam, dari mulai dataran rendah, tanah datar, berbukit dan pantai. Kota Medan merupakan wilayah penelitian yang sebagian besar adalah dataran rendah dengan ketinggian wilayah antara 2,5 - 37,5 meter diatas permukaan laut. Sementara Kota Padang mempunyai ketinggian 0 - 1.853 meter di atas permukaan laut dimana sebagian besar (52,52 persen) merupakan hutan, dan sisanya adalah pemukiman, tempat usaha, perkebunan, dan ladang. Hutan juga merupakan area terluas Kota Palangka Raya dengan kondisi tanah datar dan berbukit dan mempunyai kemiringan kurang dari 40 persen. Sebagian besar wilayah Kota Denpasar merupakan tanah kering, sementara Kota Kendari khususnya Kecamatan Kendari merupakan daerah pantai.

*Kondisi geografis di lima wilayah penelitian sangat beragam, dari mulai dataran rendah, tanah datar, berbukit dan pantai*

Jarak dari ibukota provinsi ke masing-masing wilayah penelitian relatif dekat, karena merupakan salah satu kriteria pemilihan wilayah. Kecamatan Medan Johor misalnya, terletak di sebelah barat daya Kota Medan dengan jarak sekitar 6 km dan dapat ditempuh kurang lebih 30 menit. Lokasi Kecamatan Kendari merupakan kecamatan yang berjarak paling dekat dengan ibukota provinsi. Sementara letak Kelurahan Simpang Haru yang merupakan salah satu kelurahan yang dipilih untuk menjadi lokasi penelitian berada di pusat Kecamatan Padang Timur, letaknya sangat strategis dekat dengan stasiun kereta api, pasar, dan pusat perkantoran.

#### **6.2.2. Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Wilayah**

Meskipun kelima wilayah penelitian berada di kota, namun sebagian besar potensinya bersumber dari pertanian, antara lain perkebunan, tanaman pangan, perikanan, kecuali Kota Palangka Raya. Meski luas wilayah Kota Palangka Raya didominasi oleh hutan, namun mata pencaharian penduduk bertumpu pada perdagangan, bukan kehutanan.

Infrastruktur penting yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran transportasi adalah fasilitas jalan. Kondisi jalan di lima kota wilayah penelitian pada umumnya sudah diaspal sehingga dapat dilalui dengan mudah bagi kendaraan roda empat dan dua. Di Kota Medan misalnya, kondisi jalan utama dari Kota Medan ke Kecamatan Medan Johor, demikian juga antar kelurahan sudah beraspal dengan lebar jalan 4 - 6 meter. Sementara kondisi jalan di Kelurahan Kuala Bekal juga sudah diaspal dengan lebar jalan sekitar 3 meter sehingga dapat dilalui kendaraan umum sampai ke pemukiman penduduk. Permukaan jalan yang sudah diaspal di Kota Padang sekitar 79,40 persen, demikian juga di Kota Kendari sekitar 79 persen.

Keberadaan angkutan umum di Kota Medan beragam mulai dari angkutan mirip mikrolet, ojek bahkan becak motor yang banyak dijumpai di sekitar pusat perbelanjaan. Sementara di Kota Kendari, sepeda motor berperan penting disamping angkutan umum sejenis mikrolet. Mengingat sebagian besar wilayah di Kota Kendari merupakan pantai, maka angkutan laut juga sangat diperlukan dengan tersedianya fasilitas pelabuhan laut. Seperti juga di Kota Palangka Raya, angkutan sungai merupakan angkutan yang paling banyak berperan.

*Mengingat lokasinya yang berada di kota, sarana dan prasarana pendidikan di lima wilayah penelitian pada umumnya sudah memadai bila dilihat dari kuantitasnya.*

Mengingat lokasinya yang berada di kota, sarana dan prasarana pendidikan di lima wilayah penelitian pada umumnya sudah memadai bila dilihat dari kuantitasnya. Keberadaan gedung sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) bahkan perguruan tinggi. Demikian pula dengan fasilitas kesehatan, kelima wilayah penelitian memiliki fasilitas antara lain rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), poliklinik, praktek dokter, praktek bidan, posyandu dan apotik.

Sebagai daerah wisata, tak heran jika Kota Denpasar sangat memperhatikan sarana dan prasarana pariwisata, seperti hotel, biro perjalanan umum, bar, restoran, angkutan wisata, pusat informasi kepariwisataan, obyek wisata, dan *money changer*.

### **6.2.3. Kependudukan dan Perekonomian Penduduk**

Pada tahun 2006, kepadatan penduduk di Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Padang Timur, dan Kecamatan Denpasar Selatan cukup besar, masing-masing adalah 9 ribu per km<sup>2</sup>, 10 ribu per km<sup>2</sup>, dan hampir 5 ribu per km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan ini merupakan yang terendah dibanding tiga kecamatan lainnya. Sebaliknya, kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Timur merupakan yang terpadat dibanding kecamatan lainnya di Kota Padang.

Mata pencaharian utama di lima wilayah penelitian berbeda-beda. Di Kecamatan Medan Johor, sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan dan sektor transportasi. Selebihnya bekerja di sektor industri (pabrik *crude palm oil* terbesar di Provinsi Sumatera Utara) dan sebagai pegawai negeri sipil. Sementara di Kecamatan Padang Timur, dengan pindahnya lokasi bandar udara ke wilayah lain, menyebabkan laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami penurunan, meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih tetap yang tertinggi dibanding sektor yang lain. Perekonomian Kota Denpasar sangat didukung oleh sektor pariwisata dan sektor industri khususnya industri kerajinan. Sementara struktur perekonomian di Kecamatan Kendari mulai tahun 2002 bergeser dari sektor pertanian ke sektor pengangkutan dan komunikasi. Mata pencaharian penduduk di Kota Palangka Raya mayoritas sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil.

*Pindahnya lokasi bandar udara ke wilayah lain menyebabkan laju pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi di Kecamatan Padang Timur mengalami penurunan*

## **6.3. Ketenagakerjaan**

### **6.3.1. Kondisi Ketenagakerjaan**

Di Kota Medan, jumlah penduduk yang bekerja selama periode 2005-2006 mengalami penurunan hingga menjadi sekitar 756 ribu, sebaliknya jumlah penganggur meningkat. Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Padang sedikit meningkat, yaitu dari 58,68 persen menjadi 58,94 persen, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) meningkat menjadi 78,05 persen, dan Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) turun dari 22,43 persen menjadi 21,95 persen.

Sementara TPAK di Kota Kendari mengalami penurunan, dari 56,62 persen pada tahun 2005 menjadi 52,50 persen (2006). TPT juga turun selama periode yang sama, dari 24,64 persen menjadi 19,60 persen. Bila TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, sebaliknya TPT laki-laki lebih rendah dibanding perempuan.

Menurut data Disnaker Kota Denpasar, pada tahun 2006 tercatat 4.224 orang pencari kerja yang belum ditempatkan. Struktur umur pencari kerja didominasi mereka yang berumur 20-29 tahun yaitu sekitar 46,92 persen. Bila dilihat tingkat pendidikan pencari kerja, sebagian besar (43,42 persen) merupakan pencari kerja dengan pendidikan sarjana. Sementara di Kota Palangka Raya, jumlah pencari kerja yang memiliki kartu kuning pada tahun 2006 tercatat 9.142 orang, dengan mayoritas berpendidikan SLTA. Jumlah pencari kerja di Kota Medan selama Mei 2007 menurut Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1.381 orang, dimana sekitar 78,28 persen sudah ditempatkan dalam bulan yang sama. Mayoritas pencari kerja berpendidikan SLTA atau sederajat, namun ada juga lulusan diploma dan sarjana. Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi antara lain, jumlah pencari kerja lebih banyak dari lowongan kerja yang tersedia, tingkat pendidikan pencari kerja yang rendah, dan keselamatan kerja yang kurang mendapat perhatian.

### **6.3.2. Program Ketenagakerjaan**

Jenis-jenis program ketenagakerjaan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di lima wilayah penelitian secara garis besar pada umumnya sama, yaitu utamanya bertujuan untuk mengatasi masalah pengangguran. Sebagai contoh, Disnaker Kota Palangka Raya mempunyai tiga program, yaitu : (1) perluasan dan pengembangan kesempatan kerja melalui pembukaan usaha padat karya terutama di perdesaan, (2) peningkatan kualitas dan produktivitas melalui pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK), (3) pengembangan kelembagaan melalui pelatihan bagi tenaga kerja yang sudah bekerja. Sedikit berbeda dengan program ketenagakerjaan Disnaker Kota Denpasar, yaitu pada program ketiga : memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dan pembinaan terhadap

*Jenis-jenis program ketenagakerjaan yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di lima wilayah penelitian secara garis besar pada umumnya sama, yaitu utamanya bertujuan untuk mengatasi masalah pengangguran.*

pengusaha dan tenaga kerjanya, sementara program kesatu dan kedua sama dengan program ketenagakerjaan Disnaker Kota Palangka Raya.

Berbicara tentang tugas Disnaker, pada intinya sama di lima wilayah penelitian, yaitu : (1) memberikan pelayanan pembuatan kartu kuning kepada para tenaga kerja yang siap bekerja, (2) mendata seluruh perusahaan swasta dan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), (3) menyebarluaskan jenis kegiatan kursus/ketrampilan, (4) mengumumkan lowongan kerja baik di instansi pemerintah maupun institusi swasta.

### **6.3.3. Peran Balai Latihan Kerja**

Pada umumnya Balai Latihan Kerja (BLK) berperan sebagai kepanjangan tangan dari Disnaker, bertugas memberi kursus/ketrampilan kepada para pencari kerja. Peserta kursus/ketrampilan diutamakan bagi mereka yang memiliki "kartu kuning" atau mereka yang berusia 17 tahun keatas, yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu masyarakat umum, buruh/karyawan, dan kalangan terbatas (sesuai dengan permintaan suatu organisasi atau instansi). BLK biasanya bekerja sama dengan instansi pemerintah dan institusi swasta dalam membina dan menyalurkan tenaga kerja yang siap pakai.

Sumber dana pelatihan di BLK berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bantuan luar negeri maupun institusi dalam negeri. Biasanya dana APBN dan APBD digunakan untuk pelatihan para pencari kerja, dana institusi dalam negeri atau perusahaan digunakan untuk pelatihan staf/pekerja di perusahaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan.

*Sumber dana pelatihan di BLK berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bantuan luar negeri maupun institusi dalam negeri.*

Rekrutmen pencari kerja yang akan mengikuti pelatihan di BLK dilakukan dengan menyebarluaskan informasi jenis-jenis pelatihan lewat pengumuman di kantor kelurahan, kecamatan dan Disnaker. Namun di Kota Padang, rekrutmen tenaga kerja yang ikut pelatihan diperoleh melalui Bursa Tenaga Kerja *Job fair* yang diselenggarakan tiap tahun oleh Disnaker Provinsi Sumatera Barat.

Bagi peserta pelatihan yang dinyatakan lulus, BLK akan memberikan sertifikat lulus, dan membantu menyalurkan peserta kursus untuk bekerja di perusahaan yang membuka lowongan kerja. Setiap lulusan pelatihan di BLK Kota Kendari diharapkan mampu berpartisipasi mengatasi permasalahan ketenagakerjaan baik yang terkait dengan dirinya sendiri maupun sesama pencari kerja lainnya. Sementara Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata (BLK-IP) Bali bekerja sama dengan bursa kerja menjalin kemitraan dengan 16 perusahaan melalui pembentukan Jejaring Info Ketenagakerjaan.

#### **6.4. Pemahaman dan Saran Perbaikan Konsep Ketenagakerjaan**

##### **6.4.1. Pemahaman Responden Rumah Tangga**

Rumah tangga yang dijadikan responden dalam studi mendalam ini ada 10 rumah tangga di setiap kelurahan terpilih. Dari rumah tangga terpilih, selanjutnya dilakukan wawancara terhadap seluruh anggota rumah tangga yang berusia di atas 15 tahun.

Dalam studi ini, para responden rumah tangga diwawancarai mengenai pemahaman konsep ketenagakerjaan yang digunakan BPS dalam melaksanakan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Secara umum, para responden cenderung kurang pas dengan konsep BPS antara lain mengenai jumlah minimal jam kerja yang dijadikan batasan 'bekerja', dan penghasilan utama.

Di Kelurahan Sawahan Timur, dengan jumlah responden berusia 15 tahun keatas sebanyak 45 orang menyatakan setuju dengan konsep BPS tentang tujuan bekerja yaitu semua usaha yang dilakukan untuk memperoleh/membantu memperoleh penghasilan/keuntungan. Sementara mengenai batasan waktu bekerja yang digunakan BPS yaitu melakukan pekerjaan selama paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu, disetujui oleh sekitar 31,1 persen, sisanya (68,9 persen) menyatakan batasan bekerja bila dilakukan lebih dari 1 jam. Selanjutnya, sebagian besar responden (91,1 persen) menyatakan bahwa cakupan

bekerja adalah sektor formal dan informal, sisanya (8,9 persen) menyatakan bahwa hanya mereka yang bekerja di sektor formal yang dapat dikatakan bekerja.

Dari 30 orang responden yang berusia 15 tahun keatas di Kelurahan Menteng dan Kelurahan Palangka menyatakan bahwa mereka selalu mengartikan bahwa bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan. Jadi mereka yang bekerja namun sifatnya hanya membantu tidak dianggap sebagai bekerja. Konsep penghasilan utama, menurut mereka didasarkan dari pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar. Pemahaman responden mengenai jam kerja adalah mulai dari berangkat kerja hingga pulang kembali ke rumah tanpa memperhitungkan waktu istirahat. Sementara untuk upah/gaji yang diterima, hanya yang berupa uang tidak termasuk dalam bentuk barang.

Sebagian besar responden di Kelurahan Kasilampae menganggap bahwa bekerja adalah mereka yang bekerja di kantor dengan mendapat penghasilan yang tetap dan jam kerja yang teratur. Pekerja keluarga tidak dapat disebut bekerja, karena mereka hanya membantu dan tidak mendapatkan upah. Demikian juga tidak termasuk mereka yang bekerja dengan jam kerja tidak beraturan (hanya musiman), karena penghasilannya tidak tetap. Konsep pekerjaan utama tidak dilihat dari jumlah jam kerja terbanyak namun dari penghasilan terbesar.

*Konsep penghasilan utama menurut beberapa responden didasarkan dari pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar*

Pemahaman tentang tujuan bekerja, pekerja keluarga, pekerjaan utama oleh responden di Kelurahan Kuala Bekal juga sama dengan responden di Kelurahan Kasilampae, pemahaman mereka cenderung berbeda dengan konsep yang selama ini digunakan oleh BPS.

### **6.4.2. Perbedaan Konsep Ketenagakerjaan**

Ada berbagai tanggapan yang beragam dari para informan (Disnaker, BLK, dan lain-lain) ketika ditanyakan tentang perbedaan konsep ketenagakerjaan yang digunakan BPS. Disnaker Kota Denpasar dan Kota Kendari menyatakan bahwa data ketenagakerjaan yang digunakan selama ini

bersumber dari BPS, mereka sudah memahami konsep BPS, sehingga tidak ada permasalahan perbedaan konsep. Data yang dihasilkan Disnaker hanya sebagai data penunjang yang diperoleh dari registasi.

Demikian pula menurut penjelasan ibu Rosalina Majid, BA dari Disnaker Kota Medan, bahwa data ketenagakerjaan diperoleh dari BPS, sehingga tidak ada masalah perbedaan konsep. Namun, untuk konsep sektor informal, Disnaker mengartikan mereka yang bekerja tanpa mensyaratkan tingkat pendidikan atau ketrampilan khusus, termasuk pengaturan uang yang jelas. Beberapa jenis pekerjaan yang termasuk dalam sektor informal, antara lain : pembantu rumah tangga, ojek, tukang becak, industri kecil dan rumah tangga, dan pedagang keliling.

Sementara, penjelasan Disnaker Kota Palangka Raya antara lain tentang penghitungan jumlah penganggur didasarkan dari jumlah kartu kuning yang dikeluarkan. Batasan pekerja anak tidak termasuk mereka yang bekerja hanya bertujuan untuk memperoleh pengalaman bekerja meskipun mereka dibayar.

### **6.4.3. Saran untuk Perbaikan Sakernas**

Meskipun konsep ketenagakerjaan yang digunakan BPS sudah merujuk pada *International Labour Organization (ILO)*, namun beberapa konsep seperti jam kerja, sektor informal masih sering dipertanyakan. Konsep minimal jam kerja yang dijadikan batasan bekerja, yaitu minimal satu jam berturut-turut selama seminggu yang lalu perlu dikaji lagi, mungkin mengacu pada jam kerja pegawai kantoran yaitu 8-10 jam sehari. Saran ini diperoleh dari wawancara dengan Disnaker Kota Padang.

Disnaker Kota Denpasar menyatakan dari muatan pertanyaan yang ada dalam kuesioner sudah tidak ada permasalahan. Namun disarankan untuk lebih cermat dalam rekrutmen petugas pengumpul data, mereka harus menguasai materi kuesioner sehingga dapat melakukan *probing* dengan responden pada waktu wawancara.

Mengingat konsep bekerja belum dipahami dengan baik oleh para informan baik institusi maupun rumah tangga, maka batasan minimal satu jam perlu dikaji lagi, karena jumlah jam kerja terlalu sedikit. Pertanyaan dalam kuesioner terkait dengan 'bekerja' perlu ditambah dengan pertanyaan berikut : " Apakah (NAMA) juga bekerja untuk mendapat bayaran uang atau barang, atau tanpa bayaran tapi membantu menambah penghasilan ? Atau berjualan, mempunyai usaha kecil, membantu di pertanian atau usaha keluarga ?".

*Mengingat konsep bekerja belum dipahami dengan baik oleh para informan baik institusi maupun rumah tangga, maka batasan minimal satu jam perlu dikaji lagi, karena jumlah jam kerja terlalu sedikit.*

<https://www.bps.go.id>

# LAMPIRAN

## HASIL STUDI KUALITATIF

### TENTANG KETENAGAKERJAAN

Editor : Sri Indrayanti  
Lestyowati Endang W

Penulis : Sofaria Ayuni  
Indah Budiati  
Windhiarso PA  
Ema Tusianti  
Adwi Hastuti

## Kota Medan - Sumatera Utara

### 1. Gambaran Wilayah Penelitian

#### 1.1. Keadaan Geografis

Salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera adalah Kota Medan, letaknya berada di bagian Barat Indonesia. Sebagai ibukota dari Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan pusat pemerintahan Daerah Tingkat I dan merupakan salah satu dari 25 Daerah Tingkat II yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan memiliki luas wilayah 265,10 km<sup>2</sup>, terletak pada posisi 2°27<sup>1</sup> sampai dengan 2°47<sup>1</sup> Lintang Utara dan 98°35<sup>1</sup> sampai dengan 98°44<sup>1</sup> Bujur Timur. Keadaan tanah di wilayah ini sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian wilayah antara 2,5 meter sampai 37,5 meter di atas permukaan air laut, yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli.

Wilayah Kota Medan berbatasan atau dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan PP No. 2 Tahun 1973 beberapa bagian dari Kabupaten Deli Serdang masuk menjadi wilayah Kota Medan dan kemudian berdasarkan Surat Persetujuan Mendagri No. 140/2271/PUOD Tanggal 5 Mei 1986, jumlah kecamatan di Kota Medan menjadi 11 kecamatan dan 114 kelurahan. Dan berdasarkan SP Mendagri tersebut, maka terbentuklah Kecamatan Medan Johor dan masuk dalam wilayah Kota Medan. Terakhir melalui PP No. 59 Tahun 1991 beberapa kecamatan di Sumatera Utara termasuk 8 kecamatan di Kota Medan mengalami pemekaran. Secara administrasi berdasarkan perkembangan terakhir Surat Keputusan Gubernur No. 140.22/2772.K/1996, Pemerintahan Kota Medan terbagi menjadi 21 kecamatan, 151 kelurahan dan 2.000 dusun.

Secara *purposive* terpilihlah Kota Medan sebagai wilayah penelitian studi mendalam karena selain sebagai ibukota provinsi, juga sekaligus sebagai pusat kegiatan perekonomian. Dari kecamatan yang ada di Kota Medan maka secara *purposive* pula dipilihlah Kecamatan Medan Johor sebagai wilayah penelitian yang terletak di sebelah Barat Daya dari pusat Kota Medan yang berjarak kurang lebih 5 km dari pusat Kota Medan. Untuk sampai ke wilayah ini diperlukan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Kecamatan Medan Johor secara administratif memiliki luas wilayah 12,51 km<sup>2</sup> atau sekitar 4,83 persen dari luas wilayah Kota Medan.

#### 1.2. Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Wilayah

Salah satu sarana yang amat menunjang bagi kelancaran roda perekonomian suatu wilayah/daerah adalah jalan. Semakin meningkat kegiatan pembangunan suatu wilayah, peningkatan pembangunan jalan juga diprioritaskan guna lebih memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus pengangkutan dan perdagangan di wilayah tersebut. Jalan utama dari ibukota Kota Medan menuju Kecamatan Medan Johor dan jalan utama antar kelurahan semuanya terbuat dari aspal dengan lebar antara 4-6

meter sehingga dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Akses keluar masuk ke wilayah ini cukup mudah dan lancar karena dilalui oleh kendaraan umum (sejenis mikrolet), walaupun keberadaannya agak jarang ditemui, namun tersedia angkutan ojek yang cukup banyak dengan biaya sewa sekitar Rp 5.000,- untuk jarak kurang lebih 1 km. Sedangkan becak motor banyak dijumpai di dekat pusat-pusat perdagangan seperti pasar.

Sementara kondisi jalan di Kelurahan Kuala Bekal, salah satu kelurahan yang terpilih dalam studi mendalam ini, juga sudah terbuat dari aspal dengan lebar jalan sekitar 3 meter dan dapat dilalui oleh dua mobil sehingga angkutan umum dapat masuk sampai ke pemukiman penduduk. Namun untuk mencapai pemukiman penduduk yang letaknya agak ke dalam yang tidak dilalui kendaraan umum, tetap dapat dilalui oleh kendaraan roda dua atau roda empat atau dengan berjalan kaki.

Lahan persawahan dan ladang masih dapat ditemui di wilayah Kecamatan Medan Johor, yaitu berupa lahan sawah lebak/rawa dan sawah tadah hujan. Sedangkan ladang atau lahan kering yang masih banyak ditemui, sebagian besar adalah lahan kebun dan pekarangan, karena jarak antara rumah yang satu dengan yang lainnya cukup luas dipisahkan oleh pekarangan dan hampir seluruh rumah penduduk memiliki pekarangan yang cukup luas. Kondisi ini memungkinkan penduduk untuk melakukan penghijauan dengan menanam tanaman buah-buah seperti jambu, mangga, rambutan dan nangka.

Fasilitas lain yang ada di Kecamatan Medan Johor adalah gedung sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SLTA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi yang dikelola oleh suatu yayasan. Selain itu juga tersedia fasilitas kursus/les (Bahasa Inggris, Matematika) dan bimbingan belajar. Sementara untuk fasilitas kesehatan yang tersedia antara lain puskesmas, praktek dokter, praktek bidan dan apotik. Fasilitas tersebut sangat mudah dijangkau oleh penduduk yang tinggal di kelurahan tersebut karena letaknya yang sangat strategis dan dilalui oleh kendaraan umum seperti angkutan kota dan ojek.

Kecamatan Medan Johor tak ubahnya seperti kota-kota pada umumnya, cukup ramai, apalagi di wilayah ini terdapat perguruan tinggi swasta yang cukup terkenal, sehingga aktivitas dan kegiatan warganya cukup sibuk bahkan sulit untuk ditemui pada jam-jam kerja/jam sibuk, karena kebanyakan dari mereka adalah pekerja, baik kepala rumah tangga (KRT) maupun ibu rumah tangga. Sebagai wilayah yang dekat dengan ibukota provinsi, daerah ini termasuk daerah yang ramai sebagai pusat perdagangan.

### **1.3. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2005 tercatat sebanyak 2.036.185 jiwa dan pada tahun 2006 tercatat sebanyak 2.067.288 jiwa. Mayoritas penduduk di Kota Medan adalah suku asli daerah setempat (Melayu dan Batak), tetapi ada juga penduduk pendatang dari pulau/provinsi lain.

Di Kecamatan Medan Johor, berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Kota Medan tahun 2000-2010, pada tahun 2006 berjumlah 113.593 jiwa atau sekitar 5,49 persen dari jumlah penduduk Kota Medan dengan kepadatan penduduk sekitar 9.080 jiwa per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk laki-laki tercatat 56.983 jiwa dan sisanya 56.610 jiwa perempuan. Maka rasio jenis kelamin Kecamatan Medan Johor adalah 100,66 artinya banyaknya penduduk laki-laki hampir seimbang dibanding perempuan. Sementara banyaknya rumah tangga di kecamatan ini 25.021, jadi setiap rumah tangga rata-rata memiliki anggota rumah tangga (ART) sebanyak 4-5 orang.

#### **1.4. Kegiatan Perekonomian Penduduk**

Menurut tokoh masyarakat setempat sebagian besar penduduk di wilayah Kecamatan Medan Johor banyak yang menggantungkan hidupnya pada sektor Perdagangan dan Transportasi/Angkutan. Banyaknya pekerja di sektor ini karena wilayahnya yang dekat dengan ibukota provinsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi/angkutan seperti sopir dan tukang becak motor yang cukup banyak ditemui di dekat pasar. Selain sebagai pusat perdagangan dan transportasi, wilayah ini juga memiliki perusahaan industri besar, salah satunya adalah industri *crude palm oil* (cpo) yang terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Selain industri, penduduk yang bekerja di sektor Jasa Kemasyarakatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga banyak ditemui.

Meskipun Kecamatan Medan Johor adalah daerah perkotaan yang lokasinya dekat dengan pusat kota Medan, ternyata masih juga dapat ditemui rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada sektor Pertanian, walaupun jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 8 persen. Mereka yang bekerja di sektor ini umumnya sebagai petani dengan sistem bagi hasil, walaupun ada pula yang menjadi petani penggarap. Sebagian warga di wilayah ini memiliki lahan pertanian (sawah/ladang) di kelurahan/kecamatan lain yang kemudian dikerjakan oleh pihak lain, sehingga hanya sebulan sekali mereka mendatangi lahannya, terlebih saat hendak melakukan panen raya.

Menurut informasi di lapangan tingkat pengangguran di wilayah ini cukup rendah, yaitu sekitar 12 persen dari angkatan kerja. Rendahnya angka ini karena pada umumnya orang Medan terkenal giat bekerja dan ulet dalam berusaha, bahkan sejak kecil sudah ditanamkan jiwa mandiri, sehingga tidak malu jika harus bekerja melakukan apa saja.

Dari tabel berikut terlihat bahwa di Kecamatan Medan Johor terdapat 20 perusahaan berskala besar/sedang, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 1.656 orang. Selain itu, di wilayah ini juga banyak ditemui industri kecil yang tercatat sebanyak 12 perusahaan.

**Tabel 1.1. Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja menurut Kelompok Industri di Kecamatan Johor Baru, Tahun 2006**

<b>Kelompok Industri</b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>	<b>Tenaga Kerja</b>
(1)	(2)	(3)
Industri Besar/Sedang	20	1.656
Industri Kecil	-	-
- Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Logam	2	18
- Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	8	25
- Industri Kimia	2	10

Sumber : Disnaker Kota Medan

## 2. Ketenagakerjaan

Dalam era otonomi daerah, tantangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang ketenagakerjaan adalah melakukan analisis situasi, merencanakan, serta memonitor proses pembangunan yang bertumpu pada ketenagakerjaan. Ini artinya model pembangunan yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja dilakukan tanpa diskriminatif. Program dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah harus dapat memberikan informasi dan memiliki kemampuan dan kepekaan yang memadai untuk melihat kemungkinan adanya dampak negatif setiap kebijakan atau program terhadap bidang ketenagakerjaan. Dalam kaitan ini, semacam sistem informasi ketenagakerjaan akan sangat membantu sebagai alat bagi pengambil kebijakan.

Tingginya angka pengangguran merupakan salah satu indikator adanya masalah yang sangat mendasar dengan ketenagakerjaan di Kota Medan. Bahkan dapat dikatakan bahwa masalah ketenagakerjaan di kota ini sangat besar dan kompleks, karena masalah tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Faktor itu antara lain faktor demografis dan faktor komposisi angkatan kerja. Struktur penduduk di kota ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan penduduk usia kerja/usia produktif jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Fakta ini memberi gambaran adanya tekanan yang kuat terhadap sisi penyediaan tenaga kerja.

Pencari kerja di Kota Medan tidak hanya penduduk asli saja, tetapi banyak juga tenaga kerja asing yang mencari kerja di Kota Medan. Dari data Disnaker diperoleh informasi bahwa pada tahun 2005, Disnaker telah mengeluarkan surat permohonan ijin bagi 156 orang tenaga kerja asing, dan pada tahun 2006 telah meningkat menjadi 227 surat ijin yang dikeluarkan Disnaker Kota Medan. Para tenaga kerja asing ini bekerja pada sektor Pertanian, sektor Industri, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Jasa-jasa. Pada tahun 2005 perusahaan-perusahaan di Kota Medan yang

menggunakan tenaga kerja asing ada sebanyak 78 perusahaan dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 119 perusahaan.

Dari Disnaker juga diperoleh data tentang banyaknya Bina Kelompok Kerja/Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta (BKK/LPTKS), yaitu ada sebanyak 75 unit. BKK/LPTKS ini merupakan mitra dari Disnaker dalam menyalurkan tenaga kerja di dalam negeri, khususnya tenaga kerja yang ada di Kota Medan. Penyaluran tenaga kerja oleh BKK/LPTKS tidak hanya di Kota Medan saja tetapi sampai ke Batam, Riau dan daerah lainnya.

Berikut disajikan data tentang ketenagakerjaan Kota Medan pada tahun 2005 dan 2006.

**Tabel 2.1. Data Ketenagakerjaan Kota Medan, Tahun 2005 dan 2006**

<b>Uraian</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
(1)	(2)	(3)
Jumlah Tenaga Kerja	1.408.150	1.466.248
Jumlah Bukan Tenaga Kerja	617.200	619.294
Jumlah Angkatan Kerja	842.720	846.954
Jumlah Penduduk Bekerja	673.019	682.380
Jumlah Pengangguran/Pencari Kerja	169.701	189.475
Jumlah Bukan Angkatan Kerja	564.430	563.624
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	73.429	22.886
Lowongan Pekerjaan	14.627	7.627
Penempatan	14.627	7.627
Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA)	78	119
Jumlah TKA	156	227
Jumlah Penyalur Jasa Kerja Indonesia (PJKI)	75	75
Jumlah BKK/LPTKS (Bina Kelompok Kerja/Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta)	30	35

Sumber : Dinaker Kota Medan, 2005-2006

## 2.1. Kondisi Ketenagakerjaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sumatera Utara, jumlah Angkatan Kerja pada kondisi Agustus 2006 sebanyak 889.352 jiwa, terdiri dari penduduk yang bekerja 755.882 jiwa dan 133.470 jiwa merupakan gabungan dari penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan penduduk yang tidak bekerja (pengangguran terbuka), yang disajikan pada Tabel 2.2. Dari penduduk yang bekerja, sebagian besar bekerja

pada sektor Perdagangan, karena sektor ini tidak menuntut persyaratan tingkat pendidikan yang tinggi, bahkan kebanyakan mereka hanya berpendidikan SMP ke bawah.

**Tabel 2.2. Penduduk Kota Medan yang berumur 15 Tahun Ke Atas dan Jenis Kegiatan Seminggu yang lalu, Tahun 2005 dan 2006**

Tahun	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2005	819 161	116 557	935 718	462 748	1 398 466
2006	755 882	133 470	889 352	540 142	1 429 494

Sumber : Kota Medan Dalam Angka, 2005-2006

Jika dilihat berdasarkan jumlah pencari kerja yang terdaftar di Disnaker, pencari kerja perempuan lebih banyak (52.133 orang) dibanding laki-laki (21.316 orang). Sementara dari seluruh pekerja yang telah ditempatkan, perempuan 76,35 persen dan laki-laki hanya 39,11 persen, sehingga sisanya yang belum ditempatkan sampai dengan tahun 2005 merupakan pengangguran. Untuk pencari kerja yang berpendidikan Sarjana, pada tahun 2005 untuk laki-laki terdaftar sebanyak 103 orang dan perempuan sebanyak 113 orang. Tetapi untuk laki-laki, tidak ada satupun yang ditempatkan, dan perempuan hanya 10 orang yang telah ditempatkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2.3. Jumlah Pencari Kerja menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, Tahun 2005**

Tingkat Pendidikan	Pencari Kerja Yang Terdaftar pada Tahun 2005		Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan pada Tahun 2005		Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan s.d. Tahun 2005	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	0	0	18	50	118	260
SLTP	1 213	2 018	2 832	17 220	2 218	1 658
SLTA	20 000	49 982	5 487	22 496	3 860	1 593
Sarjana	103	113	0	10	6 761	8 826
Jumlah	21 316	52 113	8 337	39 776	12 975	12 337

Sumber : Disnaker Kota Medan, 2005

Jumlah pencari kerja di Kota Medan selama bulan Mei tahun 2007 tercatat sebanyak 1.381 orang dan yang sudah ditempatkan atau disalurkan sebanyak 1.081 orang. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, pencari kerja terbanyak berada pada kelompok umur produktif yaitu kelompok umur 20-29 tahun dan 30-44 tahun. Tetapi

pada kelompok usia 55 tahun ke atas ternyata masih ada penduduk yang mencari kerja, walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali yaitu hanya 8 orang, dan sampai akhir bulan Mei 2007 pekerja pada kelompok umur tersebut belum ditempatkan/dialurkan.

**Tabel 2.4. Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar menurut Kelompok Umur, Pada Bulan Mei 2007**

Kelompok Umur	Pencari kerja yang belum ditempatkan sampai akhir bulan lalu	Pencari kerja yang terdaftar dalam bulan ini	Pencari kerja yang ditempatkan dalam bulan ini	Pencari kerja yang dihapuskan dalam bulan ini	Pencari kerja yang belum ditempatkan sampai akhir bulan ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15 – 19	1.860	112	91	0	1.881
20 – 29	8.773	1.065	594	0	9.243
30 – 44	2.847	204	396	0	2.655
45 - 54	677	0	0	0	677
55 ke atas	8	0	0	0	8
Jumlah	14.164	1.381	1.081	0	14.464

Sumber : Disnaker Kota Medan, 2007

Jika dilihat menurut status pekerjaan, dari 20 responden yang bekerja, 6 responden bekerja dengan status berusaha sendiri (membuka warung, tukang ojek, supir, becak motor milik sendiri, membuka usaha praktek bidan dan mempunyai usaha pertanian dengan sistim bagi hasil). Sementara 14 orang bekerja sebagai buruh/karyawan (guru negeri, guru honorer, teknisi di perusahaan swasta, buruh pabrik dan pegawai di suatu yayasan pendidikan).

Responden yang bekerja sebagai buruh/karyawan mempunyai jumlah jam kerja yang cukup teratur dalam seminggu, yaitu antara 40-48 jam, sedangkan pekerja yang berstatus berusaha sendiri, mempunyai jumlah jam kerja lebih lama dari buruh/karyawan, yaitu paling sedikit 48 jam hingga 90 jam dalam seminggu.

Besarnya pendapatan yang diterima oleh responden yang bekerja dengan status berusaha sendiri menyatakan bahwa pendapatan mereka setiap bulan tidak menentu, yaitu berkisar antara Rp. 600.000,- hingga Rp 1.200.000,-. Bahkan ada responden yang mempunyai usaha praktek bidan dengan rata-rata mempunyai pendapatan mencapai Rp. 2.500.000,- sebulan. Sementara responden yang bekerja sebagai buruh/karyawan, memiliki penghasilan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bagi buruh/karyawan swasta, penghasilan mereka sudah di atas Upah Minimum Regional (UMR) Kota Medan. Tetapi bagi buruh yang bekerja di Industri Kecil/Industri Rumah Tangga, upah yang mereka terima masih jauh dibawah UMR yang berlaku di Kota Medan, yaitu antara Rp. 300.000,- hingga Rp. 500.000,- setiap bulannya. Besarnya UMR yang ditetapkan di Kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.5. Upah Minimum Regional Kota Medan menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2006 (rupiah)**

Sektor	2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	563 850	802 500	877 400
2. Pertambangan/Penggalian	537 000	0	902 000
3. Industri	660 000	802 500	861 000
4. Listrik, Gas, dan Air Minum	537 000	817 500	861 000
5. Bangunan/Konstruksi	660 000	825 000	902 000
6. Perdagangan, Hotel, Restoran	642 000	795 000	861 000
7. Angkutan	642 000	802 500	877 000
8. Bank dan Lembaga Keuangan	660 000	825 000	902 000
9. Jasa Lainnya	537 000	825 000	861 000

Sumber : Disnaker Kota Medan, 2007

## 2.2. Program Ketenagakerjaan

Informasi yang diperoleh dari Disnaker Kota Medan menyatakan bahwa tugas dari Disnaker adalah memberikan pelayanan pembuatan kartu kuning kepada para tenaga kerja yang siap untuk bekerja, mengeluarkan surat ijin bekerja bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja di Kota Medan dan mendaftarkan seluruh perusahaan swasta dan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang ada di Kota Medan. Dengan pembuatan kartu kuning tersebut sekaligus dapat mencatat dan mengidentifikasi para pencari kerja. Berdasarkan keterangan dari Ibu Rosalina, selaku Kasubdit Pusat Data dan Informasi Disnaker, mayoritas pencari kerja berpendidikan SLTA/ sederajat, kemudian diikuti oleh Diploma dan Sarjana Strata I. Disnaker juga berkewajiban memberi informasi tentang lowongan kerja di instansi pemerintah/perusahaan swasta kepada masyarakat, dengan cara menempelkan pengumuman lengkap di papan pengumuman Disnaker. Informasi tersebut juga dilaporkan ke Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI). Bagi pencari kerja yang berminat dapat langsung mendaftar ke Disnaker.

Selama ini Disnaker hanya memantau dan mencatat para pencari kerja di wilayahnya, tidak berwenang memberikan pelatihan/kursus kepada calon pencari kerja, karena yang memiliki wewenang ini adalah Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai kepanjangan tangan dari Disnaker. Selain memiliki dana, BLK juga diberi tanggung jawab untuk memberikan pelatihan/kursus kepada tenaga kerja. Selain itu, Disnaker juga melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun perusahaan swasta dalam membina dan menyalurkan tenaga kerja yang profesional dan siap pakai. Kerja sama tersebut antara lain dengan Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Dinas Pertanian, serta perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki dana untuk memberikan pelatihan/kursus keterampilan bagi calon tenaga kerja. Bagi peserta kursus yang telah lulus diberikan sertifikat tanda kelulusan.

Pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh BBLKI, instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan swasta menurut keterangan dari Ibu Rosalina diutamakan bagi calon tenaga kerja yang sudah memiliki kartu kuning atau mereka yang berusia 17 tahun ke atas. Hal ini mengikuti persyaratan perusahaan pada umumnya yang membutuhkan tenaga kerja berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah memiliki KTP. Perusahaan tidak mau mempekerjakan pekerja anak atau calon tenaga kerja di bawah umur.

Disnaker setiap tahun memiliki anggaran untuk meningkatkan SDM bagi pegawainya termasuk pegawai BLK. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan diklat/kursus-kursus yang dapat menambah keterampilan dan pengetahuan bagi pegawainya, selain itu juga memberi kesempatan bagi pegawai yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan. Selama ini yang menjadi permasalahan mengenai ketenagakerjaan di wilayah ini menurut Disnaker adalah :

- (1) Pencari kerja lebih banyak dari lowongan kerja yang tersedia
- (2) Tingkat pendidikan atau SDM yang rendah
- (3) Tingkat keselamatan kerja

### **2.3. Peran Balai Latihan Kerja (BLK)**

BLK yang ada di Kota Medan hanya satu yaitu Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Medan, yang berada di bawah Disnaker. BBLKI Medan memiliki program kerja dan filosofi dalam bekerja yaitu 5 S (Sisih, Susun, Sasap, Sosoh, dan Suluh) yang mempunyai tujuan sebagai berikut :

- (1) Produksi meningkat
- (2) Kualitas tinggi
- (3) Cost rendah
- (4) *Delivery* tepat waktu
- (5) *Safety* terjamin
- (6) Moral Tinggi

Agar tercapai program dan tujuan yang diharapkan, BBLKI Kota Medan memiliki komitmen yang disebut 3 AS yaitu :

- Kerja Cerdas : semua karyawan BBLKI harus bekerja dengan cerdas, untuk itu pegawai BLK harus terus berkembang dan menambah pengetahuan dan keterampilan.
- Bakti Ikhlas : dalam memberikan pelatihan/kursus harus ikhlas demi kemajuan peserta, tidak boleh ada yang disembunyikan dan harus menjalin hubungan kekeluargaan.

- Pelatihan Puas : dengan instruktur yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas di dukung dengan kerja yang ikhlas kepada peserta diharapkan peserta pelatihan akan puas.

Sebagai salah satu wadah kegiatan pelatihan di wilayah Kota Medan, BBLKI memfokuskan pada kegiatan pelatihan/kursus di bidang industri dan teknik. Selain itu juga melakukan kerja sama dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta atau organisasi/kelompok. BBLKI juga menerima pesanan atau order dari luar dalam bidang industri untuk mengerjakan suatu kegiatan seperti menerima pesanan untuk membuat alat cetakan/plat, bubut atau membuat mesin/alat tertentu.

Setiap tahun BBLKI juga harus membuat suatu program kerja dan modul bagi penyelenggaraan pelatihan/kursus. Program dan modul tersebut selalu diperbaharui, diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Kota Medan. Untuk itu perlu dibuat suatu rancangan kursus-kursus dan keterampilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan fasilitas di BBLKI, seperti ruang kelas, ruang bengkel kerja, peralatan, instruktur dan dana yang tersedia. Rancangan keterampilan yang diselenggarakan oleh BBLKI ini harus berbasis kompetensi. Adapun pelatihan/kursus yang telah diadakan oleh BBLKI selama tahun 2006 dan 2007 (sampai dengan Bulan Juni) antara lain ; kursus otomotif, kursus bubut, kursus perbengkel dan mesin, kursus elektronika, kursus industri pengolahan makanan.

Peserta pelatihan/kursus di BBLKI Kota Medan dibedakan atas :

1. *Untuk Masyarakat Umum :*

Pelatihan/kursus ini sesuai dengan program yang telah dibuat oleh BBLKI. Tujuannya untuk memberikan keterampilan bagi masyarakat, khususnya bagi pemuda yang baru pertama kali akan bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, atau yang ingin memiliki suatu keterampilan. Pelatihan/kursus ini dibuka untuk umum dengan lamanya waktu kursus minimal 3 bulan dan maksimal 8 bulan, dengan sumber dana berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga peserta dibebaskan dari biaya pelatihan/kursus, pelatihan/kursus tetap berjalan meskipun jumlah peserta kurang dari target yang ditentukan.
- b. Peserta pelatihan/kursus. Pelatihan/kursus tersebut biasanya adalah untuk kursus lanjutan atau yang tingkatannya lebih tinggi, tetapi tersedia juga kursus tingkat dasar yang kemungkinan banyak diminati oleh masyarakat. Untuk kursus yang biayanya ditanggung oleh peserta tidak dibatasi oleh umur, tetapi harus memenuhi jumlah minimal peserta. Jika pesertanya banyak, maka biaya akan semakin murah. Namun jika peserta kurang dari batas yang ditetapkan kursus tidak dapat dilaksanakan.

2. *Untuk Buruh/Karyawan :*

Pelatihan/kursus yang diberikan oleh BBLKI atas permintaan perusahaan untuk memberikan dan menambah keterampilan kepada buruh/karyawan perusahaan. Jenis pelatihan/kursus yang diberikan sesuai dengan permintaan perusahaan dan dana di tanggung oleh perusahaan tersebut.

3. *Permintaan organisasi atau instansi :*

BBLKI bekerjasama dengan instansi pemerintah atau organisasi untuk memberikan pelatihan/kursus kepada kelompok tertentu yang telah ditetapkan oleh suatu instansi/ organisasi (misalnya peserta karang taruna, kelompok purnawirawan, kelompok tani, kelompok penyandang cacat, dsb).

Sebagai balai latihan kerja, BBLKI juga harus dapat terus meningkatkan mutu keterampilan dan keahlian para pegawainya terutama instruktur yang akan mengajar. Untuk meningkatkan keterampilan tersebut, BBLKI mengirim mereka untuk mengikuti pelatihan/kursus yang diadakan oleh Departemen Tenaga Kerja atau ke perusahaan-perusahaan seperti Siemen, Astra, Honda atau perusahaan yang berhubungan dengan teknologi. Selain itu, bagi instruktur yang berprestasi berhak mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan informasi dari BBLKI, banyak manfaat yang diterima oleh peserta kursus, mereka menyatakan lebih siap untuk bekerja karena telah memiliki keterampilan. Sudah banyak peserta kursus di BBLKI yang setelah lulus kursus/pelatihan dapat langsung bekerja. Hal ini dapat terwujud karena BBLKI juga menyalurkan para lulusan kursus ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka.

### **3.1. Keterangan Demografi dan Pendidikan**

Untuk memperoleh keterangan/informasi yang dibutuhkan mengenai keadaan ketenagakerjaan di Kelurahan Kuala Bekal, dipilih 10 rumah tangga secara *purposive*, dan ternyata semuanya merupakan keluarga kecil. Ada 5 rumah tangga yang memiliki jumlah ART 5 orang, 2 rumah tangga yang mempunyai ART 6 orang, 2 rumah tangga lainnya memiliki ART 4 orang, dan satu rumah tangga memiliki ART 3 orang. Selain itu, dari 10 rumah tangga terpilih, 9 KRT berstatus kawin dan hanya seorang yang berstatus janda.

Pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena pendidikan merupakan modal dalam meningkatkan taraf kehidupan seseorang. Secara umum semakin tinggi pendidikan seseorang, maka status sosialnya biasanya juga akan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya rendah.

Tingkat pendidikan KRT di kelurahan yang menjadi wilayah penelitian sangat bervariasi, dari 10 responden hanya 2 orang responden yang pendidikannya Tamat SMP, 4 orang Tamat SMA/SMK sederajat, 1 orang Tamat Akademi, dan 3 orang Tamat Perguruan Tinggi. Sementara pendidikan isteri selalu lebih rendah dari pendidikan KRTnya. Sedangkan tingkat pendidikan ART yang berusia 15 tahun ke atas, sebagian besar masih sekolah, di tingkat SMP bahkan ada yang sedang kuliah di tingkat Perguruan Tinggi. ART 15 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi ada 8 orang, dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan SMP 1 orang, Tamat SMA 5 orang dan 2 orang Tamat Perguruan Tinggi.

Informasi dari rumah tangga yang menjadi responden dan tokoh masyarakat setempat menyatakan bahwa tingkat partisipasi sekolah di wilayah ini cukup tinggi. Anak yang putus sekolah di wilayah ini sangat jarang, rata-rata para KRT sudah mengerti tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga banyak anak-anak yang sudah Tamat SLTA, bahkan sudah cukup banyak pula yang melanjutkan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Dari 10 responden rumah tangga tidak ada anak-anak mereka yang putus sekolah, semuanya masih sekolah dan anak-anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang berusia 20 tahun ke atas semuanya sudah Tamat SMA.

Responden yang bekerja jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka upah/gaji yang diterima semakin tinggi. Responden yang bekerja dengan tingkat pendidikan Sarjana, cenderung memiliki pekerjaan yang dapat menjamin kesejahteraan, seperti PNS, guru, teknisi di perusahaan Industri Besar/Sedang dan membuka usaha sesuai dengan bidang keahliannya (praktek bidan).

### **3.2. Keterangan Ketenagakerjaan**

Gambaran mengenai ketenagakerjaan bagi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di 10 rumah tangga terpilih di Kelurahan Kuala Bekal dilakukan dengan pendekatan rumah tangga. Agar data yang diperoleh akurat, maka setiap ART yang berusia 15 tahun ke atas harus diwawancarai lebih mendalam mengenai kegiatan yang mereka lakukan selama seminggu yang lalu. Kendala yang terjadi di lapangan adalah sulitnya menemui ART pada pagi hingga siang hari, sehingga harus melakukan kunjungan selanjutnya, yaitu menjelang sore hari, pada saat ART sudah berada di rumah.

Dari 10 rumah tangga terpilih, ART yang berusia 15 tahun ke atas ada sebanyak 32 orang yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja, yang akan ditanyakan lebih lanjut tentang kegiatan selama seminggu yang lalu. Dari 32 responden yang berusia 15 tahun ke atas, 20 responden seminggu yang lalu melakukan kegiatan bekerja dan sisanya adalah masih bersekolah dan melakukan pekerjaan rumah tangga, hanya satu orang yang tidak dapat melakukan apa-apa karena sudah lanjut usia.

Dari hasil pengamatan di lapangan, tingkat sosial ekonomi rumah tangga dari 10 responden rumah tangga di Kelurahan Kuala Bekal menunjukkan perbedaan. Jika dilihat antara tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan, responden yang pendidikannya sampai

tingkat Perguruan Tinggi, sebagian besar bekerja sebagai PNS dan bekerja di Perusahaan Industri Besar (teknisi), sementara responden yang tingkat pendidikannya hanya Tamat SMP dan SMA bekerja sebagai buruh, atau bekerja di sektor Angkutan dan di Jasa Perorangan.

Dari seluruh responden hanya 20 orang responden yang bekerja, satu orang responden memiliki usaha tambahan selain sebagai Kepala Sekolah, yaitu di sektor Transportasi dengan memiliki 3 buah angkutan kota (angkot) dengan sistim setoran. Responden yang tidak memiliki pekerjaan tambahan, mempunyai alasan yang sama yaitu tidak mempunyai waktu untuk melakukan pekerjaan tambahan. Sementara dari 20 responden, hanya 2 responden yang tidak langsung mendapat upah saat baru mulai bekerja, 1 orang karena membantu orang tuanya di sawah/ladang dan 1 orang lagi membantu orang tuanya berdagang. Usaha responden dalam mendapatkan pekerjaan yang sekarang ini rata-rata berusaha sendiri.

Sementara keterangan yang diperoleh dari 10 KRT hanya 1 orang yang tidak bekerja dan berstatus duda (Pak Marbun), alasannya sudah tidak kuat lagi karena sudah tua (66 tahun). Namun dua tahun yang lalu Pak Marbun masih bekerja sebagai kuli bangunan, sebenarnya masih ada saja orang yang memintanya untuk bekerja membangun rumah atau sekedar memperbaiki rumah (seperti mengecat, membuat pagar) tapi semua ditolaknya, karena sekarang ini ia sering sakit-sakitan. Pak Marbun sendiri menggantungkan hidupnya kepada empat orang anaknya yang sudah bekerja semua. Dua orang anaknya pernah bekerja di Batam selama 3 tahun dengan sistim kontrak, tetapi setelah kontrak kerja habis tidak diperpanjang lagi sehingga mereka kembali ke Medan dan saat ini bekerja sebagai *room boy* di salah satu hotel di Medan, sementara seorang lagi bekerja menjadi buruh pabrik.

Bagi responden yang berumur antara 15-25 tahun yang bekerja, pekerjaan yang saat ini ditekuninya adalah pekerjaan yang pertama kali dan belum pernah berpindah-pindah, terutama bagi mereka yang langsung diterima sebagai PNS. Sedangkan untuk responden yang berusia di atas 25 tahun pekerjaan sekarang yang ditekuni adalah bukan yang pertama. Bahkan ada responden yang mengaku bahwa pekerjaan yang sekarang adalah pekerjaan yang ke enam kalinya.

KRT yang bekerja sebagai PNS dan yang bekerja di perusahaan minyak goreng terbesar di Sumatera Utara menyatakan bahwa saat ini dirasakan telah terjadi peningkatan penghasilan jika dibandingkan tahun yang lalu. Tetapi bagi KRT yang bekerja sebagai sopir, buruh dan pedagang, penghasilan tahun ini dirasakan menurun, hal ini disebabkan karena harga-harga atau biaya hidup saat ini yang semakin tinggi. Kebutuhan sehari-hari di luar kebutuhan sandang dan pangan seperti pendidikan, sangat tinggi, hal ini dirasakan khususnya pada rumah tangga yang anaknya sudah duduk di jenjang SLTA dan Perguruan Tinggi. Bahkan ada yang terpaksa harus menunggak SPP 2 bulan hingga menunggu hasil panen nanti. Untuk biaya kesehatan sementara ini responden merasa masih bisa mengobati untuk setiap anggota rumahtangga yang terganggu kesehatannya selama penyakitnya tidak parah.

### **4. Saran Perbaikan Sakernas**

Narasumber atau informan dari studi mengenai ketenagakerjaan yang dilakukan di Kota Medan adalah Disnaker Kota Medan, tokoh masyarakat, dan rumah tangga. Dalam melakukan studi ini juga akan dilihat perbedaan konsep dan definisi tentang ketenagakerjaan.

#### **4.1. Perbedaan konsep ketenagakerjaan**

Informasi dari Disnaker (Ibu Rosalina Madjid, BBA), menyatakan bahwa data-data yang berhubungan dengan ketenagakerjaan diperoleh dari BPS seperti data jumlah angkatan kerja, jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Maka konsep dan definisi yang digunakan mengacu pada konsep BPS. Sementara untuk konsep mengenai sektor informal menurut Disnaker adalah pekerja yang bekerja tanpa membutuhkan/memperhatikan tingkat pendidikan atau keterampilan khusus. Selain itu juga pada sektor ini tidak ada aturan dan jenjang upah yang jelas. Sektor informal menurutnya adalah seperti sektor Jasa (pembantu rumah tangga, supir ojek, becak), sektor Industri (Industri Kecil dan Rumah Tangga) serta sektor Perdagangan (pedagang keliling).

Konsep dan definisi mengenai ketenagakerjaan dari responden rumah tangga, mayoritas memberikan informasi yang berbeda dengan konsep BPS. Konsep bekerja menurut responden adalah orang yang bekerja dan menghasilkan uang atau mendapatkan upah. Sementara menurut mereka menganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mendapatkan upah/gaji. Untuk ART atau buruh yang bekerja dengan tidak mendapat upah/gaji (pekerja keluarga) menurut responden tidak termasuk bekerja, karena dianggap hanya sekedar membantu bukan bekerja. Sedangkan pekerjaan utama menurut responden adalah pekerjaan yang mendapatkan upah/gaji atau penghasilan yang paling besar.

Untuk konsep dan definisi sektor informal, sebagian besar responden rumah tangga tidak mengetahui dan tidak mengerti, namun ada dua responden yang menyatakan bahwa sektor informal adalah lapangan kerja yang mudah dimasuki oleh setiap tenaga kerja karena tidak memerlukan tes atau syarat untuk bekerja di sektor tersebut. Responden memberikan contoh seperti pengamen, pedagang keliling, tukang ojek.

#### **4.2. Saran untuk Perbaikan Sakernas**

Informasi atau keterangan mengenai saran untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan dan pengumpulan data Sakernas untuk masa yang akan datang dalam penelitian di Kota Medan tidak ditanyakan ke masing-masing nara sumber. Tetapi selama melakukan wawancara dengan nara sumber dari Disnaker, tidak ada saran atau masukan untuk BPS dalam hal pengumpulan data. Karena semua data, konsep dan definisi mengenai ketenagakerjaan semuanya diperoleh langsung dari BPS Provinsi. Data tersebut yang menjadi acuan oleh instansi tersebut sebagai data ketenagakerjaan.

## Kota Padang - Sumatera Barat

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah penting dalam makro ekonomi karena dilihat dari sisi penawaran (*supply side*), tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi selain modal dan teknologi. Produktivitas tenaga kerja juga merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi mendorong terciptanya lapangan kerja.

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera khususnya dan Indonesia bagian Barat umumnya. Permasalahan dalam hal ketenagakerjaan dipandang perlu untuk diidentifikasi karena keterkaitannya amat erat dengan seluruh sendi perekonomian dan masalah-masalah sosial dalam lingkup regional maupun nasional.

### 1. Gambaran Wilayah Penelitian

#### 1.1. Keadaan Geografis

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai Barat Pulau Sumatera dengan luas 694,96 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Kota Tengah yang mencapai 232,25 km<sup>2</sup>.

Dari keseluruhan luas Kota Padang sebagian besar atau 52,52 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Berupa bangunan dan perkarangan seluas 9,01 persen atau 62,63 km<sup>2</sup> sedangkan yang digunakan untuk lahan sawah seluas 7,52 persen atau 52,25 km<sup>2</sup>. Selain di daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau dengan Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebagai pulau yang terbesar dengan luas 38,6 km<sup>2</sup>, kemudian diikuti oleh Pulau Toran dan Pulau Pisang Gadang yang keduanya terletak di Kecamatan Padang Selatan dengan luas masing-masing 25 km<sup>2</sup> dan 21,12 km<sup>2</sup>.

Kota Padang memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 0-1.853 m di atas permukaan laut, dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Sungai Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan pada tahun 2003. Kota Padang juga memiliki suhu udara yang cukup tinggi yaitu antara 23<sup>o</sup>-32<sup>o</sup> C pada siang hari dan antara 22<sup>o</sup>-28<sup>o</sup> C pada malam hari, dengan kelembaban berkisar antara 78-81 persen.

Pelaksanaan studi mendalam mengenai ketenagakerjaan di Kota Padang bertempat di Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena heterogenitas jenis lapangan pekerjaan penduduk yang tinggal di wilayah ini. Letaknya yang berada di pusat kecamatan, dekat dengan stasiun kereta

api, pasar, dan perkantoran menjadikan mata pencaharian penduduk beraneka ragam. Dengan demikian diharapkan, untuk menjangkau informasi mengenai konsep dan definisi ketenagakerjaan yang dipahami oleh masyarakat dapat terwakili oleh opini dari penduduk dengan berbagai jenis pekerjaan.

### **1.2. Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Wilayah**

#### **1.2.1. Pertanian**

Kota Padang masih memiliki potensi besar di bidang pertanian. Hal ini terlihat dari hasil produksi padi sawah pada tahun 2006 sebesar 59.794 ton. Share produksi padi sawah yang dihasilkan oleh Kecamatan Kuranji (35,46 persen), Kecamatan Koto Tengah (19,73 persen) dan Kecamatan Pauh (15,97 persen) dan sisanya tersebar di beberapa kecamatan lainnya.

Sementara itu, secara umum produksi palawija mengalami peningkatan, yaitu dari 2.768 ton pada tahun 2005 menjadi 3.874 ton pada tahun 2006. Industri makanan yang banyak tersebar di Kota Padang yang bahan baku utamanya berasal dari ubi kayu telah mendorong produksi ubi kayu yang tahun ini jumlahnya mencapai 3.277 ton atau 83,63 persen dari keseluruhan produksi palawija.

Produksi ikan tangkapan pada tahun 2006 mengalami penurunan, yaitu dari 12.336,3 ton pada tahun 2005 menjadi 12.239,5 ton pada tahun 2006. Sedangkan produksi peternakan selama tahun 2006 yang terdiri dari populasi dan pematangan ternak hanya mengalami peningkatan pada ternak sapi dan kambing sedangkan jenis ternak lainnya mengalami penurunan. Sementara populasi unggas selama tahun 2006 masih didominasi oleh ayam ras pedaging yaitu sebesar 82,39 persen.

#### **1.2.2. Industri**

Sektor Industri merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Padang. Sub sektor yang dikembangkan pada umumnya adalah Industri Kecil Hasil Pertanian dan Kehutanan, Industri Logam dan Mesin Elektro, Industri Kimia dan Aneka Industri. Sub sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan merupakan sub sektor yang berperan paling besar baik dari segi penyerapan tenaga kerja maupun nilai investasi yang ditanamkan. Secara keseluruhan, pada sub sektor Industri Kecil telah terjadi peningkatan jumlah unit usaha, jumlah tenaga kerja serta nilai investasi yang ditanamkan, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan oleh industri kecil ini.

Di Kota Padang terdapat sebuah industri besar yaitu PT. Semen Padang dengan total kapasitas terpasang 5.240.000 ton/tahun. Pada tahun 2006 terjadi peningkatan dari 5.112.443 ton pada tahun 2005 menjadi 5.358.598 ton. Sementara volume penjualan pada tahun 2006 sebesar 5.562.436 ton yang dipasarkan ke seluruh wilayah Sumatera dan DKI Jakarta.

### **1.2.3. Perdagangan**

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat merupakan pintu masuk dan keluar berbagai jenis komoditi perdagangan terutama perdagangan dalam negeri, karena di samping Padang merupakan pusat perdagangan Sumatera Barat, juga sebagai kota pelabuhan laut.

Sektor Perdagangan terus mengalami peningkatan, ini ditandai dengan meningkatnya jumlah perusahaan perdagangan dari 29.104 perusahaan pada tahun 2005 menjadi 31.401 perusahaan pada tahun 2006. Hal ini juga didukung dengan dibangunnya pasar-pasar baru serta terus dikembangkannya pasar-pasar yang telah ada.

### **1.2.4. Angkutan**

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di sektor Perhubungan terus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi jalan Kota Padang pada tahun 2006 tidak mengalami perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut jenis permukaan, jalan di Kota Padang sebagian besar telah beraspal yaitu sebesar 79,40 persen (748,65 km). Bila dilihat menurut kondisi jalan, sebagian besar jalan berkondisi baik yaitu sebesar 73,88 persen (696,56 km).

Jumlah angkutan umum pada tahun 2006 tidak banyak mengalami perubahan kecuali pada jenis angkutan kota sebanyak 2.241 buah pada tahun 2005 menjadi sebanyak 2.345 buah pada tahun 2006. Sementara untuk angkutan laut pada tahun 2006 kembali mengalami peningkatan walaupun relatif kecil. Hal ini terlihat dari jumlah kapal penumpang yang bersandar serta jumlah penumpang yang naik maupun turun. Dari angkutan barang juga terlihat peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah kapal barang yang bersandar di Pelabuhan Teluk Bayur dari 1.957 kapal pada tahun 2005 menjadi 2.071 kapal pada tahun 2006.

### **1.3. Kependudukan**

Informasi mengenai penduduk merupakan dasar utama dalam melakukan kegiatan pembangunan baik perencanaan maupun evaluasi. Pada tahun 2006, penduduk Kota Padang telah mencapai 819.740 jiwa, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2,30 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian kepadatannya pun bertambah dari 1.153 jiwa/km<sup>2</sup> menjadi 1.180 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jika dilihat berdasarkan kecamatan, kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak adalah Kecamatan Koto Tengah dengan penduduk 153.075 jiwa, tetapi karena wilayahnya yang paling luas hingga mencapai 33 persen dari luas Kota Padang sehingga memiliki kepadatan penduduk yang rendah yaitu sebesar 659 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit (23.400 jiwa) dan sekaligus paling rendah kepadatannya (232 jiwa/km<sup>2</sup>) adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kecamatan

lain yang juga masih jarang penduduknya adalah Kecamatan Pauh yaitu 351 jiwa/km<sup>2</sup> dan Lubuk Kilangan yaitu 483 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berdasarkan jenis kelamin, banyaknya laki-laki dan perempuan di Kota Padang dapat dikatakan seimbang, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,35. Hal ini menunjukkan bahwa selisih penduduk laki-laki dan perempuan tidak signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Indikator Kependudukan Kota Padang menurut Kecamatan, 2006**

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio	Laju Pertumbuhan 1998-2006	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk	Jumlah Rumah tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Bungus Teluk Kabung	12 480	10 920	23 400	114,29	2,48	100,78	232	5 824
2 Lubuk Kilangan	21 000	20 560	41 560	102,14	1,43	85,99	483	10 080
3 Lubuk Begalung	52 088	48 824	100 912	106,69	2,78	30,91	3 265	24 864
4 Padang Selatan	30 687	30 316	61 003	101,22	1,11	10,03	6 082	15 104
5 Padang Timur	40 761	43 470	84 231	93,77	0,49	8,15	10 335	20 800
6 Padang Barat	30 030	29 865	59 895	100,55	-0,61	7,00	8 556	14 688
7 Padang Utara	36 792	36 938	73 730	99,60	1,15	8,08	9 125	17 936
8 Nanggalo	26 818	29 786	56 604	90,04	1,43	8,07	7 014	14 080
9 Kuranji	57 456	56 520	113 976	101,66	3,16	57,41	1 985	28 160
10 Pauh	26 568	24 786	51 354	107,19	3,48	146,29	351	12 720
11 Koto Tengah	75 900	77 175	153 075	98,35	3,85	232,25	659	37 184
<b>Kota Padang</b>	<b>410 580</b>	<b>409 160</b>	<b>819 740</b>	<b>100,35</b>	<b>2,07</b>	<b>694,96</b>	<b>1 180</b>	<b>201 440</b>

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2007

#### 1.4. Kesehatan dan Pendidikan Penduduk Kota Padang

Keadaan kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin baik keadaan kesehatan masyarakat, berarti tingkat kesejahteraan juga semakin baik begitu pula sebaliknya. Peranan Pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat Kota Padang, karena pada tahun 2005 ada 61,88 persen pasien yang berobat ke Puskesmas dan 21,28 persen berobat ke Rumah Sakit Pemerintah. Tentunya dengan biaya yang murah dan metode penanganan yang optimal merupakan alasan bagi pasien dalam memilih jenis pelayanan kesehatan untuk berobat.

Dengan banyaknya pasien yang berobat ke puskesmas, maka kebutuhan akan tenaga medis yang profesional sangat diperlukan. Jumlah tenaga medis yang praktek di puskesmas di Kota Padang pada tahun 2005 ada sebanyak 51 orang dokter, 40 orang dokter gigi dan 403 orang bidan/perawat, selebihnya bekerja di rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta.

Hal lain yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan adalah pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Dari data Susenas 2006 diketahui bahwa penduduk Kota Padang yang masih mengenyam pendidikan dasar (umur < 15 tahun) sebesar

62,56 persen dari total kelompok umur tersebut, sedang penduduk yang tidak/belum pernah sekolah mencapai 77,25 persen, dan penduduk yang tidak bersekolah lagi mencapai 0,85 persen. Jadi ada sekitar 78,10 persen (sebagian besar adalah anak usia 5-6 tahun) yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. Salah satu penyebabnya adalah karena faktor kemiskinan.

**Tabel 1.2. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Keatas menurut Status Pendidikan Di Kota Padang, 2006**

Kelompok Umur	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5-6	72,12	4,31	0,01	4,21
7-12	3,72	40,48	0,13	13,54
13-15	1,11	17,77	0,71	6,34
16-18	0,70	16,13	2,28	6,77
> 18	22,35	21,31	96,87	69,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2006, BPS Kota Padang

Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah (umur 16-18 tahun), penduduk yang masih sekolah sebesar 16,13 persen, penduduk yang tidak bersekolah lagi mencapai 2,28 persen, penduduk yang tidak/belum pernah sekolah 0,7 persen. Untuk pendidikan tinggi (usia > 18 tahun) terlihat bahwa penduduk yang tidak/belum pernah sekolah persentasenya sudah kecil dibanding kelompok umur yang lain, sedang penduduk yang tidak bersekolah lagi persentasenya lebih besar dari kelompok umur lainnya.

Besaran angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Kondisi APK dan APM Kota Padang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Dalam tabel ini memperlihatkan bahwa APK selalu lebih besar dari APM. Terlihat juga bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil tingkat partisipasi sekolahnya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa antusias masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi semakin berkurang dan menganggap bahwa pendidikan dasar sudah cukup.

**Tabel 1.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Di Kota Padang, 2006**

Jenjang Pendidikan	APK	APM
(1)	(2)	(3)
SD	104,24	90,29
SLTP	97,03	71,57
SLTA	83,06	60,15

Sumber : Susenas 2006, BPS Kota Padang

**1.4. Perekonomian Penduduk**

Perkembangan perekonomian Kota Padang tahun 2006 yang ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB sebesar 5,14 persen, lebih rendah dari laju pertumbuhan Nasional, yaitu sebesar 5,48 persen dan laju pertumbuhan Sumatera Barat (6,14 persen). Hal ini disebabkan karena pindahnya pelabuhan udara ke daerah lain, dimana sub sektor Transportasi Udara ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar pada tahun-tahun sebelumnya. Secara riil, PDRB atas dasar harga konstan 2000 daerah ini meningkat dari Rp. 9,11 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp. 9,58 triliun pada tahun 2006. Sementara nilai nominalnya atau PDRB atas dasar harga berlaku Kota Padang meningkat dari Rp. 13,27 triliun pada 2005 menjadi Rp. 15,30 triliun pada 2006 atau mengalami kenaikan 15,32 persen. Hal ini disebabkan karena seluruh sektor maupun sub sektor perekonomian mencapai pertumbuhan yang positif.

**Tabel 1.4. PDRB Kota Padang ADHB dan ADHK 2000 menurut Lapangan Usaha, 2005-2006 (miliar Rupiah)**

Lapangan Usaha	2005		2006	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pertanian	677,84	468,55	835,72	494,41
2 Pertambangan & Penggalian	217,09	137,36	259,85	146,77
3 Industri Pengolahan	2022,96	1547,69	2396,88	1625,75
4 Listrik, Gas & Air	310,73	152,10	350,45	160,03
5 Bangunan	592,09	375,15	714,40	404,26
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	2827,74	1998,67	3147,24	2135,32
7 Pengangkutan & Komunikasi	3390,74	2240,17	3797,93	2263,33
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1050,90	690,67	1256,82	750,27
9 Jasa-jasa	2175,97	1499,34	2538,64	1598,86
P D R B	13.266,06	9.109,70	15.297,93	9.579,00

Sumber: PDRB Kota Padang 2006

Pada tahun 2006 pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 8,63 persen, diikuti kemudian oleh sektor Bangunan sebesar 7,76 persen. Sementara sektor lainnya berkisar antara 5,04 persen hingga 6,84 persen Sedangkan sektor Pengangkutan dan Komunikasi hanya tumbuh sebesar 1,03 persen, namun sektor ini telah mampu mendominasi pembentukan nilai tambah PDRB Kota Padang dengan kontribusi sebesar 24,83 persen.

**Tabel 1.5. Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Kota Padang menurut Lapangan Usaha, 2005-2006 (persen)**

Lapangan Usaha	Pertumbuhan		Distribusi	
	2005	2006	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Pertanian	4,95	5,52	5,11	5,46
2 Pertambangan & Penggalan	5,09	6,07	1,64	1,70
3 Industri Pengolahan	4,89	5,04	15,25	15,67
4 Listrik, Gas & Air	4,22	5,22	2,34	2,29
5 Bangunan	6,85	7,76	4,46	4,67
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	5,90	6,84	21,32	20,57
7 Pengangkutan & Komunikasi	4,25	1,03	25,56	24,83
8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7,99	8,63	7,92	8,22
9 Jasa-jasa	5,10	6,64	16,40	16,59
P D R B	5,29	5,14	100,00	100,00

Sumber: PDRB Kota Padang 2006

## 2. Ketenagakerjaan

### 2.1. Kondisi Ketenagakerjaan

Keberhasilan pembangunan salah satunya dapat diukur melalui indikator ketenagakerjaan melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara keseluruhan TPAK Kota Padang sedikit mengalami peningkatan dari 58,68 pada tahun 2005 menjadi 58,94 pada tahun 2006. Peningkatan ini terjadi pada penduduk laki-laki sementara pada penduduk perempuan justru mengalami penurunan. Demikian pula yang terjadi pada TKK Kota Padang yang mengalami kenaikan disebabkan karena TKK laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1. Indikator Ketenagakerjaan Kota Padang menurut Jenis Kelamin, 2005-2006**

Jenis Kegiatan	TPAK		TKK		TPT	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	76,50	78,30	84,52	84,90	15,48	15,10
Perempuan	42,92	40,51	66,64	65,44	33,36	34,56
Total	58,68	58,94	77,57	78,05	22,43	21,95

Sumber : BPS, Susenas 2005-2006

### 2.1.1. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kegiatan

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Padang pada tahun 2006 berjumlah 585.472 jiwa dengan persentase Angkatan Kerja 58,94 persen dan Bukan Angkatan Kerja 41,06 persen. Dari seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, persentase penduduk laki-laki naik dari 64,66 persen pada tahun 2005 menjadi 66,48 persen pada tahun 2006. Sementara persentase penduduk perempuan yang bekerja justru menurun dari 28,6 persen pada tahun 2005 menjadi 26,51 persen. Penurunannya bergeser pada persentase penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga yang meningkat hingga 37,60 persen pada tahun 2006.

**Tabel 2.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin, 2005-2006**

Jenis Kegiatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Angkatan Kerja	76,50	78,30	42,92	40,51	58,68	58,94
- Bekerja	64,66	66,48	28,60	26,51	45,52	46,00
- Mencari Pekerjaan	11,84	11,82	14,32	14,00	13,16	12,94
2. Bukan Angkatan Kerja	23,50	21,70	57,08	59,49	41,32	41,06
- Sekolah	16,52	15,76	17,94	17,12	17,27	16,46
- Mengurus Rumah Tangga	0,92	1,01	34,49	37,60	18,74	19,76
- Lainnya	6,06	4,93	4,65	4,77	5,31	4,84
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2005-2006

### 2.1.2 . Komposisi Penduduk Usia Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Kegiatan ekonomi yang menempati porsi yang cukup besar dalam struktur lapangan pekerjaan penduduk Kota Padang adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 29,97 persen dan sektor Jasa-jasa 29,35 persen.

Sebuah perubahan struktur yang menarik untuk dicermati adalah perubahan pada sektor Pertanian, dimana persentasenya justru meningkat dari 4,67 persen pada tahun 2005 menjadi 7,25 persen pada tahun 2006. Hal ini ditengarai sebagai akibat dari kenaikan

harga BBM pada tahun 2005, yang perubahannya dirasakan sampai tahun 2006. Kenaikan harga-harga yang signifikan, tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hal inilah yang mendorong penduduk untuk masuk ke dalam sektor Pertanian yang tidak membutuhkan ketrampilan khusus.

**Tabel 2.3. Persentase Penduduk Bekerja Usia 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha, 2005-2006**

Lapangan Usaha	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	5,59	9,29	2,81	2,37	4,67	7,25
2. Pertambangan dan Penggalian	1,11	0,79	0,28	0,07	0,83	0,57
3. Industri	9,85	6,65	5,37	5,32	8,35	6,26
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,28	1,06	0,00	0,28	0,19	0,83
5. Konstruksi	14,59	13,19	0,57	1,27	9,91	9,67
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	27,91	25,65	37,60	40,28	31,15	29,97
7. Komunikasi dan Transportasi	16,06	15,77	3,34	1,65	11,82	11,60
8. Keuangan	3,37	4,55	3,11	3,85	3,28	4,34
9. Jasa -jasa	20,67	22,98	46,69	44,55	29,35	29,35
10. Lainnya	0,57	0,07	0,23	0,36	0,45	0,16
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2005-2006

Bila dilihat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi Kota Padang sebesar 5,14 persen pada tahun 2006, pertumbuhan penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas mencapai 3,73 persen sebenarnya merupakan hal yang luar biasa. Namun ternyata telah terjadi pergeseran struktur penduduk yang bekerja dari sektor Industri ke sektor Pertanian.

## 2.2. Program Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil rapat koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) se Sumatera Barat yang membahas masalah penanggulangan pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan maka program bidang ketenagakerjaan di Kota Padang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan potensi sektor Pertanian, Perkebunan dan sektor unggulan lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, seperti coklat, karet, kelapa sawit, tanaman hias, ikan hias dan lain-lain, serta mendorong tumbuh dan berkembangnya *Home Industry*;
2. Sinergitas pengelolaan dan pengembangan sektor unggulan pada masing-masing Kabupaten/Kota menjadi sektor unggulan Provinsi Sumatera Barat;
3. Pemerintah daerah harus pro aktif untuk menghimpun informasi lapangan kerja dan menyampaikannya kepada angkatan kerja atau masyarakat;

4. Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan serta pembekalan tentang pengetahuan hak dan kewajiban yang harus dimiliki dan dipahami oleh tenaga kerja;
5. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan penyederhanaan ijin dengan menerbitkan standarisasi perijinan pada Kabupaten/Kota
6. Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota membentuk aliansi stratejik dalam mendorong tumbuhnya investasi;
7. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang dapat rnenampung lulusannya untuk langsung mendapatkan pekerjaan,
8. Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan pendataan, identifikasi permasalahan pengangguran dan tenaga kerja serta menyampaikan laporan langkah-langkah penanggulangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Pusat;
9. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengoptimalkan peran dan fungsi Balai Latihan kerja (BLK);
10. Pemerintah Provinsi diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja pada Kabupaten/Kota;
11. Dalam merevisi Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Provinsi hendaknya mengeluarkan potensi pertambangan dan potensi lainnya yang dimiliki dari area kawasan hutan lindung dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Bank Nagari diharapkan dapat menyalurkan kredit ke berbagai sektor ekonomi yang potensial dan menyerap banyak tenaga kerja;
13. Dana Revolving Fund yang telah diprogramkan agar disalurkan melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang difasilitasi oleh dinas-dinas provinsi, dan Kabupaten/Kota;

### **2.3. Peran Balai Latihan Kerja (BLK)**

Untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat umumnya dan Kota Padang khususnya, BLK menyelenggarakan berbagai macam Program Pelatihan Keterampilan yang dananya berasal dari APBD, APBN maupun dari Bantuan Luar Negeri dan Dalam Negeri. Di Sumatera Barat ada 1 Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan ada 3 BLK Tingkat Provinsi yang terletak di 3 kabupaten/kota, yaitu di Kota Padang, Kabupaten Payakumbuh, dan Kota Padang Panjang. Selain itu terdapat pula 4 BLK Tingkat Kabupaten yang berada di Kabupaten Painan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Diklat BLK Kota Padang, Bapak Syirwan, program pelatihan yang ada di BLK mencakup Pendidikan Keterampilan Bidang Mesin (perbengkelan), Bidang Konstruksi dan Bidang Elektronika. Penyelenggaraannya mencakup 10 paket pelatihan, 5 diantaranya merupakan Pelatihan Institusional yang diselenggarakan di BLK dan lainnya diselenggarakan di kelurahan-kelurahan dengan bahan-bahan yang disediakan oleh pihak BLK.

Pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh BLK diantaranya adalah hasil kerja sama dengan Departemen Kehakiman berupa pelatihan untuk para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, kerja sama dengan Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan berupa pembekalan *lifeskill*, dan kerja sama dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Rekrutmen tenaga-tenaga yang dilatih di BLK disebarluaskan melalui Bursa Tenaga Kerja *Job Fair* yang tiap tahun diselenggarakan oleh Disnaker Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu juga diumumkan kepada masyarakat melalui Kelurahan, Kecamatan dan Spanduk/Papan Pengumuman di BLK bagi yang ingin mengikuti pelatihan keterampilan. Pelatihan tenaga kerja ada pula yang bersifat swadana dari masyarakat umum dan institusi swasta yang dilatih di BLK.

Sementara penyaluran tenaga kerja yang telah dilatih oleh BLK ada berbagai cara. Para pencari kerja yang pernah dilatih di BLK ada yang langsung mencari pekerjaan sendiri, tetapi ada pula yang disalurkan melalui perusahaan-perusahaan yang mencari tenaga kerja melalui Disnaker. Persyaratan untuk menjadi tenaga kerja dalam negeri adalah telah mengikuti program pelatihan 240 atau 320 jam pelajaran dari BLK, sementara untuk menjadi tenaga kerja luar negeri minimal telah mengikuti 480 jam pelajaran.

### **3. Situasi Ketenagakerjaan Rumah Tangga Responden**

#### **3.1. Keterangan Demografi dan Pendidikan**

Wawancara dilakukan di Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang dengan jumlah responden usia 15 tahun ke atas sebanyak 45 orang, sebagian responden adalah perempuan (51 persen) dan sisanya adalah laki-laki (49 persen). Sementara jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan responden, 9 persen responden Tidak Tamat SD, 20 persen Tamat SD, 38 persen Tamat SMP/ sederajat, 31 persen Tamat SMA/ sederajat dan hanya 2 persen responden yang Tamat Perguruan Tinggi. Sedangkan jenis pekerjaan yang sekarang dijalani yaitu, 16 persen bekerja di sektor formal, 51 persen bekerja di sektor informal dan sisanya 33 persen tidak bekerja.

### 3.2. Keterangan Ketenagakerjaan

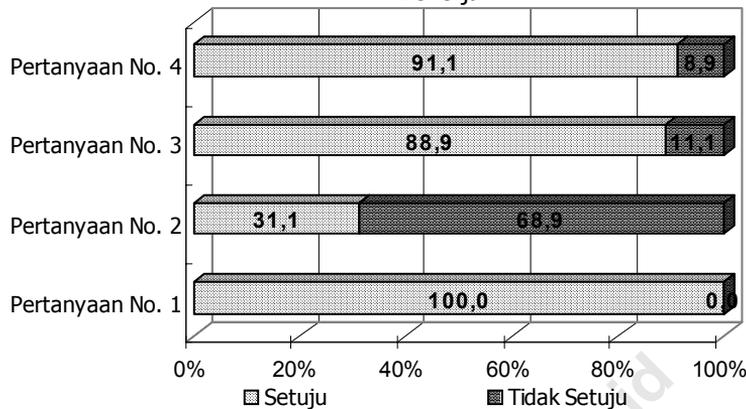
Dari studi mendalam di Kota Padang juga dapat diketahui bagaimana pemahaman responden tentang konsep bekerja. Empat pertanyaan berikut ini diajukan untuk mengetahui pemahaman mereka tentang bekerja.

1. Apakah anda setuju, bahwa "melakukan pekerjaan dengan maksud *memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan*" disebut bekerja?
2. Apakah anda setuju, bahwa "melakukan pekerjaan selama paling sedikit *satu jam secara terus menerus* dalam seminggu yang lalu" adalah bekerja?
3. Apakah anda setuju, bahwa " *pekerja keluarga yang bekerja tanpa mendapat upah* yang membantu dalam suatu usaha / kegiatan ekonomi" adalah termasuk bekerja?
4. Apakah anda setuju, bahwa yang dikatakan bekerja adalah pekerja yang bekerja baik di *sektor formal maupun di sektor informal*?

Setelah ditanyakan kepada seluruh responden yang terpilih pada studi mendalam di Kota Padang ini, maka hasil pemahaman yang didapat dari hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1. Pada pertanyaan pertama, seluruh responden menjawab setuju dengan pernyataan bahwa semua usaha yang dilakukan untuk memperoleh/membantu memperoleh penghasilan/ keuntungan adalah termasuk bekerja.
2. Pada pertanyaan kedua, sebagian responden (68,9 persen) menyatakan bahwa dikatakan bekerja apabila dilakukan lebih dari satu jam. Sementara sisanya (31,1 persen) setuju dengan konsep BPS yang menyatakan bahwa yang termasuk bekerja apabila dilakukan satu jam secara terus menerus.
3. Pertanyaan ketiga, pada umumnya responden mengaku "*bila bekerja untuk keluarga dalam hal ini orangtuanya, maka tidak dibayarpun tidak apa-apa*", jawaban ini mencapai 88,9 persen, sedangkan sisanya sedikit ekstrim, yaitu meskipun bekerja untuk keluarga tetap harus dibayar.
4. Pada pertanyaan keempat, responden yang menjawab bahwa "*bekerja tidaklah selalu identik dengan kegiatan formal atau bekerja di sektor formal, namun kegiatan di sektor informal pun bisa dikatakan sebagai bekerja*", dijawab oleh 91,1 persen. Sedangkan 8,9 persen sisanya berasumsi bahwa seseorang dianggap bekerja bila melakukan kegiatan disektor formal saja.

Gambar 1. Opini Responden mengenai Konsep dan Definisi Bekerja



#### 4. Saran perbaikan Sakernas

##### 4.1. Perbedaan Konsep Ketenagakerjaan

Studi mendalam ini dilaksanakan sebagai bagian dari perbaikan mutu data Sakernas. Sebagai indikator yang dijadikan acuan (*benchmark*) bagi masalah ketenagakerjaan, banyak analis yang mengkritik tentang penentuan konsep dan definisi yang digunakan BPS terkait dengan variabel-variabel tenaga kerja. Sebagai contoh adalah untuk konsep berikut ini :

1. **Bekerja** adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha / kegiatan ekonomi ).
2. **Hubungan Kerja ( Formal )** adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja , baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan , upah, dan perintah .
3. **Hubungan Kerja ( Informal )** adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah dan / atau imbalan atau bagi hasil .
4. **Upah** adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/ buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan , atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan , atau peraturan perundang-undangan , dan dibayar atas dasar suatu perjanjian antara pengusaha dengan buruh , termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Kajian literatur yang juga dilakukan untuk melengkapi laporan dari kegiatan studi mendalam ini adalah bahwa dari keempat hal di atas, yang khusus mendapat perhatian para analis, diantaranya dari Direktur Eksekutif Econit Hendri Saparini dan Ekonom dari Universitas Indonesia M. Chatib Basri adalah konsep mengenai jam kerja dan sektor informal. Mereka mendefinisikan bahwa :

A. *Tentang jam kerja :*

1. Jika seseorang hanya bekerja satu jam selama seminggu dikategorikan sebagai bekerja, maka hal ini akan berakibat pada rendahnya angka pengangguran.
2. Waktu bekerja tidak dibatasi berapa lama jam kerja, namun perlu dipikirkan apakah kemudian pekerjaannya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan atau tidak.
3. Seharusnya ada besaran jumlah tenaga kerja yang terserap di atas 35 jam seminggu. Jika orang bekerja di sektor formal artinya orang tersebut minimal bekerja 8 -10 jam setiap harinya.

B. *Tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja di :*

1. Segala jenis pekerjaan di luar perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak.
2. Segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap
3. Tempat pekerjaan yang tidak terdapat keamanan kerja (job security)
4. Tempat bekerja yang tidak ada status permanen atas pekerjaan tersebut
5. Unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum.

Ciri-ciri kegiatan-kegiatan informal adalah:

1. Mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini
2. Bersandar pada sumber daya lokal
3. Biasanya usaha milik keluarga
4. Operasi skala kecil
5. Padat karya dan *adapted technology*
6. Keterampilan diperoleh dariluar sistem formal sekolah,
7. Tidak diatur dan pasar yang kompetitif.

Contoh dari jenis kegiatan sektor informal antara lain pedagang kaki lima (PKL), becak, penata parkir, pengamen dan anak jalanan, pedagang pasar, buruh tani dan pekerja seks komersial (PSK).

Meskipun konsep dan definisi yang digunakan BPS sudah mengacu pada konsep dan definisi ILO, namun untuk mengakomodir keterkaitan variabel-variabel ketenagakerjaan dengan fenomena dan aspek-aspek ekonomi serta sosial yang timbul lebih dulu, yang butuh penjelasan dari sisi ketenagakerjaan, ada baiknya bila beberapa item pertanyaan perlu ditambah. Untuk itu dilakukan studi ini yang kiranya dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan mutu data Sakernas.

#### **4.2. Saran untuk Perbaikan Sakernas**

1. Sebagai indikator ketenagakerjaan yang digunakan pemerintah, Sakernas diharapkan mampu menjelaskan kaitan antara angka-angka ketenagakerjaan dengan struktur dan pertumbuhan ekonomi
2. Melalui Sakernas, diharapkan mampu menjelaskan berapa angkatan kerja yang terserap ke dalam sektor formal dan informal
3. Status bekerja semestinya dikaitkan dengan kebutuhan hidup masyarakat
4. Bekerja tidak cukup hanya dilakukan selama 1 jam sehari, karena acuan bekerja di sektor formal adalah 8-10 jam sehari.

## **Kota Denpasar - Bali**

### **1. Gambaran Wilayah Penelitian**

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja tiap tahun. Oleh karena itu, upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. (Dikutip dari Analisis Tenaga Kerja dan Distribusi Pendapatan Kota Denpasar, 2006)

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja), disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di Kota Denpasar pada tahun 2007 dilakukan studi mendalam (*in depth study*) dimana dalam studi ini dilakukan wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Balai Latihan Kerja (BLK), Kantor Kecamatan terpilih, Kepala Desa di desa terpilih, Tokoh Masyarakat dan juga dilakukan wawancara langsung dengan 10 rumah tangga yang mempunyai anggota rumah tangga usia kerja dan yang terkena sampel Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

#### **1.1. Keadaan Geografis**

Kota Denpasar merupakan ibu kota Provinsi Bali, terletak pada 80° 35'31" - 80° 44'49" Lintang Selatan dan 115° 10'23" - 115° 16'27" Bujur Timur, yang memiliki luas wilayah 12.778 hektar atau 2,18 persen dari luas Provinsi Bali. Jika dilihat dari penggunaan tanahnya 2.717 hektar merupakan tanah sawah, 10.050 hektar merupakan tanah kering dan sisanya seluas 11 hektar merupakan tanah lainnya seperti tambak dan kolam/tebat/empang.

Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten Badung di sebelah Utara, Barat dan sebelah Selatan, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok. Sejak tahun 2006 Kota Denpasar mengalami pemekaran sehingga secara administratif wilayah kecamatan terdiri dari 4 kecamatan dan 43 kelurahan/desa. Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Barat dan Denpasar Timur masing-masing terdiri dari 11 kelurahan/desa, sedangkan Kecamatan Denpasar Selatan terdiri dari 10 kelurahan/desa. Studi kualitatif tentang kondisi ketenagakerjaan dilakukan di Kecamatan Denpasar Selatan tepatnya di Desa Sanur Kauh. Alasan dipilihnya Desa Sanur Kauh

karena desa ini terkena sampel SAKERNAS, selain itu juga karena banyaknya tenaga kerja yang bekerja di beragam profesi.

Kecamatan Denpasar Selatan mempunyai luas wilayah 49,99 km<sup>2</sup> atau paling luas diantara tiga kecamatan yang lainnya yaitu sekitar 39,12 persen. Wilayah ini berada di ketinggian 00-12 meter dari permukaan laut dengan ibu kota kecamatan di Kelurahan Sesetan.

## **1.2. Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Wilayah**

Sumber daya alam dari Kota Denpasar yang sebagian wilayahnya berada di dataran pantai adalah dari perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Potensi sumber daya alam yang berasal dari perikanan laut antara lain ikan palagis dan ikan demersal yang sebagian besar berasal dari perairan lepas pantai dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Disamping perikanan laut juga ada budidaya laut seperti budidaya rumput laut, kerapu, lobster, mali-mali, baronang dan ikan kerapu. Sedangkan yang berasal dari perikanan darat yaitu perikanan yang berasal dari perairan umum seperti perikanan dari sungai dan waduk/dam, budidaya ikan air tawar dan budidaya air payau (tambak).

Sumber daya alam yang berasal dari pertanian tanaman pangan lebih kecil jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang berasal dari perikanan. Karena penggunaan tanah untuk lahan pertanian atau tanah sawah hanya 2.717 hektar atau 21,26 persen dari seluruh luas wilayah Kota Denpasar.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Kota Denpasar cukup lengkap mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih, telekomunikasi, tempat peribadatan dan sarana umum lainnya. Untuk sarana pendidikan tersedia bangunan sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi (PT), baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jumlah sekolah (negeri dan swasta) yang tercatat sampai akhir tahun 2006 sebanyak 207 SD/MI, 44 SLTP, 46 SLTA dan 24 PT. Sedangkan sarana kesehatan di Kota Denpasar juga cukup lengkap mulai dari rumah sakit (RS), puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan klinik/rumah bersalin dan juga posyandu. Jumlah RS negeri maupun RS swasta sebanyak 16, sedangkan RS yang berada di Kecamatan Denpasar Selatan hanya ada satu. Selain itu banyak ditemui praktek-praktek dokter umum maupun spesialis. Jumlah para medis baik yang bertugas di puskesmas dan pustu masing-masing sebanyak 136 orang dan 57 orang.

Sarana lain yang sangat penting peranannya dalam memperlancar kegiatan perekonomian suatu daerah adalah jalan. Panjang jalan di Kota Denpasar pada tahun 2006 mencapai 632.199 km yang terdiri dari jalan kota 471.069 km, jalan provinsi 46,64 km dan jalan negara 44,78 km. Jenis kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan dalam kota, antar kecamatan dan antar kabupaten terdiri dari mikrolet, mikrobus dan bus. Namun jumlah kendaraan-kendaraan ini tidak terlalu banyak jika di bandingkan dengan jumlah sepeda motor. Selain sarana jalan untuk angkutan darat, Kota Denpasar memiliki Pelabuhan Benoa untuk angkutan laut.

Keindahan alam, aneka seni dan budaya, serta semaraknya berbagai acara ritual agama Hindu yang melingkupi kehidupan sehari-hari penduduk menjadi pemandangan yang mengagumkan bagi wisatawan. Kota Denpasar yang lekat dengan unsur kepariwisataannya juga dilengkapi dengan sarana pariwisata. Sarana kepariwisataan yang tercatat di Kota Denpasar tahun 2006 antara lain 167 biro perjalanan umum, 30 cabang biro perjalanan umum, 490 bar dan restoran, 73 perusahaan angkutan wisata, 102 *money changer*, 3 pusat informasi kepariwisataan dan 23 obyek pariwisata.

### **1.3. Kependudukan**

Jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2006 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2000 sebanyak 583.600 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 295.183 jiwa (50,81 persen) dan penduduk perempuan 288.183 jiwa (49,19 persen). Jumlah penduduk tahun 2006 ini naik 1,5 persen dari sebelumnya 574.955 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Denpasar Barat yaitu 168.580 jiwa atau 28,9 persen dari seluruh penduduk Kota Denpasar, kemudian diikuti berturut-turut oleh Kecamatan Denpasar Selatan 167.358 jiwa (28,7 persen), Kecamatan Denpasar Utara 137.390 jiwa (23,5 persen) dan Kecamatan Denpasar Timur 110.272 jiwa (18,9 persen).

Kepadatan penduduk atau banyaknya penduduk per km<sup>2</sup> yang merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Denpasar pada tahun 2006 sudah mencapai 4.567 jiwa per km<sup>2</sup>. Jika dilihat menurut kecamatan, dari 4 kecamatan di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya yaitu 7.007 jiwa per km<sup>2</sup>. Sementara Kecamatan Denpasar Selatan mempunyai kepadatan penduduk paling sedikit yaitu 3.348 jiwa per km<sup>2</sup> atau menempati urutan terakhir, urutan kepadatan penduduk yang ke dua dan ke tiga adalah Kecamatan Denpasar Timur (4.943 jiwa per km<sup>2</sup>) dan Kecamatan Denpasar Utara (4.373 jiwa per km<sup>2</sup>).

Berdasarkan pada Tabel 1.1, jumlah penduduk Kota Denpasar usia kurang dari 15 tahun sebanyak 147.807 jiwa atau 25,32 persen dan penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 435.792 jiwa atau 74,67 persen. Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Denpasar Selatan usia kurang dari 15 tahun sebanyak 41.943 jiwa atau 25,05 persen dan penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 125.415 jiwa atau 74,94 persen.

**Tabel 1.1 Penduduk Kota Denpasar Dirinci menurut Kelompok Umur dan Kecamatan, Tahun 2006**

Kecamatan	Kelompok Umur (Tahun)						Jumlah
	0-4	5-9	10-14	15-24	25-49	50+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Denpasar Selatan	15 622 (9,33)	14 565 (8,70)	11 756 (7,02)	26 006 (15,54)	81 611 (48,76)	17 798 (10,63)	167 358 (100,00)
Denpasar Timur	9 611 (8,72)	9 839 (8,92)	7 913 (7,18)	15 785 (14,31)	52 915 (47,99)	14 207 (12,88)	110 272 (100,00)
Denpasar Barat	14 911 (8,85)	15 637 (9,28)	12 702 (7,53)	23 859 (14,15)	82 412 (48,89)	19 059 (11,31)	168 580 (100,00)
Denpasar Utara	12 152 (8,84)	12 744 (9,28)	10 352 (7,53)	19 445 (14,15)	67 164 (48,89)	15 533 (11,31)	137 390 (100,00)
Jumlah	52 297 (8,96)	52 786 (9,04)	42 724 (7,32)	85 094 (14,58)	284 101 (48,68)	66 597 (11,41)	583 600 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase

Sumber : Kota Denpasar Dalam Angka, 2006

#### 1.4. Perekonomian Penduduk

Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi tentu merupakan pusat berbagai kegiatan, terutama kegiatan ekonomi dan Kota Denpasar memiliki letak yang sangat strategis mengingat posisinya berada pada sentral jalur lalu lintas antar kabupaten. Berbagai sarana dan fasilitas ekonomi tersebar luas di daerah ini sehingga kota ini dapat mendorong/menunjang pertumbuhan ekonomi. Kota Denpasar memang tidak dapat dipisahkan dari kepariwisataan karena sektor pariwisata telah terbukti menjadi andalan terutama dalam pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Denyut pariwisata mewarnai setiap langkah kehidupan masyarakat Kota Denpasar. Kota Denpasar memiliki beberapa objek pariwisata menarik seperti pantai, pura, museum dan lain-lain. Menjamurnya fasilitas pariwisata atau meningkatnya kuantitas pariwisata seperti hotel, restoran, kafe dan lain-lainnya sudah tentu merupakan lahan untuk lapangan pekerjaan penduduk Kota Denpasar.

Selain sektor Pariwisata, yang turut pula mendorong perekonomian Kota Denpasar adalah industri dan produksi barang kerajinan yang berupa cinderamata. Industri dan kerajinan tersebut antara lain kerajinan patung kayu, kerajinan perak, garmen, kerajinan batok kelapa, kipas cendana dan kerajinan anyaman. Semua industri dan kerajinan ini sebagian besar menggunakan bahan baku lokal dan luar daerah, sedangkan untuk cendana didatangkan dari Indonesia bagian Timur. Proses produksinya memanfaatkan teknologi sederhana dan tradisional, sedangkan pemasarannya selain lokal juga di ekspor ke beberapa negara.

Jumlah industri dan jumlah tenaga kerja Industri Besar/Sedang, Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga tahun 2006 per kecamatan di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 1.2. Industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Industri

Besar/Sedang yaitu sebanyak 66 unit, yang kemudian dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 5.329 pekerja atau menyerap lebih dari 69,16 persen dari jumlah pekerja di sektor Industri. Sementara untuk Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga masing-masing menyerap tenaga kerja 21,00 persen dan 11,11 persen.

**Tabel 1.2. Jumlah Perusahaan Industri Formal dan Tenaga Kerja per Kecamatan di Kota Denpasar, Tahun 2006**

Kecamatan	Industri Besar/Sedang		Industri Kecil		Industri Kerajinan RT		Jumlah	
	Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja	Unit	Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Denpasar Selatan	24	1 767	52	272	79	239	155	2 278
Denpasar Timur	12	402	64	415	77	279	153	1 096
Denpasar Barat	24	2 809	80	816	15	35	119	3 660
Denpasar Utara	6	351	22	115	126	303	155	671
Jumlah	66	5 329	218	1 618	297	856	582	7 705

Sumber : Kota Denpasar Dalam Angka, 2006

## 2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator perekonomian yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan antara lain adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi ketenagakerjaan suatu daerah dapat menggambarkan tingkat perekonomian dan juga tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakatnya. Gambaran ini sangat penting bagi perencanaan pembangunan, pengambil kebijakan maupun pemerhati masalah sosial ekonomi dan kependudukan.

Sebelum melihat gambaran ketenagakerjaan di wilayah penelitian perlu dipahami dahulu penjelasan teknis seperti konsep dan definisi yang digunakan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Penduduk Usia Kerja (PUK) adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah orang yang sedang bekerja dan orang yang sementara tidak bekerja. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah orang yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya seperti orang lanjut usia, cacat jasmani dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi. Sementara definisi tenaga kerja itu sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

## 2.1. Kondisi Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan dari Disnaker Kota Denpasar pada akhir tahun 2006 mencatat bahwa masih terdapat 4.224 orang pencari kerja yang belum ditempatkan, terdiri dari laki-laki 2.252 orang (53,31 persen) dan wanita 1.972 orang (46,69 persen). Jika dirinci menurut kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 901 orang (21,33 persen), 20-29 tahun sebanyak 1.982 orang (46,92 persen) dan 30-44 tahun sebanyak 1.341 orang (31,75 persen).

Sedangkan jika rinci menurut tingkat pendidikannya, yang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 44 orang (1,04 persen), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 49 orang (1,16 persen), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 1.130 orang (26,75 persen), Diploma 1.167 orang (27,62 persen) dan Sarjana 1.834 orang (43,42 persen).

Masih banyaknya pencari kerja yang belum ditempatkan disebabkan karena beberapa hal, seperti terbatasnya kesempatan kerja/permintaan tenaga kerja dari dunia usaha/industri, pemerintah dan BUMN/BUMD, masih minimnya tingkat keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan masih rendahnya motivasi pencari kerja untuk berwirausaha.

Sedangkan untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di Kecamatan Denpasar Selatan khususnya di Desa Sanur Kauh dilakukan wawancara dengan Bapak I Made Dana selaku Kepala Desa. Dari hasil wawancara ini diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Desa Sanur Kauh tahun 2006 sebanyak 12.539 jiwa dan lebih dari 70 persen adalah penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun. Penduduk yang bekerja di wilayah penelitian ini sebagian besar mempunyai pekerjaan utama pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Jasa-jasa. Namun tidak sedikit dari penduduk di wilayah ini yang mempunyai pekerjaan utama pada sektor Industri. Sementara yang berusaha atau bekerja pada sektor Pertanian hanya sekitar 2 persen, yaitu pertanian tanaman padi dan palawija.

Jumlah pengangguran yang ada di Desa Sanur Kauh pada periode 2004-2006 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena peristiwa peledakan bom Bali II yang terjadi pada bulan Oktober 2005. Sesungguhnya pada periode ini kondisi ketenagakerjaan sedang kembali pulih, artinya pengangguran yang disebabkan karena peristiwa peledakan bom Bali yang pertama sedang mulai menata hidupnya dengan mulai mendapat pekerjaan baru dan para pengusaha mulai merintis usahanya. Namun peristiwa bom Bali II kembali melumpuhkan kondisi perekonomian Bali. Pengangguran ini sebagian besar berasal dari tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di perusahaan-perusahaan garmen, *furniture*, bar dan restoran.

### **2.2. Program Ketenagakerjaan**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Disnaker Kota Denpasar, yang diwakili oleh Bapak Wayan Pager, selaku Kasubbag Tata Usaha, memberikan informasi bahwa program-program dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran penduduk khususnya di Kota Denpasar ada tiga program, yaitu penyebarluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan dan perlindungan terhadap tenaga kerja dan pembinaan terhadap pengusaha dengan tenaga kerjanya dengan tujuan supaya terjalin hubungan kerja yang serasi. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksud seperti Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dimana pada tahun 2006 UMK untuk Kota Denpasar sebesar Rp. 698.500,-.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Disnaker dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan Kota Denpasar antara lain memberikan pelatihan-pelatihan atau memberikan bekal kerja kepada tenaga kerja. Pada tahun 2006 ada program magang ke Jepang dan kerjasama dengan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk tenaga kerja pada kapal pesiar yang akan diberangkatkan ke negara Singapura, Amerika Serikat dan Eropa.

Kebijakan dari Disnaker yang berkaitan dengan tenaga kerja antara lain memberikan keterampilan-keterampilan, mempermudah lembaga perijinan, memberikan kartu kuning secara gratis kepada para pencari kerja, ijin bursa kerja (diberikan pengarahan). Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat berhubungan dengan keternagakerjaan yaitu dilakukan melalui bursa kerja.

Meningkatnya jumlah pengangguran di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan adalah akibat peristiwa bom Bali II. Menurut informasi dari Kasubbag Tata Usaha Disnaker dan dari Kepala Desa Sanur Kauh, untuk menurunkan jumlah pengangguran dilakukan pembinaan atau pelatihan untuk masyarakat yang menganggur tersebut. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah membuat kelompok unit usaha simpan pinjam, memberikan dana dan bantuan untuk membuka usaha dan juga lebih menggalakkan program jalur hijau yaitu mengajak petani untuk lebih memanfaatkan semaksimal mungkin dari lahan yang ada.

### **2.3. Peran Balai Latihan Kerja (BLK)**

Peraturan Pemerintah No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi memberikan kewenangan yang luas serta kewajiban kepada Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyediakan dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kewenangan dan kewajiban ini merupakan wujud tugas yang harus dipikul oleh daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan di daerah adalah kewenangan di bidang pelayanan ketenagakerjaan.

Sejalan dengan ini, Program Pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Bali (UPTD BLK-IP Bali) pada tahun 2006 memberikan pelayanan di bidang pelatihan dengan kebijakan reformasi pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kualitas tenaga kerja yang mampu menciptakan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, mendorong ekspor jasa tenaga kerja dan pelatihan yang berorientasi kepada *demand driven* (berdasarkan permintaan). Sehubungan dengan kewajiban tersebut maka BLK-IP Bali yang merupakan salah satu UPTD Disnaker Provinsi Bali berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Disnaker Provinsi Bali mempunyai tujuan membentuk tenaga kerja yang TERAMAN (Terampil dan Mandiri) dan AKTIF (Ahli, Kompeten dan Produktif). Jenis-jenis program yang telah diberikan oleh BLK-IP Bali pada tahun 2006 ini antara lain :

1. Pelatihan Institusional

Adalah pelatihan yang dilaksanakan di bengkel/workshop/laboratorium UPTD BLK-IP Bali.

2. Pelatihan Non Institusional

Adalah pelatihan yang dilaksanakan di luar BLK-IP Bali, atau di Kabupaten/ Kecamatan/Desa di wilayah provinsi Bali dimana BLK-IP Bali mendatangi lokasi pelatihan/peserta.

3. Program Pelatihan Pemagangan

Adalah pelatihan yang dilaksanakan dengan bekerjasama antara BLIP Bali, Industri/ Perusahaan dan Instansi terkait.

4. Pelatihan Khusus Kerjasama Pihak III / Swadana

Adalah pelatihan berdasarkan permintaan pihak III (Lembaga Pemerintah, Pendidikan Swasta dan Masyarakat umum/perorangan) yang mampu melaksanakan ikatan hukum, dan biaya ditanggung pihak III.

Program pelatihan di UPTD BLK-IP Bali yang telah dilakukan pada tahun 2006 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Program Pelatihan di UPTD BLKIP Bali, Tahun 2006**

No.	Jenis Program	Jumlah Paket	Jumlah Orang
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A INSTITUSIONAL</b>			
1	F & B Service	1 Paket	16 Orang
2	F & B Poduct	1 Paket	16 Orang
3	House Keeping	1 Paket	16 Orang
4	Sekretaris Kantor	2 Paket	32 Orang
5	Teknik Pendingin	1 Paket	16 Orang
6	Automotive / Mobil	1 Paket	16 Orang
7	Reparasi Sepeda Motor	1 Paket	16 Orang
8	Elektronika	1 Paket	16 Orang
9	Menjahit	1 Paket	16 Orang
10	Mobil Bensin	2 Paket	32 Orang
11	Mobil Diesel	2 Paket	32 Orang
12	Las Listrik	1 Paket	16 Orang
13	Perhotelan	2 Paket	32 Orang
14	Intalasi Penerangan	1 Paket	16 Orang
Jumlah		18 Paket	288 Orang
<b>B NON INSTITUSIONAL</b>			
1	Bangunan	3 Paket	48 Orang
2	Reparasi Sepeda Motor	2 Paket	32 Orang
3	Proccesing	2 Paket	32 Orang
4	Peternakan	3 Paket	48 Orang
5	Melukis	2 Paket	32 Orang
6	Menjahit	3 Paket	48 Orang
7	Tata Rias	5 Paket	80 Orang
8	Ukir Kayu	1 Paket	16 Orang
9	Anyam-anyaman	2 Paket	32 Orang
10	Radio	1 Paket	16 Orang
11	Bangunan Batu	1 Paket	18 Orang
12	Bangunan Kayu	1 Paket	18 Orang
13	Menjahit	1 Paket	37 Orang
14	Peternakan	1 Paket	18 Orang
15	Anyam-anyaman	1 Paket	40 Orang
16	Reparasi Sepeda Motor	1 Paket	18 Orang
Jumlah		30 Paket	533 Orang

Sumber : UPTD BLKIP Bali, 2006

BLK-IP Bali juga melakukan kerjasama dengan instansi lain. Pada tahun 2006 BLK-IP Bali menjalin kerjasama dengan Politeknik Universitas Udayana (UNUD) yaitu di bidang teknik otomotif, elektronik dan *engineering*, dan juga bekerja sama dengan SMK Rekayasa untuk bidang listrik, bangunan dan lainnya. selain itu juga menjalin kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) Widya Tatwaji di bidang kapal pesiar.

Proses perekrutan peserta BLK-IP Bali cukup sederhana yaitu dengan memberikan pengumuman terlebih dahulu melalui spanduk-spanduk, surat kabar dan *leaflet*. Lalu dilakukan pendaftaran dan dilakukan tes untuk peserta, lalu peserta melakukan daftar ulang. Teori dan praktek dilakukan di BLK selama 480 jam atau sekitar 3 bulan. Setelah itu peserta melakukan praktek di lapangan sekitar 3 sampai dengan 6 bulan. Setelah peserta selesai melakukan praktek di lapangan wajib membuat laporan. Setelah semuanya selesai baru diberikan sertifikat kepada peserta yang telah memenuhi syarat.

Untuk proses penyaluran tenaga kerja, BLK-IP Bali bekerjasama dengan Bursa Kerja. Bursa Kerja ini yang menjembatani antara peserta BLK dengan dunia kerja. Selain itu BLK-IP juga menjalin kemitraan dengan 16 perusahaan. Dalam kemitraan ini dibuat suatu proyek kerjasama dengan nama "Jejaring Info Ketenagakerjaan", hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga BLK-IP bisa mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja tersebut.

### **3. Situasi Ketenagakerjaan Rumah Tangga Responden**

Tujuan pengumpulan data pendukung dari rumah tangga adalah untuk mengetahui dari dekat kondisi tenaga kerja responden, mulai dari pendidikan yang ditamatkan, pelatihan/kursus yang diikuti, dan juga untuk mengetahui kegiatan seminggu yang lalu, khususnya responden yang berusia 15 tahun ke atas.

Kendala yang ditemui saat mengumpulkan informasi masalah ketenagakerjaan ini adalah sulitnya bertemu dengan responden karena pada saat yang bersamaan hampir seluruh responden sedang mempersiapkan upacara keagamaan yaitu upacara Galungan, dimana sebagian besar penduduk di wilayah ini beragama Hindu wajib melakukan ritual keagamaan, yang dilakukan hampir setiap hari menjelang penyambutan hari besar Galungan tersebut.

#### **3.1. Keterangan Demografi dan Pendidikan**

Penelitian mengenai kondisi ketenagakerjaan Kota Denpasar dilakukan di Kecamatan Denpasar Selatan tepatnya di Desa Sanur Kauh. Pada penelitian ini dipilih 10 rumah tangga secara *purposive* yang masing-masing rumah tangga mempunyai anggota rumah tangga (ART) yang bekerja dan rumah tangga tersebut pernah terkena sampel Sakernas. Wawancara dilakukan langsung dengan kepala rumah tangga (KRT) dan ART usia 15 tahun ke atas.

Jumlah responden dari 10 rumah tangga terpilih adalah 47 orang. Dari 47 responden, yang berusia 15 tahun ke atas ada sebanyak 37 orang, sisanya berusia 0-14 tahun. Hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut diketahui bahwa dari 10 rumah tangga yang ditemui di lapangan, semua KRT bekerja meskipun ada seorang KRT yang telah berusia 66 tahun. Usia KRT berkisar antara 28 tahun sampai dengan 66 tahun dengan status kawin, namun sebagian besar KRT berusia di atas 40 tahun dan mereka merupakan penduduk asli Kecamatan Denpasar Selatan.

Banyaknya ART pada setiap rumah tangga sebagian besar berkisar dari 4 hingga 8 orang, tetapi ada rumah tangga yang mempunyai ART kurang dari 4 orang, yaitu rumah tangga Pak Wayan Kalut (66 tahun) yang tinggal berdua dengan istrinya yang sudah berusia 60 tahun dan rumah tangga Pak Nyoman Gobra yang tinggal bersama istri dan seorang anaknya yang berusia 15 tahun.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh KRT dari seluruh responden yang diwawancarai, hanya ada 1 KRT yang Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD), sedangkan 3 KRT Tamat SD, sisanya Tamat SMP+, bahkan ada KRT yang Tamat Sarjana (Sarjana Ekonomi). Pentingnya pendidikan sudah mulai disadari oleh penduduk Desa Sanur Kauh tersebut, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan masing-masing ART. Dari semua responden yang diwawancarai, semuanya telah mampu membaca dan menulis huruf latin termasuk responden yang Tidak Tamat SD.

**Tabel 3.1. Jumlah Responden Dirinci menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

Pendidikan	Laki-laki			Perempuan			Jumlah
	0-14	15-49	50+	0-14	15-49	50+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sekolah	2	-	1	2	2	2	9
Tamat SD	3	3	-	2	-	-	8
SD/MI	1	-	1	-	2	1	5
SLTP Umum/MTs	-	3	1	-	4	-	8
SLTP Kejuruan	-	-	-	-	1	-	1
SLTA Umum/MA	-	4	-	-	4	-	8
SLTA Kejuruan	-	1	-	-	2	-	3
DI/II	-	1	-	-	-	-	1
Akademi/DIII	-	3	-	-	-	-	3
Universitas/DIV	-	1	-	-	-	-	1
Jumlah	6	16	3	4	15	3	47

### 3.2. Keterangan Ketenagakerjaan

Kegiatan selama seminggu yang lalu yang dilakukan oleh responden yang berusia 15 tahun ke atas antara lain adalah bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lain. Dari 37 responden yang berusia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan dengan bekerja sebanyak 29 orang, sekolah sebanyak 5 orang, mengurus rumah tangga 2 orang dan 1 orang tidak melakukan apa-apa karena sakit.

Sebagian besar pekerjaan utama responden adalah bekerja di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Jasa-jasa, antara lain sebagai karyawan bank, karyawan perhotelan, buruh pabrik, karyawan restoran, karyawan salon kecantikan, *guide*, satpam, pegawai honorer di kelurahan, tukang angkut sampah, penjaga toko, sopir dan lain-lain. Namun tidak sedikit dari mereka yang juga mempunyai usaha sendiri baik dibantu oleh buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar maupun dibantu oleh buruh/karyawan tetap. Seperti Ni Made Darsini yang memiliki toko buah di pasar dengan dibantu oleh 2 orang pekerja dibayar. Selain itu ada Ni Made Sari yang memiliki warung makanan dibantu oleh suaminya yang sudah pensiun. Kemudian Ni Wayan Sukranasih yang memiliki toko *souvenir* dan Ni Wayan Purwaki yang membuka usaha wartel dengan dibantu oleh pekerja keluarga.

**Tabel 3.2. Jumlah Responden Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Status Pekerjaan Utama**

Lapangan Pekerjaan Utama	Status Pekerjaan Utama							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Pertanian	-	-	-	1	-	-	-	1
2. Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Industri	2	-	-	2	-	-	-	4
4. Listrik, Gas & Air Minum	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Bangunan/Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Perdagangan, Hotel&	1	4	2	4			3	14
7. Angkutan & Komunikasi	-	-	-	1	-	-	-	1
8. Keuangan	-	-	-	2	-	-	-	2
9. Jasa-Jasa	-	-	-	7	-	-	-	7
Jumlah	3	4	2	17	-	-	3	29

Catatan :

1. Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain
2. Berusaha dengan di bantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap
3. Berusaha dengan buruh tetap
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas pertanian
6. Pekerja bebas di non pertanian
7. Pekerja tidak dibayar

Selain pekerjaan utama tersebut, kebanyakan dari responden mempunyai pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahan yang dimaksud oleh responden di sini adalah pekerjaan sampingan dari pekerjaan utamanya dan waktu yang digunakan lebih sedikit

dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk pekerjaan utama. Pekerjaan tambahan dari masing-masing responden antara lain sebagai buruh tukang jahit pada usaha konveksi, tukang pasang batu keramik, tukang bangunan, penjaga wartel milik keluarga dan penjaga toko.

Sebelum bekerja pada pekerjaan yang sekarang ini, banyak responden memiliki pengalaman kerja yang cukup beraneka ragam. Contohnya Pak Nyoman Lastre, sebelum bekerja sebagai buruh cuci mobil dan sekaligus sebagai penjaga gudang di sebuah rental mobil, Pak Noman Lastre pernah bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran sejak tamat sekolah hingga hampir 5 tahun. Setelah itu, ia beralih profesi dan bekerja sebagai buruh cuci mobil yang sudah dijalannya selama hampir 6 tahun. Lain halnya dengan Pak Nyoman Gobra, sebelum bekerja sebagai pengangkut sampah, pengalaman pertama ia bekerja adalah sebagai sopir di sebuah restoran, kemudian beralih menjadi penjaga malam di koperasi simpan pinjam sampai tahun 2004. Demikian juga yang dialami oleh responden yang lain, kebanyakan dari mereka pernah bekerja di tempat lain sebelum bekerja pada pekerjaan yang sekarang.

Pendapatan responden dari masing-masing pekerjaan utama cukup beragam. Dari 29 responden yang penghasilannya paling besar sebagian besar berasal dari mereka yang mempunyai usaha sendiri seperti Ni Made Darsini yang memiliki toko buah di pasar. Pendapatan bersih per hari yang ia dapatkan sekitar Rp 100.000,-, namun bisa lebih jika sedang musim upacara keagamaan, sebab masyarakat Kota Denpasar yang sebagian besar beragama Hindu sering menggunakan buah-buahan untuk sesaji atau perlengkapan untuk acara ritual keagamaan. Pendapatan Ni Made Darsini ini hampir sama dengan Pak Wayan Widia yang memiliki toko kerajinan di Pantai Sanur, penghasilan bersih yang ia peroleh mencapai Rp 100.000,- setiap harinya. Sedangkan penghasilan untuk responden yang berstatus sebagai buruh/karyawan baik di sektor Industri, Hotel, Restoran dan Jasa-jasa berkisar antara Rp 450.000,- hingga Rp 2.000.000,-. Namun demikian, beberapa responden yang bekerja sebagai buruh/karyawan ini masih ada beberapa orang yang memiliki upah/gaji di bawah standar dari UMK Kota Denpasar.

Seperti yang dilakukan oleh Ni Wayan Purwaki, yang bekerja menjahit baju milik perusahaan konveksi, upahnya dihitung dari setiap potong baju yang telah selesai dijahit. Dalam satu minggu Ni Wayan Purwaki dapat menjahit sekitar 10 potong baju, dengan upah setiap potongnya sekitar Rp 4.000,- sampai Rp 5.000,-.

Tingkat kesejahteraan dari responden sering diukur dari pendapatan yang diperoleh dari ART yang bekerja. Selama satu tahun terakhir sejumlah responden yang diwawancarai menyatakan belum merasa sejahtera artinya dengan pendapatan yang diperoleh responden belum dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun sebagian dari mereka menyatakan bahwa mereka merasa cukup dengan pendapatan yang diperoleh dari seluruh ART yang bekerja karena sudah mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

## **4. Saran Perbaikan Sakernas**

### **4.1. Perbedaan Konsep Ketenagakerjaan**

Pada dasarnya konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh Disnaker dengan konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sama, karena Disnaker mengacu pada konsep yang digunakan BPS. Seperti penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja adalah orang yang sedang bekerja dan orang yang sementara tidak bekerja. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah orang yang masih sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya seperti orang lanjut usia, cacat jasmani dan penerima pendapatan/pensiun yang tidak bekerja lagi. Sementara definisi tenaga kerja itu sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

### **4.2. Saran Untuk Perbaikan Sakernas**

Jika melihat cakupan pertanyaan yang dimuat di dalam Sakernas sudah cukup lengkap dan terinci. Bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan penulisan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan dan banyaknya pertanyaan maupun jenis keterangan yang ditanyakan yang dapat berpengaruh terhadap hasil survei juga sudah diusahakan dalam bentuk ringkas/ sederhana mudah di mengerti dan tidak berubah-ubah.

Saran untuk perbaikan data Sakernas mungkin dimulai dari pemilihan petugas lapangan, petugas lapangan tersebut diharapkan benar-benar dapat menguasai materi dengan baik dan dapat menyampaikan pertanyaan kepada responden dengan jelas dan sederhana, sehingga jawaban yang diharapkan benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan dari masing-masing rincian pertanyaan tersebut.

## **Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah**

### **1. Gambaran Wilayah Penelitian**

#### **1.1. Kondisi Geografis**

Secara Geografis, Kota Palangka Raya terletak pada 113°29' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°25' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.678,51 km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi yang terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40 Persen.

Adapun luas wilayah tersebut terbagi menjadi :

1. Hutan seluas 1.502,00 Km<sup>2</sup>
2. Tanah Pertanian seluas 12,65 Km<sup>2</sup>
3. Tanah Pekarangan/Pemukiman seluas 300,06 Km<sup>2</sup>
4. Tanah Perkebunan seluas 6,09 Km<sup>2</sup>
5. Rawa seluas 400,03 Km<sup>2</sup>
6. Sungai seluas 100,09 Km<sup>2</sup>
7. Danau seluas 13,63 Km<sup>2</sup>
8. Lain-lain seluas 63,45 Km<sup>2</sup>

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, batas-batas wilayah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan serta Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka secara administratif tersusunlah lima kecamatan di Kota Palangka Raya, yaitu:

1. Kecamatan Pahandut
2. Kecamatan Jekan Raya
3. Kecamatan Sebangau
4. Kecamatan Bukit Batu
5. Kecamatan Rakumpit

Di Kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Pahandut, merupakan pusat pengendalian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan perekonomian. Dengan luas wilayah 35.262 km<sup>2</sup>, kecamatan ini terbagi menjadi empat kelurahan, yaitu: Palangka, Bukit Tunggal, Menteng dan Petuk Ketimpun.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Jekan Raya adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Rawi Kabupaten Gunung Mas, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungun Kecamatan Pahandut, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau.

Dari empat kelurahan yang terdapat di Jekan Raya, Kelurahan Menteng dan Palangka merupakan wilayah penelitian studi mendalam mengenai topik ketenagakerjaan ini, karena kedua kelurahan ini paling mudah dijangkau diantara empat kelurahan yang ada. Selain itu, kedua kelurahan memiliki karakteristik yang dianggap mewakili kelurahan lainnya dan memiliki jumlah pengangguran (belum atau tidak bekerja) secara absolut lebih banyak dari dua kelurahan lainnya.

## **1.2. Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Wilayah**

Kota Palangka Raya memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan luas wilayah yang kebanyakan adalah hutan. Sekitar 100.000 Ha area Palangka Raya berupa semak belukar, danau, ataupun sungai. Sementara sisanya terbagi untuk permukiman atau tempat usaha, perkebunan, dan ladang. Namun demikian, mata pencaharian penduduk Kota Palangka Raya bukanlah bertumpu pada sektor Pertanian atau Kehutanan akan tetapi bertumpu pada sektor Perdagangan.

Sarana dan prasarana yang cukup vital di Kota Palangka Raya adalah alat transportasi. Sedangkan alat transportasi yang paling berperan di Kota Palangka Raya adalah angkutan sungai. Salah satu pelabuhan yang memiliki catatan arus bongkar muat barang, keluar masuk kapal atau penumpang yang cukup tinggi adalah Pelabuhan Rambang. Walau kapasitas pelabuhan tradisional ini belum cukup banyak dan fasilitasnya sederhana, namun menjadi sarana angkutan yang diandalkan, selain angkutan darat. Hanya saja, kesulitan akan timbul saat kemarau tiba. Turunnya debit air sungai karena kemarau mengakibatkan perahu sebagai alat transportasi tak bisa beroperasi, dan ini menjadi masalah dalam kelancaran pendistribusian barang. Selain akibat kemarau, terganggunya sistem transportasi sungai juga sangat dipengaruhi oleh bencana rutin kabut asap. Demikian juga dengan sistem transportasi yang lain, seperti kendaraan bermotor dan pesawat terbang.

Bencana rutin kabut asap ini juga tidak hanya berdampak pada sistem transportasi atau perekonomian secara umumnya, namun juga berdampak pada masyarakat sekitar. Campuran gas karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan partikel kecil lain yang dihasilkan kabut asap dapat menimbulkan penyakit gangguan pernapasan ataupun iritasi mata dan penyakit kulit.

Fasilitas lain yang juga penting dalam memajukan kesejahteraan penduduk di Kota Palangka Raya adalah fasilitas pendidikan. Menurut Pemerintah Kota Palangka Raya, sejak tahun 1960-an, kemajuan di bidang pendidikan di Kota Palangka Raya mulai tampak, yang ditandai dengan didirikannya sekolah-sekolah Dasar, SMP dan SMA serta beberapa sekolah kejuruan. Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No.

141 tanggal 10 November 1963 dibentuk Universitas Negeri Palangka Raya yang terdiri dari 4 (empat) Fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Sedangkan pembangunan di bidang kesehatan baru kelihatan secara nyata dengan dibangunnya sebuah Rumah Sakit Pemerintah yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palangka Raya pada tahun 1965. Selain itu, didirikan pula Balai Pengobatan/Poliklinik (sekarang Puskesmas) pada tahun 1965 di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Bukit Batu-Tangkiling. Sehingga sampai saat ini di wilayah Kota Palangka Raya terdapat 3 (tiga) Rumah Sakit Pemerintah masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah Doris Sylvanus (dulu RSUD Palangka Raya), Rumah Sakit Korem, dan Rumah Sakit Bhayangkara, dan satu Rumah Sakit Swasta, serta terdapat 8 Puskesmas (2 Puskesmas di Kecamatan Pahandut, 4 Puskesmas di Kecamatan Jekan Raya dan 1 Puskesmas Pembantu/PUSTU di Kecamatan Sabangau). Untuk menjangkau daerah-daerah rawan kesehatan dan mempercepat pelayanan, masing-masing Puskesmas dilengkapi dengan sarana Pelayanan Puskesmas Keliling, baik kendaraan darat (Mobil) maupun kendaraan sungai.

Sementara itu, di Kecamatan Jekan Raya, mayoritas penduduk bertumpu pada sektor Perdagangan dan Konstruksi bagi daerah yang berada di pusat kota, sedangkan di daerah seperti Petuk Ketimpun mayoritas penduduknya bertumpu pada sektor Perikanan. Potensi lain yang dimiliki penduduk Jekan Raya adalah hasil hutan, terutama daerah Bukit Tunggul, dengan luas hutan, termasuk tanah kering dan padang rumput di Bukit Tunggul mencapai 1.453 Ha. Selain itu juga terdapat sumber daya dari hasil perkebunan yang ada di Kelurahan Bukit Tunggul dan Petuk Ketimpun.

Sarana, prasarana, dan infrastruktur di Kecamatan Jekan Raya cukup memadai. Di bidang pendidikan, ditandai dengan adanya bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara di bidang kesehatan, kelengkapan fasilitas ditandai dengan adanya Rumah Sakit, Praktek Dokter, Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu).

Infrastruktur berupa jalan juga sudah cukup bagus karena upaya pengaspalan dan pengerasan jalan terus dilakukan. Sarana ibadah seperti mesjid, gereja, sarana perdagangan seperti pasar, pertokoan, juga cukup memadai. Kelengkapan fasilitas yang dimiliki kecamatan ini disebabkan lokasi yang berada di pusat kota.

### **1.3. Kependudukan**

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2007, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Palangka Raya sekitar 188.123 jiwa yang terdiri dari 93.547 laki-laki (49,73 persen) dan 94.576 perempuan (50,27 persen). Dari angka tersebut dapat dihitung rasio jenis kelamin, yaitu sekitar 98,91 yang artinya dari 99 orang laki-laki terdapat 100 perempuan.

Sementara itu, dari hasil registrasi penduduk pada tahun terakhir, yaitu tahun 2005, Kecamatan Jekan Raya memiliki jumlah penduduk sekitar 91.139 jiwa dengan

jumlah rumah tangga sekitar 20.997 rumah tangga, atau sekitar 4 jiwa per rumah tangga. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penduduk di Kelurahan Palangka paling banyak diantara empat kelurahan yang ada di Jekan Raya, yaitu sekitar 40,07 persen, sedangkan di Menteng ada sekitar 35,34 persen. Seiring dengan jumlah penduduk, jumlah rumah tangga di kedua kelurahan menunjukkan paling banyak diantara kelurahan lain, yaitu masing-masing 41,41 persen dan 34,09 persen.

**Tabel 1.1. Distribusi Penduduk dan Rumah Tangga serta Rata-rata Jumlah Penduduk per Rumah Tangga menurut Kelurahan, 2005**

Kelurahan	Penduduk		Rumah Tangga		Rata-rata Jiwa/ Rumah Tangga
	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menteng	32 209	35,34	7 158	34,09	4
Palangka	36 519	40,07	8 695	41,41	4
Bukit Tunggal	20 644	22,65	4 679	22,28	4
Petuk ketimpun	1 767	1,94	465	2,21	4
Jumlah	91 139	100,00	20 997	100,00	4

Sumber : Kecamatan Jekan Raya dalam Angka Tahun 2005

#### 1.4. Perekonomian Penduduk

Mata pencaharian penduduk yang utama di Kota Palangka Raya bukanlah petani. Meski masih memiliki lahan yang cukup luas untuk digarap, justru mayoritas penduduk memilih berprofesi sebagai pedagang atau pegawai negeri. Menurut Pemerintah Kota Palangka Raya, dari sekitar 60.000 penduduk yang bekerja, 32 persen menggeluti sektor perdagangan dan 24 persen menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Penduduk yang bermata pencaharian pedagang, umumnya memperdagangkan komoditas dari luar daerah, seperti kebutuhan pokok, sandang, atau bahan bangunan yang didatangkan dari Banjarmasin, Surabaya, dan Semarang. Setelah disisakan untuk kebutuhan dalam kota, produk tersebut didistribusikan kembali ke wilayah Kalimantan Tengah lainnya.

Perdagangan juga menjadi sektor utama dalam memajukan perekonomian di Kecamatan Jekan Raya. Dari sekitar 4.948 orang penduduk yang bekerja, sekitar 53,54 persen bekerja di sektor Perdagangan, 25,57 persen bekerja di sektor Konstruksi, kemudian di urutan ketiga, mayoritas penduduk bekerja di sektor Pertanian, yaitu sekitar 9,03 persen. Sektor Peternakan menempati urutan terakhir dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor ini hanya sekitar 2,38 persen.

Bila dilihat menurut wilayah kelurahan, dari sekitar 1.421 orang penduduk yang bekerja di Menteng, 49,61 persen bekerja di sektor Perdagangan, kemudian 30,40 persen bekerja di sektor Konstruksi, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor Pertanian ada sekitar 10,77 persen dan sisanya bekerja di sektor Peternakan, Perikanan dan

Industri dengan persentase masing-masing sekitar 3,17 persen, 0,77 persen dan 5,28 persen.

Sementara itu, dari 1.711 orang penduduk yang bekerja di Palangka, 64,58 persen bekerja di sektor Perdagangan, kemudian 22,38 persen bekerja di sektor Konstruksi, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor Pertanian sekitar 5,90 persen (lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk Menteng) dan sisanya bekerja di sektor Peternakan, Perikanan dan Industri dengan persentase tidak lebih dari 5 persen.

**Tabel 1.2. Distribusi Penduduk yang Bekerja menurut Sektor dan Kelurahan, 2005**

Sektor	Menteng		Palangka		Bukit Tunggal		Petuk Ketimpun		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pertanian/Perkebunan	153	10,77	101	5,9	162	10,53	31	11,15	447	9,03
Peternakan	45	3,17	25	1,46	41	2,67	7	2,52	118	2,38
Perikanan	11	0,77	12	0,7	4	0,26	178	64,03	205	4,14
Industri	75	5,28	85	4,97	99	6,44	5	1,8	264	5,34
Konstruksi	432	30,4	383	22,38	446	29	4	1,44	1 265	25,57
Perdagangan	705	49,61	1 105	64,58	786	51,11	53	19,06	2 649	53,54
Jumlah	1 421	100,00	1 711	100,00	1 538	100,00	278	100,00	4 948	100,00

Sumber : Kecamatan Jekan Raya dalam Angka Tahun 2005

Bila membandingkan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Jekan Raya antar kelurahan, dapat disimpulkan bahwa di tiga Kelurahan, yaitu Menteng, Palangka dan Bukit Tunggal, mayoritas penduduk yang bekerja adalah pekerja pada sektor Perdagangan dan sektor Konstruksi, sedangkan di Kelurahan Petuk Ketimpun mayoritas penduduk justru adalah nelayan (penduduk yang bekerja pada sektor Perikanan), yaitu sekitar 64,03 persen atau 178 orang. Kemudian diikuti oleh pekerja di sektor Perdagangan, sekitar 19,06 persen.

Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2006-Listing (SE'06-L), jumlah perusahaan/ usaha yang terdapat di Kecamatan Jekan Raya ada sebanyak 7.513 perusahaan/usaha. Sebanyak 51,7 persen terdapat di Palangka, 24,0 persen terdapat di Menteng, dan 22,5 persen terdapat di Bukit Tunggal sedangkan perusahaan/usaha yang berada di Petuk Ketimpun hanya 1,8 persen.

Bila dibedakan menurut lokasi tempat usaha, yaitu tempat beroperasi secara *de facto* atau lokasi dimana usaha tersebut dilakukan, maka dari hasil pencacahan dapat diketahui bahwa sebanyak 2.034 perusahaan/usaha berlokasi di tempat tidak permanen, seperti usaha keliling, usaha kaki lima, usaha los/koridor dan pangkalan ojek motor. Sementara sebanyak 5.479 perusahaan/usaha lainnya berlokasi di tempat permanen, yaitu perusahaan/usaha yang dilakukan di bangunan khusus untuk usaha dan perusahaan/usaha yang dilakukan di bangunan campuran, atau bangunan yang menyatu dengan tempat tinggal.

Di kelurahan Menteng, jumlah perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat tidak permanen ada sebanyak 357 perusahaan/usaha (19,8 persen), sedangkan di Palangka ada sebanyak 1.315 perusahaan/usaha (33,8 persen). Sementara itu, jumlah perusahaan/usaha yang berlokasi di tempat permanen di Kelurahan Menteng dan Palangka masing-masing sebanyak 1.444 (80,2 persen) dan 2.570 (66,2 persen) perusahaan/usaha.

**Tabel 1.3. Distribusi Perusahaan/Usaha menurut Lokasi Tempat Usaha dan Kelurahan, 2006**

[Data diolah dari hasil Sensus Ekonomi-Listing, 2006]

Kelurahan	Tidak Permanen		Permanen		Permanen dan Tidak Permanen	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menteng	357	19,8	1 444	80,2	1 801	(24,0)
Palangka	1 315	33,8	2 570	66,2	3 885	(51,7)
Bukit Tunggal	337	19,9	1 357	80,1	1 694	(22,5)
Petuk Ketimpun	25	18,8	108	81,2	133	(1,8)
Jumlah	2 034	27,1	5 479	72,9	7 513	(100,0)

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah total perusahaan/usaha yang ada di Kecamatan Jekan Raya

## 2. Ketenagakerjaan

Dalam subbab ini akan dibahas mengenai kondisi ketenagakerjaan, antara lain penduduk yang bekerja, penduduk yang belum/tidak bekerja, pencari kerja, program-program atau bantuan-bantuan baik dari pemerintah, swasta atau swadaya masyarakat dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran penduduk serta tentang peranan Balai Latihan Kerja (BLK). Adapun nara sumber untuk memperoleh informasi diperoleh dari pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan BLK Kota Palangka Raya serta aparat Kecamatan Jekan Raya.

### 2.1. Kondisi Ketenagakerjaan

Menurut Disnaker Kota Palangka Raya, data yang digunakan untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Kota Palangka Raya bersumber dari BPS, BLK, Bapeda dan Disnaker sendiri. Sedangkan konsep yang digunakan tidak terlepas dari konsep BPS. Selain itu, untuk memprediksi data ketenagakerjaan, Disnaker akan melakukan Survei Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Khusus Kota pada tahun 2008. Sementara untuk melihat penawaran kerja, Disnaker dapat memprediksi dari jumlah kartu kuning yang dikeluarkan. Kartu kuning tersebut juga berguna untuk penyaluran tenaga kerja. Sedangkan dalam memantau kondisi permintaan tenaga kerja, Disnaker memperoleh informasi dari kunjungan perusahaan, laporan perusahaan dan iklan daerah.

Tidak berbeda dengan pendapat Disnaker, menurut Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan (PMK) Kecamatan Jekan Raya, konsep bekerja dan pengangguran yang digunakan di Kecamatan Jekan Raya mengacu pada Dinas Tenaga Kerja dan BPS. Demikian dengan sumber data yang kumpulan berasal dari kedua instansi tersebut yang dirangkum oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Ditinjau dari sudut pengangguran, walaupun lahan di wilayah kecamatan ini cukup luas, namun pengangguran dinilai cukup banyak, hal ini disebabkan oleh:

1. Sumber daya alam mulai menipis
2. Penebangan kayu legal sudah dibatasi
3. Penduduk sangat bergantung pada alam, sehingga jika alam sudah tidak mendukung untuk dieksplorasi maka mereka cenderung berhenti bekerja
4. Penambangan emas di Karangpangi Kalimantan Selatan sudah ditutup, padahal masyarakat Jekan Raya banyak yang bekerja di penambangan tersebut

Jika dilihat menurut kegiatan sehari-hari, maka mayoritas penduduk di Jekan Raya adalah pelajar atau mahasiswa, yaitu sekitar 49,03 persen, sementara penduduk yang bekerja sekitar 8,10 persen dan penduduk yang tidak/belum bekerja sekitar 21,09 persen. Sedangkan di kedua wilayah penelitian, yaitu Menteng dan Palangka, jumlah penduduk yang tidak bekerja masing-masing 19,97 persen dan 19,83 persen sementara penduduk yang bekerja sekitar 6,42 persen (1.421 orang) dan 7,11 persen (1.711 orang).

**Tabel 2.1. Distribusi Penduduk menurut Kegiatan Sehari-hari dan Kelurahan, 2005**

Kegiatan sehari-hari	Menteng		Palangka		Bukit Tunggal		Petuk Ketimpun		Jumlah	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelajar/Mahasiswa	11 967	54,1	12 096	50,25	5 570	40,59	320	27,05	29 953	49,03
Mengurus Rumah Tangga	3 945	17,84	4 928	20,47	3 103	22,61	222	18,77	12 198	19,96
Pensiunan	369	1,67	566	2,35	168	1,22	11	0,93	1 114	1,82
Belum/Tidak Bekerja	4 417	19,97	4 773	19,83	3 342	24,36	352	29,75	12 884	21,09
Bekerja	1 421	6,42	1 711	7,11	1 538	11,21	278	23,5	4 948	8,1
Jumlah	22 119	100,00	24 074	100,00	13 721	100,00	1 183	100,00	61 097	100,00

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Palangka Raya pada tahun 2006 mencatat pencari kerja yang teridentifikasi melalui kartu kuning ada sebanyak 9.142 orang, sekitar 53,27 persen berjenis kelamin laki-laki. Mayoritas pencari kerja berpendidikan SLTA dan sederajat (67,30 persen), sedangkan lulusan diploma dan sarjana S1 mencapai 28,46 persen. Sisanya merupakan lulusan SD, SLTP dan pasca sarjana. Komposisi pencari kerja berdasarkan pendidikan tersebut tidak menunjukkan perbedaan bila dibandingkan menurut jenis kelamin.

**Tabel 2.2. Rekapitulasi Pencari Kerja yang Teridentifikasi Melalui Kartu Kuning menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan, Tahun 2006**

Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-Laki+Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD dan sederajat	21	0,43	19	0,44	40	0,44
SLTP dan sederajat	248	5,09	93	2,18	341	3,73
SLTA dan sederajat	3 206	65,83	2 947	68,98	6 153	67,3
Diploma I, II, II dan Sarjana Muda	667	13,7	585	13,69	1 252	13,7
S1	726	14,91	623	14,58	1 349	14,76
S2 dan S3	2	0,04	5	0,12	7	0,08
Jumlah	4 870		4 272		9 142	
	(53,27)	100,00	(46,73)	100,00	(100,0)	100,00

Catatan : Angka dalam kurung menyatakan persentase pencari kerja menurut jenis kelamin

Sumber : Dinas Tenaga kerja

Pencari kerja pada tahun 2006 mengalami perubahan karena terjadi pendaftaran pencari kerja baru, penempatan dan penghapusan. Pencari kerja yang baru terdaftar menjelang tahun 2007 ada sebanyak 1.159, sedangkan pencari kerja yang berhasil ditempatkan/dialurkan ada sebanyak 118 orang, sedangkan pencari kerja yang tidak melapor atau tidak terdaftar lagi ada sebanyak 186, sehingga sampai dengan Bulan Mei tahun 2007, pencari kerja yang terdaftar 9.997 orang (Tabel 2.3 dan Tabel 2.4).

**Tabel 2.3. Rekapitulasi Jumlah Pendaftaran, Penempatan dan Penghapusan Pencari Kerja yang Teridentifikasi Melalui Kartu Kuning menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan, 2007**

Pendidikan	Pendaftaran			Penempatan			Penghapusan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SD dan sederajat	3	2	5	0	0	0	2	2	4
SLTP dan sederajat	19	13	32	2	0	2	3	4	7
SLTA dan sederajat	250	221	471	25	23	48	23	21	44
Diploma I, II, II dan Sarjana Muda	135	120	255	11	15	26	29	35	64
S1	189	191	380	18	24	42	35	32	67
S2 dan S3	10	6	16	0	0	0	0	0	0
Jumlah	606	553	1159	56	62	118	92	94	186

Catatan : L= Laki-laki, P= Perempuan, T= Laki-Laki + Perempuan

Sumber : Dinas Tenaga kerja

Bila dilihat menurut tingkat pendidikan, para pencari kerja tahun 2007 dengan tingkat pendidikan SLTA turun menjadi 65,34 persen, sedangkan lulusan diploma, sarjana dan pasca sarjana mengalami peningkatan. Pencari kerja lulusan diploma I, II, III dan sarjana muda ada sebanyak 14,17 persen. Sedangkan pencari kerja berpendidikan sarjana dan pasca sarjana masing-masing sekitar 16,20 persen dan 0,23 persen. Secara rinci dapat dilihat dari Tabel 2.4.

**Tabel 2.4. Rekapitulasi Pencari Kerja yang Teridentifikasi Melalui Kartu Kuning menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan, sampai dengan Mei Tahun 2007**

Pendidikan	Jenis Kelamin					
	Laki-laki		Perempuan		Laki-Laki+Perempuan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD dan sederajat	22	0,41	19	0,41	41	0,41
SLTP dan sederajat	262	4,92	102	2,18	364	3,64
SLTA dan sederajat	3 408	63,96	3 124	66,91	6 532	65,34
Diploma I, II, II dan Sarjana Muda	762	14,3	655	14,03	1 417	14,17
S1	862	16,18	758	16,23	1 620	16,2
S2 dan S3	12	0,23	11	0,24	23	0,23
Jumlah	5 328		4 669		9 997	
	(53,3)	100,00	(46,7)	100,00	(100,0)	100,00

Catatan: Angka dalam kurung menyatakan persentase pencari kerja menurut jenis kelamin

Sumber : Dinas Tenaga kerja

## 2.2. Program Ketenagakerjaan

Dalam menyikapi fenomena pengangguran, Pemerintah Kota Palangka Raya umumnya dan Pemerintah Kecamatan Jekan Raya khususnya, tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya: pembukaan bengkel kecil-kecilan, pengadaan usaha poles mobil dan usaha cuci motor. Usaha cuci motor telah dilakukan di empat kelurahan, sedangkan usaha poles mobil baru diadakan di Kelurahan Menteng saja. Selain itu, terdapat Program Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) dan pelatihan kerja di setiap kelurahan. Pelatihan yang dilakukan di BLK meliputi pelatihan dalam bidang otomotif, listrik, teknologi mekanik, dan bidang aneka kejuruan lainnya. Sedangkan pelatihan kerja di masing-masing kelurahan lebih memusatkan pada keterampilan wanita, seperti menjahit, memasak dan menata rias wajah.

Sumber dana untuk penanganan masalah pengangguran tersebut berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah melalui Departemen Tenaga Kerja, program P2KP (bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin kota) yang dimulai pada tahun 2007, serta dari Departemen Pertanian untuk pemberdayaan lahan.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah pengangguran, Kecamatan Jekan Raya telah mendaftarkan seluruh kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kota Palangka Raya yang nantinya akan didanai oleh APBD Kota Palangka Raya tahun 2008. Kegiatan tersebut diantaranya:

1. Kelurahan Palangka
  - a. Pelatihan teknologi proses berbasis agro makanan dan minuman
  - b. Teknis pembuatan dan pengemasan sirup nanas

- c. Teknis pembuatan tempe dari limbah tahu
  - d. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan dan makanan untuk usaha rumah tangga
2. Kelurahan Menteng
    - a. Pelatihan montir dan pertukangan bagi pemuda-pemudi yang belum memiliki keterampilan
    - b. Penyediaan alat memasak, seperti kompor, open, mixer, dll untuk mendukung upaya keterampilan ibu rumah tangga
    - c. Penyediaan alat menjahit, seperti mesin jahit, mesin obras, mesin neci, dll untuk mendukung upaya keterampilan ibu rumah tangga
    - d. Penyediaan mesin jahit untuk bahan kulit
    - e. Pelatihan menganyam rotan
  3. Kelurahan Bukit Tunggul
    - a. Pelatihan anggota LKK di Kelurahan Bukit Tunggul
    - b. Pelatihan keterampilan anggota karang taruna
  4. Kelurahan Petuk Ketimpun
    - a. Pelatihan menganyam purun
    - b. Pelatihan usaha perbengkelan
    - c. Penyediaan alat-alat salon untuk mendukung keterampilan
    - d. Penyediaan alat perbengkelan untuk karang taruna

Sementara itu, menurut pihak Disnaker, program yang sudah dan akan terus dilaksanakan di Kota Palangka Raya terkait dengan pengentasan pengangguran diantaranya:

1. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja melalui pembukaan usaha padat karya terutama di perdesaan
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas kerja melalui pelatihan kerja di BLK
3. Pengembangan kelembagaan melalui pelatihan bagi tenaga kerja yang sudah bekerja

Sedangkan sumber dana untuk mendukung program-program tersebut berasal dari pemerintah pusat, sekitar 1,5 miliar rupiah, sedangkan yang berasal dari pemerintah daerah untuk disalurkan ke Disnaker dan BLK sekitar Rp. 350 juta. Selain itu, BLK juga memperoleh dana dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk para pekerjanya di BLK.

### 2.3. Peran Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK Palangka Raya merupakan unit pelaksana teknis dibidang pelatihan di bawah pembinaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya. Sebagai unit pelaksana teknis dibidang pelatihan, maka tugas pokok BLK adalah:

1. Melakukan pelatihan kejuruan untuk masyarakat umum di Kota Palangka Raya
2. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi (CBT)
3. Merancang program latihan kejuruan untuk masyarakat umum maupun instansi pemerintah dan swasta
4. Memberikan pelayanan pelatihan masyarakat umum melalui pelatihan swadana
5. Melakukan penilaian kegiatan pelatihan dan peningkatan kualitas pelatihan
6. Melakukan kerjasama pelatihan dengan instansi pemerintah dan swasta atas persetujuan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya
7. Membuat administrasi pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya

Dengan demikian, tugas pokok dari BLK Kota Palangka Raya adalah:

1. Memasyarakatkan pelatihan
2. Melaksanakan uji kompetensi
3. Mengembangkan program pelatihan
4. Mengembangkan produksi barang dan jasa
5. Mengembangkan kerjasama internal dan eksternal

Adapun kegiatan yang telah dilakukan BLK Palangka Raya yang dikenal dengan istilah *three in one*, diantaranya:

1. Melakukan pelatihan
2. Melakukan uji kompetensi dengan sertifikasi
3. Melakukan penempatan kerja

Menurut sifat penyelenggaraan, program pelatihan dibedakan menjadi 2 jenis dengan waktu yang berbeda, yaitu:

1. Program Pelatihan Institusional yang dilaksanakan di dalam bengkel BLK
2. Program Pelatihan Non Institusional yang dilaksanakan di luar BLK, artinya, instruktur, peralatan dan bahan latihan di datangkan dari tempat asal peserta

Dengan demikian, maka dalam hal pelatihan, BLK Palangka Raya dapat bekerjasama dengan perusahaan. Sehingga dana untuk pelatihan selain dari APBN atau APBD, juga diperoleh dari perusahaan. Dana dari pemerintah digunakan untuk pelatihan

para pencari kerja yang mendaftar pada BLK, sedangkan dana dari perusahaan di gunakan untuk pelatihan para pekerja di perusahaan tersebut guna meningkatkan produktivitas kerja. Sedangkan program pelatihan yang selama ini dilaksanakan disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas, antara lain ruang bengkel, peralatan dan instruktur serta permintaan dari perusahaan, jika pelatihan yang dilakukan bekerjasama dengan suatu perusahaan. Adapun pelatihan kejuruan tersebut antara lain:

1. Otomotif, meliputi mobil bensin dan sepeda motor
2. Listrik, meliputi instalasi listrik, wikel/gulung dinamo, mesin pendingin, elektronika/*service audio*
3. Teknologi Mekanik, meliputi las listrik dan karbit, mesin logam/bubut dan scraf dan tukang tempa/pandai besi
4. Bangunan, meliputi mebelair dan tukang kayu bangunan
5. Tata Niaga, meliputi komputer
6. Aneka Kejuruan, meliputi menjahit

Tabel berikut menunjukkan pelatihan yang telah dilakukan di BLK Palangka Raya pada tahun 2006.

**Tabel 2.5. Jumlah Lulusan Pelatihan kerja di BLK Palangka Raya menurut Jenis Pelatihan Kejuruan, 2006**

Pelatihan Kejuruan	Lulus
(1)	(2)
<b>A. Institusional</b>	
Mesin Diesel	16
Mesin Bensin	16
Sepeda Motor	32
Instalasi Listrik	32
Mebel Kayu	16
Mesin Logam/shop	16
Las Listrik	16
Menjahit	32
Komputer	32
Tempa Besi	16
<b>Jumlah</b>	<b>224</b>
<b>B. Non Institusional</b>	
Instalasi Listrik	16
Teknik Pendingin	16
Elektronika	16
Meubelair	16
<b>Jumlah</b>	<b>64</b>

Sumber: BLK Kota Palangka Raya

Karena pelatihan di BLK ada dua jenis, yaitu pelatihan untuk para pencari kerja yang mendaftar pada BLK dan pelatihan untuk pekerja pada suatu perusahaan, maka proses rekrutmen calon peserta pelatihan juga dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Bagi para pencari kerja, tahapannya adalah:
  - a. Sosialisasi atau pengumuman dengan pemasangan poster atau spanduk
  - b. Pendaftaran calon peserta yang memenuhi syarat: memiliki kartu kuning, umur lebih dari 15 tahun atau umur kurang dari 15 tahun tetapi sudah tidak bersekolah lagi
  - c. Pelaksanaan seleksi calon peserta, hal ini perlu dilakukan karena adanya keterbatasan kapasitas, yaitu hanya mampu menampung sekitar 16-32 orang. Seleksi ini meliputi tes tertulis dan wawancara mengenai minat dan bakat
2. Bagi para pekerja perusahaan
  - a. Perusahaan mengajukan nama-nama calon peserta
  - b. BLK melakukan persiapan materi yang akan di ajarkan, karena harus sesuai dengan keinginan perusahaan dan kemampuan instruktur di BLK

Setelah dilakukan proses pelatihan, maka bagi para peserta yang berasal dari perusahaan kembali bekerja di perusahaan asalnya, setelah BLK memberikan sertifikat kelulusan berdasarkan uji keterampilan. Sedangkan bagi para peserta yang berasal dari masyarakat umum (pencari kerja), setelah dilakukan pelatihan, uji keterampilan dan mendapatkan sertifikat, penyaluran ke pasar tenaga kerja diserahkan pada Disnaker, karena proses penyaluran tenaga kerja adalah salah satu wewenang Disnaker, sementara BLK hanya melakukan pelatihan dan memberikan rekomendasi.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional, BLK Palangka Raya didukung oleh berbagai fasilitas pelatihan, yaitu berupa bangunan gedung perkantoran, bengkel, ruang pertemuan, asrama, perumahan instruktur (yang terletak di atas tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup>), peralatan, mesin latihan serta tenaga pengajar/instruktur.

BLK sebagai unit pelatihan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia di Palangka Raya perlu melakukan pembinaan, yang bertujuan untuk memantapkan keberadaan/eksistensi BLK yang tidak hanya dianggap sebagai pelaksana pelatihan yang menghabiskan anggaran pemerintah, namun juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan mampu mendorong tumbuhnya usaha baru. Adapun bentuk pembinaan di BLK Palangka Raya antara lain:

1. Peningkatan keterampilan bagi tenaga instruktur melalui diklat yang diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja atau melalui biaya pemerintah kota
2. Penyelenggaraan penyusunan program yang disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja ataupun peluang kerja dan usaha mandiri
3. *Job training* bagi instruktur ke perusahaan

4. Peningkatan pendayagunaan fasilitas latihan melalui pelatihan swadana, dan pelayanan jasa juga diharapkan dapat memberikan pelayanan production training
5. Pembinaan kepegawaian termasuk pengusulan kebutuhan tenaga pelatih

### 3. Situasi Ketenagakerjaan Rumah Tangga Responden

#### 3.1. Keterangan Demografi dan Pendidikan

Dalam penelitian ini, rumah tangga yang dicacah dari setiap kelurahan terpilih masing-masing lima rumah tangga. Responden yang berumur kurang dari 10 tahun sebanyak 8 orang dan responden yang berusia 10-14 tahun sebanyak 5 orang. Sedangkan responden yang berusia kerja (14 tahun ke atas) ada sebanyak 30 orang, sehingga total responden ada sebanyak 43 orang. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, yang menjadi responden penelitian ini adalah 22 orang laki-laki dan 21 orang perempuan.

**Tabel 3.1. Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

[Data diolah berdasarkan hasil studi mendalam]

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
< 10 Tahun	4	4	8
10-14 Tahun	4	1	5
15 Tahun Ke atas	14	16	30
Total	22	21	43

Bila dilihat menurut partisipasi sekolah, dapat diketahui bahwa dari 43 responden, penduduk yang berusia kerja dan tidak atau belum pernah sekolah ada sebanyak 2 orang, sedangkan yang masih sekolah dan tidak bersekolah lagi masing-masing 6 dan 22 orang. Secara total, responden yang tidak atau belum pernah sekolah ada sebanyak 5 orang, sedangkan yang masih sekolah dan tidak bersekolah lagi masing-masing 15 dan 23 orang.

Dilihat dari kesejahteraan menurut persepsi responden yang diukur melalui pendapatan yang diperoleh selama setahun terakhir, jawaban responden bervariasi. Dua rumah tangga menyatakan cukup sejahtera, empat rumah tangga menyatakan kurang sejahtera karena memiliki penghasilan yang tidak tetap, dua responden menyatakan kurang sejahtera karena selain merasa penghasilan tidak cukup dan tidak tetap juga mengandalkan dari pekerjaan isteri. Sedangkan dua responden rumah tangga lainnya masing-masing merasa relatif sejahtera dan tidak sejahtera karena kadang-kadang masih mengandalkan pemberian dari orang tua.

**Tabel 3.2. Distribusi Responden menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur**

[Data diolah berdasarkan hasil studi mendalam]

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Jumlah
	Tdk/ Blm Pernah Sekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 10 Tahun	3	5	0	8
10-14 Tahun	0	4	1	5
15 Tahun Ke atas	2	6	22	30
Jumlah	5	15	23	43

Sedangkan bila dilihat menurut siapa anggota rumah tangga yang penghasilannya paling besar, tujuh rumah tangga menyatakan bahwa KRT yang mempunyai penghasilan terbesar, baik karena sebagai pekerja maupun pengusaha. Dua rumah tangga mengaku bahwa penghasilan terbesar adalah ART (dalam hal ini adalah isteri) yang berstatus pekerja maupun pengusaha. Sedangkan satu rumah tangga lainnya menganggap bahwa KRT yang mempunyai penghasilan terbesar sebagai penerima pendapatan, karena KRT kadang bekerja kadang menganggur.

### 3.2. Keterangan Ketenagakerjaan

Dalam bahasan ini akan diuraikan kondisi ketenagakerjaan anggota rumah tangga menurut konsep BPS dan pemahaman responden. Perbedaan konsep terjadi ketika cara bertanya yang berbeda. Misalkan untuk mengetahui responden bekerja atau tidak, dengan pertanyaan "Apakah bekerja selama seminggu yang lalu?" terdapat perbedaan jawaban dengan pertanyaan "seperti diketahui, orang bisa bekerja untuk mendapatkan bayaran uang atau barang, atau tanpa bayaran tetapi membantu menambah penghasilan. Ada yang berjualan, mempunyai usaha kecil-kecilan, bekerja membantu di pertanian atau usaha keluarga. Apakah Anda melakukan kegiatan itu minimal 1 jam terus menerus dalam seminggu yang lalu?". Responden mempunyai pemahaman yang berbeda dalam mendefinisikan bekerja, mereka cenderung menganggap bahwa pekerja tidak dibayar tidak termasuk bekerja.

Berdasarkan konsep bekerja BPS, dari seluruh responden yang dapat dikategorikan dalam angkatan kerja, penduduk yang bekerja ada sebanyak 19 orang dan sedang mencari pekerjaan ada sebanyak 4 orang, sedangkan yang tidak mencari pekerjaan ada 25 orang. Untuk status pekerjaan, responden yang berstatus berusaha sendiri ada 2 orang, yaitu sebagai pengumpul barang bekas, seperti barang dari plastik dan besi. Responden yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar ada sebanyak 5 orang (pengusaha Industri Makanan dan Pedagang Eceran). Responden buruh atau karyawan ada sebanyak 3 orang (konsultan supervisi, satpam PT. Telkomsel, dan tukang parkir di supermarket). Sementara, pekerja bebas di sektor non pertanian ada sebanyak 3 orang (buruh bangunan) dan pekerja tak dibayar sebanyak 7 orang.

Pekerjaan tambahan menurut konsep BPS adalah pekerjaan selain pekerjaan utama. Untuk membedakan pekerjaan utama dengan pekerjaan tambahan dapat dilihat dari jumlah jam kerja, penghasilan atau menurut pendapat responden. Pekerjaan dengan jam kerja terbanyak dikategorikan pekerjaan utama, kemudian jika pekerjaan yang dilakukan memiliki jumlah jam kerja yang sama, maka pekerjaan utama adalah pekerjaan dengan penghasilan terbesar, namun jika keduanya sama, maka responden berhak memilih mana yang dikategorikan pekerjaan utama.

Beberapa responden cenderung menganggap bahwa pekerjaan utama mereka adalah pekerjaan dengan penghasilan terbesar. Contohnya salah satu responden yang bekerja mencuci pakaian di dua rumah tangga dengan jam kerja 4 jam per hari (jam kerja masing-masing rumah tangga 2 jam per hari selama 5 hari dalam seminggu) dengan bayaran Rp. 250.000 per bulan untuk setiap rumah tangga yang mempekerjakannya. Responden tersebut juga membuat kue basah dengan jam kerja selama 5-6 jam per hari selama 5 hari dalam seminggu dengan penghasilan yang didapat sekitar Rp. 15.000 per hari (sekitar Rp. 300.000 per bulan). Responden menganggap pekerjaan utamanya adalah mencuci baju bukan membuat kue karena penghasilan dari mencuci baju lebih besar, yaitu Rp. 500.000.

Dalam hal jumlah jam kerja, berdasarkan penelitian di lapangan, rata-rata responden memiliki jam kerja sekitar 41,6 jam per minggu. Perhitungan tersebut mengacu pada konsep BPS mengenai jam kerja, yaitu jumlah waktu pada saat seseorang melakukan pekerjaan dikurangi waktu yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, misalnya waktu istirahat, waktu berkunjung ke tempat saudara, dll. Pada beberapa responden menganggap bahwa jam kerja adalah jam berangkat atau sampai dikantor hingga pulang, tanpa memperhitungkan waktu istirahat atau waktu lainnya.

Dalam hal penghasilan atau upah/gaji yang diterima selama sebulan, berdasarkan penelitian di lapangan, rata-rata responden memperoleh upah/gaji sekitar Rp. 464.000. Penghasilan terbesar Rp. 2.500.000 (konsultan supervisi) dan penghasilan terkecil Rp. 250.000 (pedagang eceran). Konsep tersebut mengacu pada konsep BPS yang menyatakan bahwa penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan dalam bentuk uang maupun barang. Namun beberapa responden menganggap bahwa penghasilan yang dimaksud adalah dalam bentuk uang saja.

#### **4. Saran Perbaikan Sakernas**

##### **4.1. Perbedaan Konsep Ketenagakerjaan**

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan Disnaker, Pemerintah Kecamatan ekan Raya dan BLK relatif sama karena mengacu pada konsep BPS yang sesuai dengan konsep ILO. Sementara itu, konsep lain yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, Disnaker mengacu pada beberapa deregulasi atau peraturan-peraturan khusus. Deregulasi atau peraturan khusus tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang

Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Keppres Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang kartu kuning, dll. Deregulasi atau peraturan-peraturan tersebut juga menjadi acuan Disnaker dalam membuat kebijakan atau melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam hal penghitungan pengangguran, konsep yang digunakan BPS adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Disnaker mempunyai pendekatan lain dalam mengukur pengangguran, yaitu dengan melihat jumlah orang yang mendaftar ke Disnaker dan mendapat kartu kuning. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi mengenai pekerja anak. Menurut Kepala Pengurus BLK, seorang anak tidak dapat dikatakan sebagai pekerja anak jika tujuan orang tua anak mempekerjakan anak tersebut untuk melatih kecakapan atau membekali pengalaman walaupun pada akhirnya mendapat penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan.

Sedangkan menurut beberapa pendapat responden rumah tangga, definisi pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan termasuk juga pekerja keluarga dan pekerja serabutan, sedangkan dalam hal konsep bekerja, responden memandang bahwa seseorang yang bekerja adalah orang yang pekerjaannya tetap, atau orang yang mendapatkan upah/gaji atau penghasilan atau orang yang bekerja dengan adanya jam kerja setiap hari. Dalam hal ini, konsep bekerja minimal satu jam berturut-turut tidak terputus dalam seminggu kurang dapat diterima, karena dianggap terlalu sedikit. Beberapa responden menganggap batasan bekerja minimal dua atau beberapa hari selama seminggu tanpa melihat beberapa jam, asalkan ada kegiatan memperoleh penghasilan pada beberapa hari tersebut.

Perbedaan lain, dalam konsep BPS, pengalaman kerja tidak terbatas pada pekerjaan yang menghasilkan uang secara riil, dalam arti pengalaman kerja tersebut juga termasuk pekerjaan yang tidak ada upah/bayarannya (bagi pekerja tidak dibayar). Namun beberapa responden cenderung menjawab dengan jawaban yang sama ketika ditanya "kapan pertama kali bekerja/berusaha?" dan kapankah pertama kali bekerja/berusaha yang benar-benar menghasilkan uang atau barang?". Hal tersebut menunjukkan adanya persepsi yang sama bahwa pengalaman kerja yang dimaksud adalah pekerjaan yang ada upah/penghasilannya.

#### **4.2. Saran untuk Perbaikan Sakernas**

Dengan adanya perbedaan pemahaman konsep ketenagakerjaan (baik pengangguran maupun penduduk yang bekerja) menunjukkan bahwa konsep BPS walaupun sudah jelas dan rinci, namun belum dapat dipahami oleh masyarakat luas. Mereka hanya mengetahui bahwa bekerja identik dengan bekerja tetap atau formal dan ada indikator mendapatkan upah/gaji. Sedangkan pengangguran diartikan sebatas orang yang tidak mempunyai kegiatan untuk menghasilkan uang. Namun setelah mereka mengetahui secara rinci konsep-konsep yang digunakan BPS mereka dapat

menerimanya. Sehingga secara konsep dapat dikatakan bahwa konsep yang digunakan BPS dalam pelaksanaan Sakernas sudah baik dan memiliki batasan yang jelas. Hanya saja dalam batasan waktu minimal bekerja perlu diperhatikan lagi karena dianggap terlalu sedikit. Selain itu, agar jawaban responden dapat sesuai konsep, sebaiknya pertanyaan lebih mengacu pada konsep, karena tidak semua pencacah Sakernas dapat melakukan *probing* dengan baik ketika bertanya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

<https://www.bps.go.id>

### **Kota Kendari - Sulawesi Tenggara**

#### **1. Gambaran Wilayah Penelitian**

Pembangunan Kota Kendari pada dasarnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang menempatkan penduduk pada peranan yang sangat penting, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan. Agar program pembangunan yang dilaksanakan dapat berhasil guna secara maksimal perlu didukung oleh tersedianya informasi yang lengkap tentang ketenagakerjaan karena tenaga kerja merupakan salah satu modal penggerak roda pembangunan.

##### **1.1. Keadaan Geografis**

Wilayah Kota Kendari dengan ibu kotanya Kendari dan sekaligus juga sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis terletak di bagian Selatan Khatulistiwa yang berada di antara 30 54' 30" - 40 3' 11" Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 1220 23' - 1220 39' Bujur Timur. Wilayah Kota Kendari sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Kendari, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Sampara.

Kota Kendari terbentuk dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 1995 dengan status Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari. Luas wilayah Kota Kendari 295,89 Km<sup>2</sup> atau sekitar 0,70 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah Kota Kendari terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah daratannya sebagian besar di Pulau Sulawesi mengelilingi Teluk Kendari dan juga di Pulau Bungkutoko.

Kota Kendari terdiri dari 10 kecamatan dengan luas yang beragam. Kecamatan Poasia merupakan wilayah kecamatan yang terluas yaitu 52,52 Km<sup>2</sup> atau sekitar 17,75 persen luas Kota Kendari. Kemudian disusul Kecamatan Abeli, Kecamatan Puwatu, Kecamatan Baruga, Kecamatan Kambu, Kecamatan Mandonga, Kecamatan Kendari Barat, Kecamatan Kendari, Kecamatan Wua-Wua, dan Kecamatan Kadia. Kecamatan Kendari yang menjadi tempat studi kualitatif ini luas wilayahnya hanya 14,19 Km<sup>2</sup> atau sekitar 4,8 persen luas Kota Kendari. Kecamatan Kendari sendiri terbagi menjadi 8 kelurahan. Wilayah terluas di Kelurahan Mangga Dua yaitu 4,20 Km<sup>2</sup> atau 29,60 persen dari luas Kecamatan Kendari, sedangkan wilayah terkecil terletak di Kelurahan Kampung Salo, hanya 0,17 Km<sup>2</sup> atau sebesar 1,20 persen. Sementara luas Kelurahan Kasilampe sebagai tempat penelitian sebesar 0,54 Km<sup>2</sup> atau sekitar 3,81 persen dari luas Kecamatan Kendari. Dapat dilihat pada Tabel 1.1. Alasan Kecamatan Kendari dan Kelurahan Kasilampe dipilih dalam studi mendalam ini karena faktor kedekatan wilayah tersebut dari Ibu Kota Provinsi.

**Tabel 1.1. Luas Wilayah Kecamatan Kendari menurut Kelurahan, 2006**

No.	Kelurahan	Luas	
		Km <sup>2</sup>	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kandai	0,33	2,33
2	Gunung Jati	3,70	26,07
3	Kendari Caddi	0,59	4,16
4	Kasilampe	0,54	3,81
5	Kampung Salo	0,17	1,20
6	Mangga Dua	4,20	29,60
7	Matta	2,34	16,49
8	Purirano	2,32	16,35
Kecamatan Kendari		14,19	100,00

Sumber : Kota Kendari Dalam Angka

## 1.2. Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Wilayah

Sesuai letak Kota Kendari yang berada di pinggir pantai, maka potensi sumber daya alam terbesar berasal dari hasil-hasil pertanian, khususnya sub sektor perikanan. Hasil produksi ikan pada tahun 2006 mencapai 25,6 ribu ton, meningkat 0,02 persen dibanding tahun 2005. Hasil produksi ikan tersebut terdiri dari produksi perikanan laut sebesar 25,5 ribu ton (99,63 persen) dan perikanan darat 94,35 ton (0,37 persen). Hasil perikanan tersebut menduduki peringkat pertama komoditas ekspor, sekalipun volume dan nilainya selama tahun 2004-2006 mengalami penurunan. Pada tahun 2004 ekspor hasil perikanan mencapai 1,4 ribu ton dengan nilai 7,3 juta US\$, pada tahun 2006 volumenya turun drastis menjadi 383,9 ton senilai 415,6 ribu US\$. Pada tahun yang sama perdagangan antar pulau komoditas perikanan mencapai 3,6 juta ton dengan nilai 39,2 miliar rupiah.

Sarana pendidikan yang tersedia di Kota Kendari pada tahun 2006/2007 (swasta+negeri) adalah sebagai berikut ; Sekolah Dasar mencapai 126 sekolah, SMTP sebanyak 38 sekolah, SMTA 35 sekolah, dan 8 perguruan tinggi. Sarana kesehatan antara lain ; 11 rumah sakit, 7 puskesmas, 20 puskesmas pembantu, dan 4 puskesmas plus. Sementara tenaga kesehatan sudah cukup lengkap, masing-masing 42 dokter (termasuk dokter spesialis), 14 dokter gigi, 100 bidan, 201 perawat, 4 apoteker, dan 120 tenaga kesehatan lainnya. Sementara di Kecamatan Kendari sendiri terdapat 5 dokter spesialis, 3 dokter umum, dan 1 dokter gigi, 11 perawat, 9 bidan, dan 6 tenaga kesehatan lainnya. Sarana penunjang kesehatan lainnya adalah Posyandu sebanyak 14, dengan jumlah kader posyandu sebanyak 88 kader.

Jalan-jalan yang dilalui penduduk sebagai akses untuk menuju ke sarana pendidikan dan kesehatan sudah cukup memadai di Kota Kendari. Kondisi jalan yang sudah beraspal mencapai 78,60 persen dibanding jalan yang berkondisi rusak. Angkutan darat seperti sepeda motor memegang peranan penting disamping angkutan umum penumpang jenis mikrolet (minibus/12-32 seat). Disamping angkutan darat, sarana angkutan laut juga sangat diperlukan di Kota Kendari. Hal ini dikarenakan sebagian daerahnya merupakan pantai dan memiliki satu pelabuhan yang potensial sebagai sarana dan prasarana transportasi dari daerah satu ke daerah yang lain.

Fasilitas lain sebagai penunjang kebutuhan masyarakat terhadap media komunikasi masyarakat, di Kecamatan Kendari baru berdiri 1 kantor pos tambahan. Kantor pos (pusat) terdekat terletak di Kecamatan Mandonga. Fasilitas penginapan juga tersedia di Kecamatan Kendari yaitu ada 5 hotel non berbintang, dengan 44 kamar dan 53 tempat tidur.

### 1.3. Kependudukan

Penduduk Kota Kendari pada tahun 2004 menurut "Kota Kendari Dalam Angka" sebanyak 222.955 jiwa. Pada tahun 2005 jumlah penduduk meningkat menjadi 226.056 jiwa, dan pada tahun 2006 jumlahnya telah mencapai 244.586 jiwa. Sehingga selama kurun waktu 2004-2006 laju pertumbuhan penduduk Kota Kendari sebesar 4,74 persen per tahun. Sementara jumlah penduduk Kecamatan Kendari pada tahun 2006 sebesar 25.176 jiwa, penduduk Kelurahan Kasilampe mencapai 3.221 jiwa atau meningkat 3,10 persen dibanding tahun sebelumnya (3.124 jiwa).

**Tabel 1.2. Jumlah Penduduk dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Kendari menurut Kecamatan, 2004 – 2006**

Kecamatan	Jumlah penduduk			Laju pertumbuhan (%)
	2004	2005	2006	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mandonga	51.244	53.605	35.442	-30,84
2. Baruga	56.397	57.421	12.630	-77,61
3. Poasia	33.524	36.623	18.972	-43,41
4. Abeli	18.388	18.685	20.801	13,12
5. Kendari	23.548	21.156	25.176	6,91
6. Kendari Barat	39.854	38.566	41.712	4,66
7. Puwatu	-	-	22.567	-
8. Wua-wua	-	-	19.589	-
9. Kadia	-	-	28.046	-
10. Kambu	-	-	19.651	-
Kota Kendari	222.955	226.056	244.586	4,74

Sumber : Kota Kendari Dalam Angka

Jika dilihat menurut kecamatan, laju pertumbuhan Kecamatan Abeli dan Kecamatan Kendari berada di atas laju pertumbuhan penduduk Kota Kendari, yaitu masing-masing sebesar 13,12 persen dan 6,91 persen. Kecamatan Kendari Barat mengalami pertumbuhan sebesar 4,66 persen. Sedangkan Kecamatan Mandonga, Kecamatan Baruga, dan Kecamatan Poasia mengalami pertumbuhan negatif (Tabel 1.2). Pertumbuhan yang negatif tersebut disebabkan oleh adanya pemekaran kecamatan pada tahun 2006, antara lain Kecamatan Mandonga mekar menjadi Kecamatan Mandonga dan Kecamatan Puwatu, kemudian Kecamatan Baruga mekar menjadi Kecamatan Baruga, kecamatan Wua-Wua dan Kecamatan Kadia. Sedangkan Kecamatan Poasia mekar menjadi Kecamatan Poasia dan Kecamatan Kambu.

Struktur umur penduduk suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu jika angka kelahiran pada suatu daerah sangat tinggi maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda. Keadaan struktur umur penduduk di Kota Kendari pada tahun 2006 menunjukkan bahwa sekitar 41,98 persen (102.677 jiwa) dari jumlah penduduk Kota Kendari adalah penduduk usia muda yang berumur di bawah 20 tahun. Hal senada juga terjadi di Kecamatan Kendari, penduduk usia muda yang berumur di bawah 20 tahun mencapai sekitar 91,93 persen. Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan Kota Kendari adalah 125.057 jiwa (51,13 persen) dan penduduk laki-laki 119.529 jiwa (48,87 persen), sehingga rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Sementara di Kecamatan Kendari jumlah penduduk perempuan sebanyak 13.366 jiwa (53,09 persen) dan 11.810 jiwa (46,91 persen) penduduk laki-laki, sehingga rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 88 penduduk laki-laki.

**Tabel 1.3. Kepadatan Penduduk Kota Kendari menurut Kecamatan, 2006**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk per Km <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mandonga	22,65	35.442	1.565
2. Baruga	41,68	12.630	303
3. Poasia	52,52	18.972	361
4. Abeli	50,49	20.801	412
5. Kendari	14,19	25.176	1.774
6. Kendari Barat	21,31	41.712	1.957
7. Puwatu	42,70	22.567	528
8. Wua-wua	11,63	19.589	1.684
9. Kadia	9,97	28.046	2.813
10. Kambu	28,75	19.651	684
Kota Kendari	295,89	244.586	827

Sumber : Kota Kendari Dalam Angka

Kepadatan penduduk Kota Kendari pada tahun 2006 sekitar 827 penduduk per Km<sup>2</sup>, lebih padat dibanding tahun sebelumnya yang baru mencapai 764 penduduk per Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kadia sekitar 2.813 penduduk per Km<sup>2</sup>, disusul Kecamatan Kendari Barat sekitar 1.957 dan Kecamatan Kendari sebesar 1.774 penduduk per Km<sup>2</sup>.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kota Kendari sebagian besar tamat SMTA, yaitu sebesar 34,64 persen. Kemudian tamat SMTP sebesar 17,79 persen, tamat SD 16,25 persen, dan belum/tidak tamat SD 14,46 persen. Selebihnya adalah penduduk tamat Diploma dan universitas. Tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kasilampe tidak jauh berbeda, yakni sekitar 76,85 persen merupakan tamatan SMTA, kemudian 15,18 persen belum sekolah/belum tamat SD. Selebihnya penduduk yang tamat SD, SMTA, dan Diploma ke atas masing-masing kurang dari 5 persen.

### **1.4. Perekonomian Penduduk**

Struktur perekonomian Kota Kendari sejak tahun 2002 mengalami pergeseran. Jika pada tahun-tahun sebelumnya sektor yang mendominasi perekonomian Kota Kendari adalah sektor Pertanian, maka sejak tahun 2002 kontribusi terbesar berasal dari sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Hingga tahun 2005, kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto Kota Kendari masih dari sektor Angkutan dan komunikasi, yaitu sebesar 24,22 persen. Kontribusi terbesar kedua berasal dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mempunyai peranan sebesar 19,37 persen. Penyumbang tertinggi ketiga adalah sektor Pertanian sebesar 19,26 dan keempat sektor Jasa-Jasa sebesar 11,44 persen.

Sebagaimana tertuang dalam GBHN, pembangunan industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, dan meningkatkan ekspor dalam menunjang pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan energi serta sumber daya manusia. Perusahaan yang bergerak di sektor Industri di Kota Kendari mencapai 18 perusahaan industri besar/średang yang sudah menyerap tenaga kerja lebih dari 2000 tenaga kerja. Sementara di Kecamatan Kendari hanya ada 4 perusahaan Besar/Sredang, namun mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.163 orang.

Khusus Kelurahan Kasilampe (Kecamatan Kendari) yang dijadikan obyek penelitian, menurut Lurah Kasilampe (Muh. Nasir Muhsin) mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap ikan (laut), yaitu sekitar 60 persen, selebihnya bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan buruh/swasta. Hal ini disebabkan letak Desa Kasilampe yang berada di pesisir laut. Kegiatan menangkap ikan nelayan desa ini sudah merambah sampai ke Nusa Tenggara Timur dan Papua. Namun akhir-akhir ini usaha penangkapan ikan sebagai sumber penghasilan utama warga Kasilampe mulai surut. Faktor utama yang mempengaruhi adalah semakin berkurangnya hasil tangkapan akibat dari pencurian besar-besaran oleh nelayan dari negeri lain yang sampai saat ini masih sering terjadi.

Sebenarnya pencurian tersebut sudah menjadi rahasia umum dan sudah diketahui oleh pemerintah daerah setempat, namun sampai saat ini belum ada tindakan apapun dan pengawasan dari pihak keamanan. Oleh karena sumber penghasilan dari menangkap ikan sudah tidak menjanjikan, maka warga banyak yang beralih ke usaha kerajinan rumah tangga membuat korden. Namun kendala yang mereka hadapi adalah kurangnya modal usaha. Usaha kerajinan membuat korden ini banyak dieskpor ke daerah lain, seperti Ternate (Maluku Utara).

## **2. Ketenagakerjaan**

Nara sumber pada studi mendalam Ketenagakerjaan ini disamping dari BPS Provinsi Sulawesi Tenggara juga dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertrans) Kota Kendari yang diwakili oleh Kabag. Tata Usaha, Bapak Armin Daming, S.Sos dan Subdin Bina Program Disnakertrans. Narasumber lainnya adalah M. Partomuan Harahap selaku Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Lurah Kasilampe Muh. Nasir Muhsin, dan salah satu ketua RT di Kelurahan Kasilampe. Informasi mengenai ketenagakerjaan selama ini menurut Kabag. TU Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari (Armin Daming, S.Sos) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Kendari, yaitu dari Publikasi Kota Kendari Dalam Angka, hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas).

### **2.1. Kondisi Ketenagakerjaan**

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan upaya untuk mengatasi persoalan penduduk yang termasuk angkatan kerja melalui perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja baru, mengurangi jumlah setengah pengangguran, mengadakan pelatihan ketrampilan tenaga kerja dan melindungi tenaga kerja dari kegiatan pemerasan dan eksploitasi. Menurut Publikasi Kota Kendari Dalam Angka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kota Kendari selama tahun 2005-2006 mengalami penurunan dari 56,62 persen menjadi 52,50 persen. TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Pada periode yang sama TPAK perempuan turun dari 43,56 persen menjadi 35,30 persen. Sementara TPAK laki-laki sedikit meningkat dari 70,29 persen menjadi 70,97 persen. Jika dilihat menurut lapangan usaha, penduduk yang bekerja/usaha di Kota Kendari pada tahun 2006 sebagian besar bergerak di sektor Jasa-Jasa, yaitu sekitar 39,41 persen. Sementara penduduk yang bekerja/usaha di sektor Perdagangan serta Transportasi dan Komunikasi masing-masing sekitar 22,36 persen dan 13,75 persen. Selebihnya bergerak di sektor lain.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2005 di Kota Kendari masih cukup tinggi, yaitu sebesar 24,64 persen, terutama TPT perempuan yang mencapai 40,56 persen, sedangkan TPT laki-laki hanya sebesar 13,40 persen. Namun seiring penurunan TPAK, pada tahun 2006 TPT juga turun menjadi 19,60 persen, demikian juga dengan TPT perempuan (33,42 persen) maupun TPT laki-laki (12,23 persen).

Menurut Lurah Kasilampe, angkatan kerja di Kelurahan Kasilampe sekitar 2.104 orang dan merupakan usia produktif antara 15-55 tahun. Tingkat pengangguran saat ini masih cukup tinggi, yaitu sekitar 20 persen dari angkatan kerja, dan trennya cenderung meningkat setiap tahunnya. Penyebab masih tingginya angka pengangguran ini antara lain lapangan pekerjaan di daerah tersebut yang masih sempit, banyaknya PHK dari perusahaan/usaha yang gulung tikar, dan SDM penduduk desa tersebut yang masih rendah.

### **2.2. Program Ketenagakerjaan**

Menurut Subdin Bina Program Disnakertrans, TPAK yang semakin menurun dan masih cukup tingginya tingkat pengangguran di Kota Kendari diakibatkan karena kesempatan kerja yang masih rendah dan kurangnya ketrampilan tenaga kerja. Keadaan ini diperparah dengan adanya berbagai kesepakatan seperti AFTA, APEC, dan WTO yang mengarah pada terjadinya migrasi tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal ini berimbas pada semakin sulitnya para pencari kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan dengan bekal kualitas tenaga kerja yang masih rendah. Keadaan tersebut diantisipasi oleh pemerintah melalui Disnakertrans dengan program-program dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran, khususnya di Kota Kendari. Program-program tersebut antara lain ;

#### *1 Peningkatan Ketrampilan Produktivitas Tenaga Kerja (PKPTK)*

Berupa pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ini bertujuan untuk mendorong, memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan pelatihan kerja serta aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sasaran dari program ini adalah tersedianya tenaga kerja yang kompeten, bersertifikat dan produktif serta berdaya saing tinggi untuk ditempatkan di dalam maupun di luar negeri. Pelatihan dapat diberikan kepada para pencari kerja maupun yang sudah bekerja. Pelaksanaan latihan ketrampilan kerja berdasarkan Standar Latihan Kerja (SLK) dan yang mengacu pada Standar Kualifikasi Ketrampilan (SKK) yang telah ditetapkan sehingga program ini akan luwes untuk dikembangkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelatihan ketrampilan tenaga kerja pola institusional dilaksanakan dalam lingkup kelembagaan Balai Latihan Kerja (BLK), sedangkan pola non institusional dilaksanakan berdasarkan model Mobile Training Unit secara mobile di desa/kelurahan. Hampir semua instansi sudah berpartisipasi dalam pelatihan ketrampilan kecuali BPS. Harapan dan saran dari Disnakertrans adalah tenaga kerja yang telah dilatih dalam program pelatihan diharapkan akan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dan mampu meningkatkan produktivitas kerja, yang pada akhirnya akan membuka kesempatan kerja baru. Oleh karena itu program pelatihan kerja perlu ditingkatkan dalam rangka mengantisipasi masalah ketenagakerjaan baik menyangkut pengentasan pengangguran maupun peningkatan produktivitas kerja.

## 2 Bursa Tenaga Kerja

Sampai saat ini pelayanan bursa kerja oleh pemerintah pengelolaanya masih bersifat konvensional atau semi konvensional dan sumber daya manusia yang mengelolanya masih kurang mengantisipasi kebutuhan masyarakat ataupun kemajuan teknologi informasi, sehingga dapat dikatakan pelayanan bursa kerja belum maksimal dalam memberikan pelayanan informasi kepada para pencari kerja dan pengusaha. Data tentang pencari kerja, lowongan yang terdaftar dan penempatan yang dihimpun Disnakertrans dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Pencari Kerja, Lowongan yang Terdaftar, dan Penempatan di Kota Kendari, 2004 - 2006**

No.	Keterangan	Tahun		
		2004	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pencari kerja	8 201	4 895	4 183
2	Lowongan yang terdaftar	1 195	60	1 560
3	Penempatan	1 195	60	1 558

## 3. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPK)

Programnya berupa informasi mengenai ketenagakerjaan, padat karya, dan usaha mandiri. Informasi tentang lowongan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh instansi dan perusahaan tertentu, juga informasi mengenai kebutuhan TKI. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran melalui peningkatan jam kerja di berbagai bidang usaha, baik di perkotaan maupun di pedesaan dan meningkatnya devisa negara dari pengiriman TKI. Sasaran dari program ini adalah memperluas kesempatan kerja mandiri dan membangun pola penyediaan dan penggunaan tenaga kerja melalui sistem antar kerja terpadu serta sistem pengendalian penggunaan tenaga kerja asing dan menyiapkan tenaga kerja Indonesia pengganti.

## 4. Penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri

Penempatan TKI ke luar negeri ini mempunyai banyak manfaat, disamping mengurangi pengangguran juga meningkatkan devisa negara serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Oleh karena itu peningkatan kualitas dan perlindungan TKI sangat penting. Menurut data dari Disnakertrans Kota Kendari, jumlah permintaan TKI asal Kota Kendari tahun 2006 berdasarkan permintaan (job order) sebesar 75 TKI ke Arab Saudi dan 58 TKI ke Jepang. Sementara jumlah penempatan TKI pada tahun yang sama sebesar 55 TKI di Arab Saudi dan 6 TKI di Jepang.

### **5. Perlindungan Tenaga Kerja**

Berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penerapannya. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan tenaga kerja secara jelas dimuat dalam UU No. 13 Tahun 2003. Perlindungan ini termasuk perlindungan terhadap pekerja anak.

### **6. Pengawasan Ketenagakerjaan**

Pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 176, 177, dan 178 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai yang mempunyai kompetensi dan independen, guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pegawai pengawas tersebut ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Bantuan-bantuan yang diterima oleh Disnakertrans dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran di Kota Kendari selama ini diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bantuan lebih diprioritaskan dalam bentuk pemberian buku terutama bagi para calon pekerja yang dilatih di Balai Latihan Kerja (BLK). Sementara bantuan dari LSM belum ada.

### **2.3. Peran Balai Latihan Kerja (BLK)**

Menurut M. Partomuan Harahap selaku Kepala BLK Kendari, selama ini masalah pokok ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut ;

1. Masalah pengangguran dan perluasan kesempatan kerja
2. Masalah kualitas kerja para tenaga kerja/SDM Indonesia
3. Masalah HI (Hubungan Industrial) atau hubungan kerja para pekerja
4. Masalah kecelakaan dan pelanggaran norma-norma kerja
5. Masalah eksploitasi TKI yang tidak berperikemanusiaan

Poin kedua dari masalah ketenagakerjaan di atas menjadi tugas BLK yang memiliki program utama meningkatkan kualitas ketrampilan tenaga kerja, yaitu mensinkronkan ketrampilan tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia dengan paradigma/kebijaksanaan *3 ini 1* (pelatihan harus sinkron dengan sertifikasi, dan harus sinkron dengan penempatan). Demikian juga dengan kurikulum dan pelaksanaan pelatihan harus sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk pasar kerja. Sebagai contoh ; pelatihan mengenai sepeda motor, jika pasar kerjanya (bengkel) membutuhkan tenaga kerja untuk menambal ban, maka pelatihannya mengenai tambal ban. Namun apabila ada bengkel yang membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam hal servis mesin, servis kelistrikan, dan servis chasis (rangka-rangka sepeda motor), maka latihan yang diadakan

adalah latihan bongkar mesin, bongkar kelistrikan, dan bongkar chasis. Sehingga setiap jenis kejuruan yang dibuka di BLK tidak harus memiliki kurikulum yang sama.

Filosofi BLK adalah melaksanakan latihan kerja (melakukan satu jenis/beberapa pekerjaan berulang-ulang sampai tenaga kerja menjadi terampil), sehingga dari penyelenggaraan pelatihan peningkatan kualitas ketrampilan yang diselenggarakan di setiap BLK di Indonesia ini diharapkan lulusan memiliki yaitu :

1. Ketahanan kerja sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja.
2. Pengetahuan kerja
3. Ketrampilan menggunakan pengetahuan kerja yang dimiliki (mampu mempraktekan teori yang dipelajari)
4. Tehnik/cara yang efektif dan efisien menggunakan no. 2 dan 3
5. Sikap/tingkah laku yang dipengaruhi oleh 2, 3, dan 4, sehingga diharapkan setiap lulusan BLK memiliki etos kerja
6. Pengalaman kerja, yaitu dapat membedakan mana pekerjaan yang benar atau salah, karena sudah dilaksanakan sewaktu latihan.

Dari 1 sampai dengan 6 di atas, diharapkan setiap lulusan BLK mampu berpartisipasi mengatasi permasalahan tenaga kerja baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun nasional.

Sistem latihan kerja yang dilaksanakan di BLK terdiri dari :

1. Sistem Institusional dan Non Institusional/*Mobile Training Unit* (MTU) berbasis masyarakat.
2. Sistem Institusional dan Non Institusional/MTU berbasis kompetensi
3. Sistem Institusional dan Non Institusional/MTU berbasis pemagangan

Arti dari :

1. Sistem Latihan Institusional yaitu sistem yang dilaksanakan di dalam BLK dengan kurikulum bermuatan materi umum. Materi inti kejuruan dan materi penunjang *On The Job Training* (OJT) dan lamanya lebih dari 480 jam.
2. Sistem Latihan Non Institusional/MTU yaitu sistem latihan yang dilaksanakan di luar BLK/desa-desa dengan kurikulum hanya bermuatan materi inti kejuruan dan lamanya sekitar 1 bulan.
3. Latihan kerja berbasis masyarakat adalah latihan kerja yang mengacu pada kebutuhan masyarakat atau potensi kesempatan kerja di daerah-daerah.

4. Latihan kerja berbasis kompetensi adalah latihan kerja yang mengacu pada kompetensi pada satu spesialisasi pekerjaan. Misalnya, tenaga kerja servis mobil dibutuhkan spesialisasi servis kalbulator, sehingga yang dilatih hanya servis kalbulator saja sampai selesai (spesialisasi kalbulator).
5. Latihan berbasis pemagangan adalah latihan yang lebih menitikberatkan memperoleh keterampilan dan etos kerja melalui pemagangan di perusahaan-perusahaan sesuai bidang usaha yang diminati oleh peserta pelatihan.

Metode peningkatan kualitas tenaga kerja/SDM dalam penyelenggaraan latihan di BLK selama ini :

1. Teori 20 persen, selebihnya praktek. Teori sudah termasuk petunjuk/penjelasan instruktur pada saat praktek.
2. Latihan kerja biasanya diadakan sekitar 2 bulan dan magang di perusahaan sekitar 1 bulan untuk mencocokkan keterampilan yang diperoleh di BLK dengan penerapan di perusahaan.

Adapun jenis kejuruan pelatihan di BLK Kota Kendari adalah ; Kejuruan Teknologi Mekanik, Kejuruan Automotif, Kejuruan Elektronika, Kejuruan Listrik, Kejuruan Bangunan, Kejuruan Tata Niaga, Kejuruan Aneka Kejuruan, dan Kejuruan Pertanian.

Dana pelatihan selama ini berasal dari 2 sumber, yaitu :

1. APBN/APBD.
2. Peserta atau instansi yang menggunakan tenaga kerja.

Latihan yang diselenggarakan dengan dana APBN/APBD berdasarkan kebutuhan daerah, sedangkan latihan yang dananya bersumber dari peserta/perusahaan sesuai dengan kebutuhan peserta/perusahaan (apabila tidak ada dana dari pemerintah).

Menurut M. Partomuan Harahap, hampir semua instansi di Kota Kendari sudah diajak bekerja sama dengan BLK dalam penyaluran tenaga kerja yang sudah dilatih, baik pemerintah maupun swasta, kecuali BPS. Penyaluran tenaga kerja juga dilakukan ke luar negeri disesuaikan dengan permintaan dari luar negeri dan keahlian tenaga kerja. Proses penyaluran tenaga kerja biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung disalurkan ke pengguna atau mengarahkan mereka untuk berwirausaha. Sementara proses rekrutmen tenaga kerjanya dilakukan lewat pengumuman pendaftaran yang dilakukan oleh Disnakertrans setempat. Kemudian diadakan Tes Potensi Akademik (TPA) dan wawancara. Semua proses seleksi dari pendaftaran, penilaian hingga pengumuman penerimaan dilakukan oleh Disnakertrans, pengguna tinggal terima bersih.

### 3. Situasi Ketenagakerjaan Rumah Tangga Rumah Tangga Responden

Guna mendukung studi tentang ketenagakerjaan ini dilakukan wawancara terhadap 10 rumah tangga sebagai sampel responden. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang masalah ketenagakerjaan dan kemungkinan terdapat perbedaan konsep ketenagakerjaan menurut BPS dan menurut responden. Responden yang diwawancarai adalah penduduk Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari. Perbedaan jam kerja masing-masing responden menjadi salah satu kendala yang ditemui di lapangan, sehingga waktu survei harus menyesuaikan dan informasi yang dibutuhkan dari beberapa responden diperoleh secara tidak langsung dari responden lain.

#### 3.1. Keterangan Demografi dan Pendidikan

##### 3.1.1. Demografi

Banyaknya responden rumah tangga yang diwawancarai dalam penelitian ini ada 10 rumah tangga. Umur kepala rumah tangga responden bervariasi antara 27 tahun sampai dengan 66 tahun. Jika dilihat status perkawinan, 9 orang dari mereka berstatus menikah, hanya 1 orang berstatus cerai mati dan merupakan kepala rumah tangga perempuan satu-satunya. Secara keseluruhan, dari 10 rumah tangga responden terdapat 18 anggota rumah tangga (ART) laki-laki dan 30 ART perempuan. Sebanyak 7 ART masih berumur antara 0-4 tahun, kemudian sebanyak 12 ART berumur antara 5-14 tahun. Sementara itu jumlah ART yang berumur 15-64 tahun ada 28 orang dan hanya 1 ART berumur 66 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa responden yang diwawancarai lebih banyak yang berusia produktif. Empat rumah tangga mempunyai tanggungan masing-masing 3 orang, tiga rumah tangga mempunyai tanggungan masing-masing 6 orang, dua rumah tangga memiliki tanggungan 2 orang, dan satu rumah tangga yang mempunyai tanggungan 4 orang. Enam rumah tangga masih mempunyai tanggungan anak-anak sekolah, rata-rata masih bersekolah di tingkat SD dan SMTP, hanya satu rumah tangga yang masih menanggung 2 anak bersekolah di SMTA.

Dari 10 RT, sebanyak 6 rumah tangga menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan mereka masih kurang selama setahun terakhir. Alasannya karena pendapatan mereka belum mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara ada 2 RT yang berpendapat masih mencukupi karena anak-anak masih balita sehingga belum memerlukan banyak biaya. Sisanya 2 RT berpendapat tingkat kesejahteraan mereka pas-pasan. Salah satu RT yang berpendapat bahwa tingkat kesejahteraan mereka pas-pasan adalah rumah tangga Bu Huna, satu-satunya kepala rumah tangga perempuan yang suaminya sudah lama meninggal. Beliau adalah seorang nenek yang tinggal dengan 2 anak perempuan dan 1 cucu laki-laki berumur 1 tahun. Sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, dia usaha berjualan warung makanan ringan dan rokok kecil-kecilan di depan rumahnya dengan omset sehari sekitar Rp. 20.000,-. Usahanya dibantu oleh salah satu anak perempuan yang belum menikah. Anak perempuan lainnya bekerja di Perusahaan Industri Pengolahan Ikan sebagai buruh di Bagian Produksi dengan gaji Rp. 640.000,- per bulan.

### **3.1.2. Pendidikan**

Jika dilihat tingkat partisipasi sekolah ART dari 10 RT, maka dari 48 ART terdapat 26 ART yang masih sekolah, 11 ART sudah tidak sekolah lagi, dan 11 ART tidak/belum pernah sekolah. 9 ART dari 11 ART yang tidak/belum pernah sekolah merupakan ART yang masih berumur 5 tahun ke bawah.

Pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh masing-masing ART (berumur lebih dari 5 tahun) adalah sebagai berikut ; 4 ART tidak/belum pernah sekolah, 6 ART tidak/belum tamat SD, 13 ART Tamat SD/MI, 10 ART Tamat SLTP Umum/MTs, 5 ART Tamat SLTA Umum/MA (3 ART Jurusan IPA dan 2 Jurusan IPS), dan 1 ART Tamat SLTA Kejuruan (Pelayaran).

### **3.2. Keterangan Ketenagakerjaan**

Bekerja menurut konsep BPS adalah melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga/tanpa upah). Namun ketika pertanyaan "Apakah selama seminggu yang lalu (nama) bekerja?" dilontarkan ke responden, maka jawaban mayoritas responden akan menjawab tidak. Hal ini disebabkan karena dalam benak responden yang dinamakan bekerja adalah orang yang bekerja di kantor dengan penghasilan tetap dan jam kerja teratur. Bahkan menurut beberapa responden, pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar tidak dianggap sebagai bekerja, karena menurut mereka orang dikatakan bekerja jika memiliki penghasilan. Disamping itu orang yang bekerja dengan jam kerja tidak beraturan/musiman belum dikatakan sebagai bekerja karena penghasilannya belum beraturan (tetap). Sehingga untuk menggali informasi tentang bekerja ke responden, pertanyaan berikutnya (Sakernas) sangat diperlukan, yaitu "Seperti (NAMA) ketahui, orang bisa bekerja untuk mendapat bayaran uang atau barang, atau tanpa bayaran tapi membantu menambah penghasilan. Ada yang berjualan, mempunyai usaha kecil-kecilan, bekerja membantu di pertanian atau usaha keluarga". Satu hal lagi, konsep pekerjaan utama BPS selama ini adalah pekerjaan dengan jam terbanyak, jika pekerjaan-pekerjaan tersebut sama banyak, baru diambil pekerjaan dengan penghasilan terbesar. Namun dari hasil wawancara di 10 RT, semua responden berpendapat bahwa pekerjaan utama adalah pekerjaan yang mendatangkan hasil terbesar.

Dari 29 responden yang berumur 15 tahun ke atas, ada 23 responden yang bekerja/berusaha, baik yang dibayar/berpenghasilan maupun yang tidak dibayar. Sektor Industri dan Pertanian merupakan lapangan usaha dari pekerjaan utama yang terbanyak dilakukan oleh responden. Di sektor Industri, sebanyak 5 orang memfillet ikan pada Perusahaan Industri Pengolahan Ikan, dan 1 orang bekerja di Bagian Administrasi Perusahaan Percetakan. Sementara yang bekerja di sektor Pertanian ada 6 orang, 1 orang bekerja sebagai penangkap ikan dan 5 orang bekerja membudidayakan rumput laut. Yang bekerja di sektor Konstruksi ada 4 orang, 2 orang memasang cincin tanggul jembatan dan 2 orang membuat kusen (pintu dan jendela rumah) dari kayu. Di sektor

Perdagangan ada 4 orang, masing-masing membuka warung sembako dan warung rokok. Sisanya 1 bekerja di sektor Jasa sebagai penjahit sprei, 1 orang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 1 orang sebagai tukang ojek. Disamping itu, ada 3 responden yang memiliki usaha tambahan disamping pekerjaan utamanya, yaitu membuat kue basah dan cake di rumah, membuka rental komputer, dan budidaya rumput laut.

Dari seluruh responden hanya ada 5 orang yang sedang mencari pekerjaan dengan alasan ingin mendapat penghasilan lebih dari pekerjaan sekarang. Umumnya informasi tentang lowongan kerja diperoleh lewat teman atau saudara. Sebaliknya beberapa alasan responden yang tidak mencari pekerjaan di antaranya kurang percaya diri karena pendidikan rendah, ingin jadi ibu rumah tangga saja, dan tidak mempunyai waktu lagi sudah sibuk dengan pekerjaan sekarang. Selain itu, ada 2 orang yang ingin atau sedang mempersiapkan usaha seperti membuka warung kelontong dan budidaya rumput laut, namun masih belum terwujud karena kekurangan modal.

Hari yang diperlukan untuk bekerja bervariasi dari 5 hari sampai 7 hari kerja, dengan jam kerja juga bervariasi dari 48 jam sampai dengan 70 jam. Hanya ada satu orang dengan jam kerja tidak menentu karena sebagai nelayan tangkap ikan selama 3 bulan kontrak berada di atas laut. Dilihat dari penghasilannya, penghasilan responden berkisar dari Rp. 350.000,- hingga Rp. 1.200.000,-. Khusus nelayan tangkap ikan penghasilannya sistem kontrak, sekitar Rp. 2.500.000,- per tiga bulan. Jika dilihat berdasarkan status pekerjaan utama, pada umumnya sebagai buruh lepas harian jika bekerja di sektor Industri. Sementara responden yang berusaha membudidayakan rumput laut, membuat kusen, dan perdagangan statusnya usaha sendiri atau usaha dengan dibantu pekerja tak dibayar. Ketika ditanyakan apabila ada penawaran kerja untuk mereka, semua menjawab bersedia asalkan upahnya lebih besar dari penghasilan sekarang dan bisa untuk hidup. Dengan kata lain mereka berharap pekerjaan yang baru dapat meningkatkan kesejahteraan/ taraf hidupnya.

Sebagian besar dari responden yang bekerja sudah pernah bekerja sebelumnya di tempat lain. Rata-rata responden pernah bekerja di Perusahaan Industri Pengolahan Ikan "PT. Darma Samudra", suatu perusahaan besar yang pernah berdiri di Kota Kendari namun sekarang sudah bangkrut. Beberapa responden pernah menjadi nelayan tangkap ikan sampai ke Nusa Tenggara Timur dan Ambon, namun akhirnya mereka beralih profesi seiring berkurangnya hasil tangkapan.

#### **4. Saran Perbaikan Sakernas**

##### **4.1. Perbedaan Konsep Ketenagakerjaan**

Selama melakukan wawancara dengan beberapa responden di beberapa instansi terkait tidak ditemukan perbedaan konsep mengenai ketenagakerjaan. Sebab semua sumber data yang berhubungan dengan ketenagakerjaan seperti data angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan penduduk yang bekerja

menurut lapangan pekerjaan diperoleh dari BPS. Sehingga data-data yang dihasilkan oleh Disnakertrans mengenai ketenagakerjaan hanya bersifat penunjang, seperti data ; Pelatihan Ketrampilan Kerja Pola Institusional sesuai kejuruan masing-masing, Bursa Tenaga Kerja (pencari kerja, lowongan, dan penempatannya), Pendayagunaan Tenaga Kerja, Jumlah Permintaan TKI, Jumlah Penempatan TKI, Jumlah Tenaga Kerja Asing, Upah Minimum Pekerja dan Kebutuhan Hidup Minimum, dan lain-lain. Data yang berasal dari Disnakertrans tersebut merupakan hasil pendataan sendiri atau registrasi se-Kota Kendari dalam bentuk kuesioner dan laporan BLK. Selanjutnya dibuat database tersendiri.

Pandangan, persepsi, dan opini tentang tingkat pengangguran, angkatan kerja, dan kesempatan kerja masing-masing instansi selain Disnakertrans sudah cukup baik karena masing-masing instansi sudah berpikir ke arah pengurangan tingkat pengangguran. Hal ini terkait dengan 8 isu pembangunan daerah kota yaitu ;

1. Terbatasnya prasarana dasar
2. Kerusakan lingkungan
3. Rendahnya derajat kesehatan
4. Pembangunan penduduk
5. Kerawanan keamanan di berbagai bidang
6. Lemahnya penegakan hukum
7. Lambatnya pemulihan ekonomi
8. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah

### **4.2. Saran untuk Perbaikan Sakernas**

Konsep pekerjaan utama di BPS selama ini adalah pekerjaan yang dilakukan dengan jumlah jam terbanyak, jika pekerjaan-pekerjaan tersebut sama banyak, baru diambil pekerjaan dengan penghasilan terbesar. Namun dari hasil wawancara terhadap 10 RT pada studi ini, semua responden berpendapat bahwa pekerjaan utama adalah pekerjaan yang mendatangkan penghasilan terbesar. Sehingga saran untuk perbaikan Sakernas mendatang tentang konsep pekerjaan utama hendaknya mengacu pada pekerjaan dengan penghasilan paling besar bukan kepada jumlah jam terbanyak.